



KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



**Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital**

LAPORAN KINERJA

BALAI MONITOR SFR KELAS II BANDA ACEH

TAHUN 2025



@balmonaceh



Balmon Aceh

LAPORAN KINERJA

BALAI MONITOR SFR KELAS II BANDA ACEH

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

TAHUN 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025 ini disusun berdasarkan program kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tanggungjawab dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan dan dicapai pada tahun yang sudah berjalan untuk memberikan gambaran terkait capaian dan tantangan yang dihadapi sebagai masukan dalam program kinerja yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh pada tahun 2025 berpedoman pada perjanjian kinerja yang memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 15 (lima belas) indikator kinerja dan 15 (lima belas) target kinerja yang harus dicapai di wilayah kerja Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 15 (lima belas) target tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 (tiga) target dan Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 13 (tiga belas) target.

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target	Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	
				Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota	100%	125%
	2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
	3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%
	4.	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133,33%
	5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117,65%
	6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	93%	116,25%
	7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%
	8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%	100%	100%
	9.	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
	10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
	11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%
	12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%
	13.	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	14.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025	86,95 (Nilai)	85,40	98,22%
	15.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)	100	103,09%

SASARAN 1 :

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pengawasan terhadap pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dijalankan untuk memastikan penggunaan ruang udara yang aman, tertib, dan sesuai regulasi di era Revolusi Industri 4.0. Kegiatan ini berfungsi sebagai deteksi dini terhadap penggunaan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas spektrum, sekaligus mendukung kualitas layanan telekomunikasi bagi sektor pariwisata, UMKM, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Aceh.

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil melampaui target jangkauan monitoring yang ditetapkan sebesar 80% (19 kabupaten/kota), dengan realisasi mencapai 22 kabupaten/kota atau 120% dari target. Selain itu, tingkat identifikasi hasil okupansi mencapai 99,96% dengan total 12.283 penggunaan frekuensi yang teridentifikasi, yang

membuktikan efektivitas pengawasan dalam menjaga inklusi digital di daerah.

IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio

Pemeriksaan stasiun radio dilakukan melalui audit teknis lapangan dan pemantauan jarak jauh untuk memastikan setiap penyelenggara mematuhi parameter teknis dalam Izin Stasiun Radio (ISR). Fokus pemeriksaan mencakup stasiun microwave link, penyiaran radio FM, dan televisi digital guna memitigasi potensi interferensi yang dapat merugikan pengguna frekuensi lainnya.

Sepanjang tahun 2025, seluruh target pemeriksaan stasiun radio yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan secara penuh atau mencapai 100%. Keberhasilan ini menjamin bahwa infrastruktur telekomunikasi di Aceh beroperasi sesuai standar teknis, sehingga layanan komunikasi publik dapat dinikmati masyarakat tanpa gangguan teknis yang berarti

IK-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Gangguan spektrum frekuensi radio merupakan ancaman serius bagi kelancaran komunikasi radio dan navigasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu, indikator ini menuntut respons cepat dalam proses lokalisasi dan penghentian sumber gangguan guna melindungi kepentingan publik dan keamanan negara di ruang udara.

Unit kerja berhasil mencatatkan kinerja sempurna dengan menyelesaikan 100% aduan gangguan yang diterima (4 kasus), melampaui target nasional sebesar 95%. Kasus yang ditangani meliputi gangguan pada radar radiosonde, microwave link, hingga layanan televisi digital, yang semuanya berhasil diselesaikan melalui koordinasi teknis yang komprehensif.

IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Pengawasan alat dan perangkat telekomunikasi bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat yang beredar di masyarakat telah memiliki sertifikat resmi dan memenuhi standar teknis. Hal ini sangat krusial untuk mencegah penggunaan perangkat ilegal yang berpotensi menimbulkan interferensi frekuensi serta kerugian materi bagi konsumen.

Realisasi kinerja untuk indikator ini mencapai 133,33%, di mana tim berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 344 perangkat dari target awal sebanyak 300 perangkat. Dengan pencapaian 100% pada persentase kepatuhan, Balai Monitor telah memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Aceh dari peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak standar

IK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Keandalan sistem monitoring yang terdiri dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) Tetap, Transportabel, dan Genggam merupakan tulang punggung dalam pengawasan spektrum. Indikator ini diukur melalui *Service Level Agreement* (SLA) untuk menjamin perangkat monitoring selalu dalam kondisi siap operasional guna mendukung tugas pemantauan secara kontinu.

Capaian SLA operasional perangkat pada tahun 2025 mencapai angka maksimal 100%, jauh melampaui target minimal yang ditetapkan sebesar 85%. Optimalisasi ini didukung oleh pemeliharaan rutin, perbaikan infrastruktur daya (genset), serta kalibrasi perangkat, sehingga seluruh sistem pemantauan di Aceh berfungsi optimal dalam mendeteksi penggunaan frekuensi.

IK-6 Penanganan Sanksi Denda

Administratif

Penegakan hukum melalui sanksi administratif denda merupakan instrumen penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Tindakan ini mencakup penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Denda (SPPD) sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil operasi penertiban atau inspeksi lapangan.

Pada tahun ini, penanganan sanksi denda administratif mencapai 93,22%, atau secara persentase kinerja mencapai 116,53% dari target 80%. Sebanyak 33 SPPD telah ditindaklanjuti secara administratif, yang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kepatuhan hukum serta berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor komunikasi.

IK-7 Tersedianya Data Hasil

Pengukuran Kualitas Layanan

Pengukuran kualitas layanan seluler (*Quality of Service*) dilakukan untuk memetakan performa jaringan operator seluler di berbagai wilayah, termasuk identifikasi daerah *blank spot*. Data hasil pengukuran ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi pemenuhan komitmen penyelenggara telekomunikasi kepada masyarakat.

Realisasi pengukuran mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 19 kabupaten/kota (capaian 125%). Melalui metode *drive test* dan *static test*, diperoleh gambaran akurat mengenai kualitas sinyal dan kecepatan data, yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pengembangan infrastruktur digital di Aceh.

IK-8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

Layanan sertifikasi ini bertujuan untuk melegalkan dan meningkatkan kompetensi pengguna radio amatir serta nelayan melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan sertifikasi operasional lainnya. Sertifikasi ini penting agar komunikasi radio di laut maupun di darat dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan alokasi frekuensi yang ditentukan.

Kegiatan UNAR di Aceh pada tahun 2025 diikuti oleh 135 peserta, yang merupakan 135% dari target awal 70 peserta. Dengan realisasi mencapai 100% dari rencana penyelenggaraan, program ini berhasil memperluas jangkauan layanan perizinan serta memperkuat sinergi dengan organisasi amatir radio dan masyarakat nelayan di Aceh.

IK-9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dilakukan melalui pendistribusian Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan koordinasi intensif dengan para Wajib Bayar yang memiliki tunggakan. Langkah ini krusial untuk meminimalisir piutang negara dan memastikan penerimaan sektor SFR berjalan sesuai target anggaran.

Unit kerja berhasil menyelesaikan 100% tugas penanganan piutang dengan mendistribusikan 341 SPP kepada Wajib Bayar di wilayah Aceh. Melalui pendekatan yang persuasif namun tegas, pengelolaan administrasi piutang ini berjalan efektif tanpa kendala distribusi, yang secara langsung mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

IK-10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Sosialisasi dilakukan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai regulasi terkini di bidang spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan tingkat pemahaman masyarakat meningkat sehingga pelanggaran penggunaan frekuensi akibat ketidaktahuan dapat diminimalisir.

Pelaksanaan sosialisasi di tahun 2025 terealisasi 100% dengan menghadirkan 30 peserta dari berbagai kalangan sesuai dengan target perencanaan. Kegiatan ini menjadi wadah dialog interaktif yang efektif dalam menyebarkan kebijakan kementerian serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam berkomunikasi radio.

IK-11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Survei ini mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebagai indikator keberhasilan unit kerja dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat terhadap profesionalisme dan kenyamanan layanan yang diberikan.

Hasil survei menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dengan nilai 3,82 dari skala 4 (100% dari target). Skor ini menempatkan kualitas pelayanan publik Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dalam kategori Mutu A (Sangat Baik), yang mencerminkan dedikasi tinggi seluruh aparatur dalam memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan.

IK-12 Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dijalankan untuk memantau sejauh mana nilai-nilai antikorupsi diimplementasikan dalam proses pelayanan. Indikator ini merupakan bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Capaian nilai integritas mencapai 3,84 dari skala 4 (100% dari target), yang mengindikasikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Hasil ini mempertegas komitmen instansi dalam menjaga marwah birokrasi dan kepercayaan publik melalui perilaku aparatur yang berintegritas.

IK-13 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Kegiatan "PrimaAksi" difokuskan pada verifikasi lapangan terhadap koordinat stasiun microwave link yang terindikasi tidak sesuai dengan data di Izin Stasiun Radio (ISR). Ketepatan data lokasi sangat penting dalam sistem manajemen frekuensi untuk menghindari kesalahan perhitungan potensi interferensi antar jaringan.

Sebanyak 85 site microwave link berhasil diverifikasi secara tuntas, mencapai realisasi 100% dari target yang ditetapkan. Tindak lanjut verifikasi ini menghasilkan pembaruan data teknis yang akurat pada Master Data Referensi Site (MDRS), yang menjadi landasan bagi perizinan frekuensi radio yang lebih berkualitas dan presisi.

SASARAN 2 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

IK-14 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang mengukur aspek implementasi dan efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan aplikasi SMART dan e-Monev. Indikator ini mencerminkan sejauh mana anggaran yang dikelola mampu menghasilkan keluaran yang direncanakan secara efisien.

Realisasi NKA pada Desember 2025 mencapai 85,40 dari target 86,95 (capaian 98,22%). Meskipun terdapat sedikit deviasi akibat kebijakan Automatic Adjustment (blokir anggaran) dan proses likuidasi/revisi DIPA, serapan anggaran secara keseluruhan tetap sangat tinggi, yakni mencapai 97,61% dari pagu efektif setelah blokir.

IK-15 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Indikator ini mengukur tingkat akurasi, transparansi, dan kepatuhan unit kerja terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan yang tinggi merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Balai Monitor SFR II Banda Aceh berhasil meraih nilai sempurna yaitu 100, melampaui target yang ditetapkan sebesar 97 (capaian 103,09%). Keberhasilan ini dicapai melalui koordinasi yang solid antara pengelola keuangan dan BMN serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, memastikan laporan keuangan disajikan secara andal dan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata’ala atas berkah limpahan rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh capaian yang tertuang diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tahun 2025 menjadi momentum penguatan peran Balai Monitor SFR II Banda Aceh dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Patut disyukuri bahwa atas kerja keras seluruh tim, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil meraih prestasi membanggakan antara lain sebagai penerima predikat **“Pelayanan Prima” Tahun 2025** dan sebagai **Juara 1 dalam DJID Choice Award untuk kategori Penyelenggaraan Program Maritime On The Spot (MOTS) Terbanyak Tahun 2025**. Prestasi ini merupakan manifestasi komitmen kami dalam mendekatkan pelayanan publik di Provinsi Aceh.

Selain itu, dedikasi dalam menjaga kedaulatan spektrum frekuensi radio juga dibuktikan melalui aksi nyata di lapangan. Pada saat terjadi musibah bencana alam banjir di Provinsi Aceh pada Desember 2025, Balai Monitor SFR II Banda Aceh berperan aktif dalam Monitoring Pemulihan Jaringan Telekomunikasi guna memastikan konektivitas bagi masyarakat dan koordinasi penanganan darurat tetap berjalan optimal tanpa kendala interferensi.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada pimpinan dan masyarakat yang disusun dengan cermat dan terukur oleh seluruh tim kerja. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi komprehensif mengenai keberhasilan tugas pokok dan fungsi kami sepanjang tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, April 2026

Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh



Luthfi, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GRAFIK.....	15
DAFTAR GAMBAR.....	17
BAB I	18
PENDAHULUAN.....	18
LATAR BELAKANG.....	18
MAKSUD DAN TUJUAN	20
STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI	20
STRATEGIC ISSUED	22
POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS.....	22
SISTEM PELAPORAN.....	23
BAB II	25
PERENCANAAN KINERJA.....	25
RENCANA STRATEGIS.....	25
PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
SASARAN 1	29
Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	29
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio.....	37
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	45
Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	50
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	56
Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	62
Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	67
Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	72
Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio.....	77
Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	88
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	95
Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	101
SASARAN 2	107
Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025	107
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ..	116
BENCHMARK KINERJA	122
KINERJA LAINNYA	123
Penghargaan Predikat “Pelayanan Prima” dalam Pelaksanaan PEKPPP	123
Penghargaan Penyelenggara Program Maritime On The Spot (MOTS) Terbanyak Tahun 2025	124
Penghargaan Satker IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025	124
Pemusnahan Alat/Perangkat Telekomunikasi Hasil Penertiban	125
Monitoring Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025	127
Monitoring Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Terdampak Bencana Hidrometeorologi ..	128
BAB IV	131
PENUTUP	131
PENUTUP	131
KALEIDOSKOP TAHUN 2025	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025.....	3
Tabel 2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kerja Tahun 2025.....	27
Tabel 3 Pita Frekuensi Target Monitoring.....	31
Tabel 4 Identifikasi Hasil Monitoring SFR di Kabupaten/Kota Tahun 2025	32
Tabel 5 Monitoring ISR Per Kabupaten/Kota Tahun 2025	33
Tabel 6 Benchmark Capaian Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	36
Tabel 7 Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi.....	40
Tabel 8 Benchmark capaian Pemeriksaan Stasiun Radio.....	44
Tabel 9 Benchmark capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	48
Tabel 10 Benchmark capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	55
Tabel 11 Nilai Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025.....	58
Tabel 12 Benchmark Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	61
Tabel 13 Benchmark Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif	67
Tabel 14 Benchmark Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan.....	71
Tabel 15 Pelayanan Publik Terkait UNAR.....	72
Tabel 16 Nilai Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025	74
Tabel 17 Benchmark Capaian Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	77
Tabel 18 Pelayanan Publik Terkait Penanganan Piutang dan Pendampingan	78
Tabel 19 Tabel Wajib Bayar (WABA) berdasarkan Jenis Layanan.....	79
Tabel 20 Nilai Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025	80
Tabel 21 Benchmark Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	84
Tabel 22 Nilai Sosialisasi Pelayanan Publik di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025.....	85
Tabel 23 Benchmark Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik.....	88
Tabel 24 Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025	89
Tabel 25 Benchmark Capaian Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	94
Tabel 26 Nilai Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025	97
Tabel 27 Benchmark Capaian Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100
Tabel 28 Benchmark Capaian Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	106
Tabel 29 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025	107
Tabel 30 DIPA Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA 2025	108
Tabel 31 Revisi Anggaran DIPA lama	108
Tabel 32 Revisi Anggaran DIPA baru.....	108
Tabel 33 Capaian IKPA Tahun 2025 DIPA sebelum Likuidasi.....	109
Tabel 34 Capaian IKPA Tahun 2025 DIPA setelah Likuidasi.....	109
Tabel 35 Data Pemeliharaan Aset BMN Tahun 2025.....	110
Tabel 36 Daftar Pengadaan Belanja Modal Tahun 2025.....	110
Tabel 37 Mutasi Pegawai.....	111

Tabel 38 Pensiun Pegawai.....	111
Tabel 39 Penerimaan CPNS	111
Tabel 40 Penerimaan PPPK	111
Tabel 41 Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Tahun 2025	112
Tabel 42 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2025.....	112
Tabel 43 Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2025.....	112
Tabel 44 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025	114
Tabel 45 Benchmark Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025.....	115
Tabel 46 Indikator-indikator Penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2025.....	116
Tabel 47 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025 (Include Pagu Blokir)	118
Tabel 48 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025 (Exclude Pagu Blokir).....	118
Tabel 49 Nilai UAKPA Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA. 2021 s.d 2025	120
Tabel 50 Persentase Realisasi Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA. 2021 s.d 2025	120
Tabel 51 Benchmark Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	121
Tabel 52 Benchmark UPT Banda Aceh - Medan	122
Tabel 53 Daftar Perangkat Yang Dimusnahkan Tahun 2025	127

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025	30
Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2021-2025	30
Grafik 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025.....	38
Grafik 4 Perbandingan Capaian IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2021-2025	39
Grafik 5 Persentase Target Inspeksi	39
Grafik 6 Data Target Pemeriksaan Berdasarkan Pengguna	40
Grafik 7 Jumlah Kegiatan Inspeksi	40
Grafik 8 Hasil Kegiatan Inspeksi (1)	41
Grafik 9 Hasil Kegiatan Inspeksi (2)	41
Grafik 10 Hasil pengukuran FM	42
Grafik 11 Sebaran Pengukuran Radio FM di Kabupaten/Kota	42
Grafik 12 Hasil pengukuran Multiplexer	43
Grafik 13 Sebaran Penyelenggara MUX di wilayah layanan Aceh	43
Grafik 14 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025	46
Grafik 15 Perbandingan Capaian IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2021-2025	46
Grafik 16 Penanganan Gangguan	47
Grafik 17 Capaian IK-1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	52
Grafik 18 Perbandingan Capaian IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2021-2025	52
Grafik 19 Sebaran jumlah APT yang dimonitor per Kab/Kota	53
Grafik 20 Hasil Monitoring APT	54
Grafik 21 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025	63
Grafik 22 Perbandingan Capaian IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2021-2025	64
Grafik 23 Sebaran Penerbitan SPPD Kab/Kota.....	64
Grafik 24 Klasifikasi SPPD pada Tahun 2025	65
Grafik 25 Nominal SPPD pada Tahun 2025	65
Grafik 26 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler Tahun 2025.....	68
Grafik 27 Perbandingan Capaian IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler Tahun 2021-2025	69
Grafik 28 Pelayanan Publik Terkait UNAR.....	73
Grafik 29 Pelayanan Publik Terkait Penanganan Piutang dan Pendampingan	79
Grafik 30 Rekapitulasi jumlah SPP dan ISR	80
Grafik 31 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) Tahun 2025	102
Grafik 32 Perbandingan Capaian IK-1.13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Tahun 2021-2025.....	103

RINGKASAN EKSEKUTIF

Grafik 33 Lokasi Pemeriksaan Koordinat MW Link	103
Grafik 34 Jumlah ISR Per Kab/Kota	104
Grafik 35 Jumlah ISR Per Operator.....	104
Grafik 36 Jumlah tindak lanjut verifikasi ISR MW link	105
Grafik 37 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025	113
Grafik 38 Nilai UAKPA Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA. 2021 s.d 2025	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Strategi Renstra Komdigi.....	19
Gambar 2 Peta Wilayah Provinsi Aceh	19
Gambar 3 Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh.....	21
Gambar 4 Wilayah Penanganan Gangguan	47
Gambar 5 Kegiatan monitoring perangkat.....	53
Gambar 6 Timeline Kegiatan pemeliharaan Infrastruktur SMFR Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh.....	57
Gambar 7 Lokasi Pengukuran Kualitas Layanan Tahun 2025.....	69
Gambar 8 Hasil Survey Pelayanan Publik pada Tahun 2025	91
Gambar 9 Hasil Survey Pelayanan Publik pada Tahun 2025	96

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025-2029), kebijakan bidang broadband diarahkan untuk mencapai konektivitas broadband yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran program yaitu: meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia; meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband; meningkatnya kualitas internet broadband nasional; meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan; serta meningkatnya pertumbuhan industri perangkat digital dalam negeri.

Pengembangan konektivitas yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan kualitas internet broadband antar wilayah di Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan kecepatan rata-rata unduh baik mobile broadband maupun fixed broadband. Dalam mendukung peningkatan kualitas internet, strategi dibagi berdasarkan layanannya. Untuk peningkatan kualitas internet mobile broadband nasional dilakukan melalui dua sasaran utama, yaitu optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan broadband, serta pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Sedangkan, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan fixed broadband dilakukan melalui pengendalian QoS layanan internet broadband dan mendorong tersedianya internet exchange dan Content Delivery Network (CDN) di beberapa wilayah di Indonesia. Strategi untuk mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan broadband melalui pendekatan kebijakan nasional untuk menata spektrum frekuensi. Terkait dengan QoE dan QoS, dilakukan melalui pengukuran serta pengawasan layanan internet di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen Infrastruktur Digital untuk wilayah Provinsi Aceh memiliki tugas dan

fungsi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Aceh dengan luas wilayah 57.956,00 km² yang terbagi atas 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa.

Meningkatkan kualitas <i>mobile broadband</i> melalui penataan dan pengendalian spektrum frekuensi radio	
Strategi	Deskripsi
Menambah dan mengoptimalkan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband	Penyusunan kebijakan penataan spektrum frekuensi radio yang diarahkan untuk optimalisasi alokasi spektrum bagi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan <i>mobile broadband</i> , termasuk adopsi teknologi baru seperti misalnya Non Terrestrial Network (NTN)
Meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio	Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mencegah penurunan kualitas layanan broadband.

Meningkatnya kualitas <i>fixed broadband</i> melalui pengukuran <i>Quality of Services (QoS)</i> dan <i>Quality of Experience (QoE)</i> Telekomunikasi	
Strategi	Deskripsi
Melakukan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi	Penyelenggaraan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi yang diukur di Kab/Kota.

Gambar 1 Strategi Renstra Komdigi



Gambar 2 Peta Wilayah Provinsi Aceh

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025 disusun sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kegiatan serta pengelolaan anggaran tahun 2025. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dirumuskan dan disepakati.

Selain itu, LAKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penyelenggaraan Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Infrastruktur Digital mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Fekkuensi Radio.

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh. Struktur organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh terdiri dari:

1. Subbagian Umum

Subbbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dan mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) merupakan tenaga kerja perorangan yang mempunyai tugas mendukung operasional satuan kerja untuk layanan spesifik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio.



Gambar 3 Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh

STRATEGIC ISSUED



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Bagian ini menyajikan gambaran mengenai potensi dan permasalahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Potensi menggambarkan sumber daya, peluang, dan kondisi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, permasalahan strategis mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang memerlukan langkah penanganan secara sistematis. Analisis atas potensi dan permasalahan strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan dan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Potensi

1. Dukungan kebijakan Renstra DJID/Komdigi, yang memberikan arah jelas terkait peningkatan kapasitas infrastruktur digital dan pengawasan spektrum.

2. SDM berkompeten, dengan penerapan nilai BERAHLAK, khususnya kompeten, adaptif, dan kolaboratif.
3. Perangkat monitoring yang terus ditingkatkan, mendukung kebutuhan pengawasan spektrum sejalan dengan prioritas Renstra DJID.
4. Potensi kolaborasi lintas sektor, baik dengan operator telekomunikasi maupun instansi pemerintahan daerah, yang memperkuat ekosistem pelayanan dan penanganan gangguan.

Permasalahan Strategis

1. Pertumbuhan kebutuhan spektrum yang sangat cepat, seiring meluasnya layanan digital, IoT, dan teknologi broadband, sehingga intensitas pengendalian harus semakin ditingkatkan.
2. Gangguan spektrum bersifat dinamis, yang membutuhkan respons cepat serta koordinasi lintas pihak untuk menjaga kualitas layanan digital.
3. Wilayah pengawasan yang luas dan beragam, menuntut optimalisasi sumber daya dan strategi monitoring yang efektif.
4. Kebutuhan modernisasi peralatan, agar tetap relevan dengan standar teknis dan arah pembangunan infrastruktur digital dalam Renstra DJID.
5. Penyesuaian internal selama masa transisi kelembagaan Komdigi–DJID, yang memerlukan adaptasi, peningkatan kompetensi, serta harmonisasi administrasi dan layanan sesuai kerangka renstra.

SISTEM PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Perencanaan Kerja

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Akuntabilitas Kinerja

Berisikan capaian kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK).

4. Penutup

Berisikan simpulan umumas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Transformasi digital nasional yang terus berkembang menempatkan infrastruktur digital sebagai fondasi utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029, mempunyai Visi Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita. Pembangunan infrastruktur digital diarahkan untuk mewujudkan konektivitas yang merata, andal, dan berkelanjutan sebagai prasyarat terciptanya ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Infrastruktur telekomunikasi, khususnya pengelolaan spektrum frekuensi radio, memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya layanan digital yang berkualitas dan tertib secara nasional.

Sejalan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Komunikasi dan Digital yang memegang peran kunci dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur digital. Fokus Renstra Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2025–2029 ini diarahkan pada pemerataan sekaligus juga pada peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas, serta penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur digital nasional. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur digital dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara efektif. Hal ini sesuai dengan tugas Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang tertuang Permen Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 yaitu Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
- Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur digital.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada pemangku kepentingan terkait.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
- Penyelenggaraan dukungan manajemen dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mempunyai visi “Terwujudnya Infrastruktur Digital Nasional yang Inklusif, berkualitas, efektif dan efisien serta Berkelanjutan untuk Mendukung Transformasi Digital dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) melaksanakan rencana kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui kegiatan – kegiatan berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan spektrum frekuensi radio, guna menjamin pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, termasuk kegiatan penegakan hukum di bidang spektrum frekuensi radio, dalam rangka menjaga kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi.
3. Pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kualitas layanan telekomunikasi, sebagai dasar pengendalian teknis dan peningkatan mutu penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

4. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio, termasuk pelayanan perizinan, informasi, dan layanan teknis lainnya sesuai dengan kewenangan UPT.
5. Pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data serta informasi teknis, sebagai bahan perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, guna mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan infrastruktur digital di daerah.
7. Penyelenggaraan dukungan manajemen dan administrasi UPT, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja 2025 Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota
		2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4.	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%

		6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%
		9.	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
		13.	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	14.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025	86,95 (Nilai)
		13.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 1

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

LATAR BELAKANG

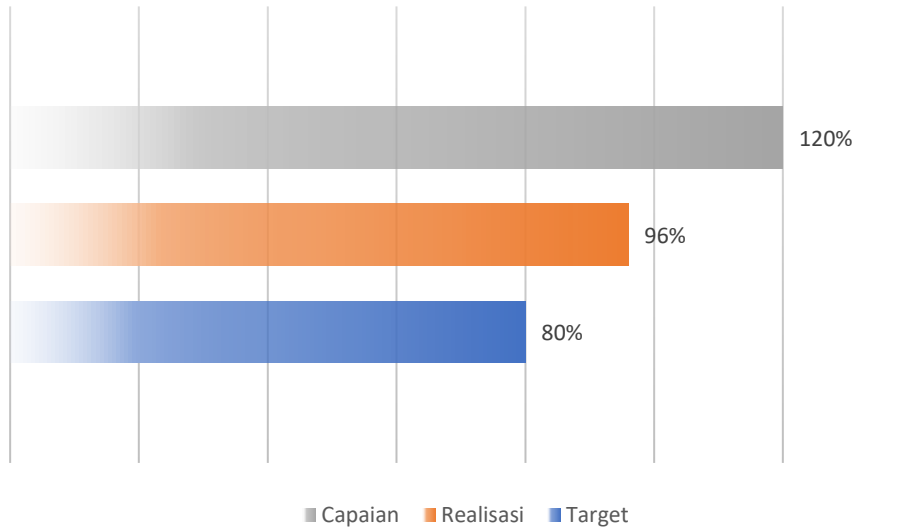
Pengawasan terhadap pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) perlu terus ditingkatkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 4.0. Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh menjalankan peran tersebut melalui kegiatan pemantauan penggunaan SFR, yang dijadikan sebagai indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan spektrum serta memastikan pemanfaatannya berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap penggunaan ilegal, menjamin kepatuhan para pengguna frekuensi, serta menjaga mutu layanan yang sangat bergantung pada kestabilan spektrum.

Pencapaian indikator ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku sektor pariwisata dan UMKM, serta instansi pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan telekomunikasi. Selain itu, pemantauan penggunaan SFR juga berkontribusi dalam memastikan tersedianya konektivitas yang andal, sehingga mendukung peningkatan inklusi digital serta kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh.

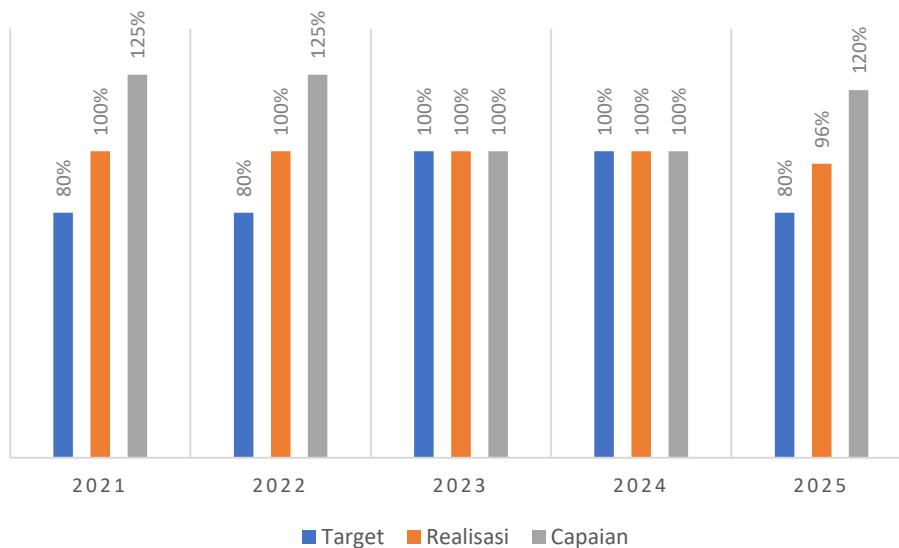
CAPAIAN

Sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, perlu dilakukan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sekurang-kurangnya di 80% jumlah kabupaten/kota. Dengan Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota, maka target kabupaten/kota yang perlu dimonitor sebanyak 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Monitoring dinyatakan memenuhi kinerja apabila telah memenuhi okupansi 15 pita frekuensi radio sesuai penugasan, mencapai minimal 60% realisasi monitoring terhadap Izin Stasiun Radio (ISR) yang tercatat pada Aplikasi ROL, mengidentifikasi sekurang-kurangnya 80% hasil monitoring, serta menerapkan sanksi atas setiap temuan pelanggaran.

Selama tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melakukan monitoring spektrum frekuensi radio di 22 (dua puluh dua) kabupaten kota atau mencapai 120% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan optimalisasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh sehingga mencapai realisasi yang melebihi target yang ditetapkan.



Grafik 1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025



Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2021-2025

Capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh pada periode 2021–2025 yang secara konsisten mencapai bahkan melampaui target monitoring penggunaan SFR menunjukkan kesinambungan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

ANALISIS



Pita Frekuensi Okupansi

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, terdapat 15 subservice/pita frekuensi radio yang harus dimonitor. Pada Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan okupansi 15 pita sesuai dengan pita penugasan di seluruh kabupaten/kota di wilayah Aceh.

Tabel 3 Pita Frekuensi Target Monitoring

NO PITA	PITA FREKUENSI	RENTANG PITA
1	Radio FM	87.5 – 108 MHz
2	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
3	Komrad VHF,Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik, Maritim VHF	150 – 174 MHz
4	DRM, DAB	174 – 230 MHz
5	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300 – 430 MHz
6	Komrad, UHF	430 – 460 MHz
7	Tetap, Bergerak	460 – 470 MHz
8	Televisi UHF, IMT	478 – 806 MHz
9	Trunking, Downlink Selular 800	851 – 880 MHz
10	Downlink Selular 900	925 – 960 MHz
11	International Mobile Telecommunication (IMT)	1427 – 1518 MHz
12	Downlink Selular 1800	1805 – 1880 MHz
13	Selular 2100	2110 – 2170 MHz

14	International Mobile Telecommunication (IMT)	2170 – 2200 MHz
15	Seluler, Broadbanda 2.3 GHz	2300 – 2400 MHz

Identifikasi Hasil Monitoring

Tabel 4 Identifikasi Hasil Monitoring SFR di Kabupaten/Kota Tahun 2025

Kab/Kota	IDEN Jumlah Termonitor	IDEN Target	IDEN Teridentifikasi	IDEN Persentase Capaian
ACEH BARAT	59	47	59	126%
ACEH BARAT DAYA	41	33	41	124%
ACEH BESAR	3206	2565	3203	125%
ACEH JAYA	40	32	40	125%
ACEH SELATAN	86	69	86	125%
ACEH SINGKIL	69	55	69	125%
ACEH TAMIANG	38	30	38	127%
ACEH TENGAH	49	39	49	126%
ACEH TENGGARA	428	342	428	125%
ACEH TIMUR	88	70	88	126%
ACEH UTARA	78	62	78	126%
BENER MERIAH	43	34	43	126%
BIREUEN	142	114	142	125%
GAYO LUES	40	32	40	125%
KOTA BANDA ACEH	5443	4354	5442	125%
KOTA LANGSA	56	45	56	124%
KOTA LHOKSEUMAWE	900	720	900	125%
KOTA SABANG	713	570	713	125%
KOTA SUBULUSSALAM	41	33	41	124%
NAGAN RAYA	608	486	607	125%
PIDIE	69	55	69	125%
PIDIE JAYA	51	41	51	124%

SIMEULUE	0	0	0	0%
----------	---	---	---	----

Berdasarkan hasil kegiatan okupansi pada 15 pita frekuensi radio yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 12.288 penggunaan frekuensi radio. Sesuai ketentuan, target identifikasi ditetapkan minimal sebesar 80% atau setara dengan 9.828 penggunaan frekuensi. Sepanjang tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil mengidentifikasi sebanyak 12.283 penggunaan frekuensi radio, atau mencapai 99,96% dari total hasil okupansi yang tercatat. Capaian tersebut menunjukkan realisasi kinerja sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat identifikasi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring serta konsistensi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dalam mengelola spektrum frekuensi radio secara tertib, terukur, dan berkelanjutan.

Monitoring ISR

Tabel 5 Monitoring ISR Per Kabupaten/Kota Tahun 2025

Kab/Kota	ISRMON Jumlah ISR	ISRMON Target	ISRMON Termonitor	ISRMON Persentase Capaian
ACEH BARAT	49	29	26	89.7%
ACEH BARAT DAYA	10	6	6	100.0%
ACEH BESAR	96	58	95	163.8%
ACEH JAYA	10	6	10	166.7%
ACEH SELATAN	13	8	12	150.0%
ACEH SINGKIL	14	8	10	125.0%
ACEH TAMIANG	26	16	13	81.3%
ACEH TENGAH	18	11	16	145.5%
ACEH TENGGARA	6	4	5	125.0%
ACEH TIMUR	27	16	21	131.3%
ACEH UTARA	34	20	33	165.0%
BENER MERIAH	6	4	6	150.0%
BIREUEN	27	16	27	168.8%
GAYO LUES	7	4	7	175.0%
KOTA BANDA ACEH	161	97	156	160.8%
KOTA LANGSA	20	12	19	158.3%
KOTA LHOKSEUMAWA	64	38	51	134.2%

KOTA SABANG	24	14	23	164.3%
KOTA SUBULUSSALAM	6	4	6	150.0%
NAGAN RAYA	22	13	18	138.5%
PIDIE	25	15	24	160.0%
PIDIE JAYA	6	4	6	150.0%
SIMEULUE	12	7	0	0.0%

Selain pelaksanaan kegiatan okupansi terhadap 15 pita frekuensi radio dan identifikasi hasil monitoring, indikator kinerja ini juga menetapkan target monitoring terhadap Izin Stasiun Radio (ISR) sebesar 60% dari total 683 ISR yang terdaftar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh atau sejumlah 410 ISR. Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Aceh berhasil melaksanakan monitoring terhadap 590 ISR, sehingga realisasi kinerja mencapai 144% dari target yang telah ditetapkan.

Pengenaan Sanksi terhadap Temuan Pelanggaran Hasil Monitor Teridentifikasi

Berdasarkan hasil monitoring SFR selama tahun 2025 di kabupaten/kota di wilayah Aceh, tidak ditemukan adanya pelanggaran penggunaan SFR yang termonitor. Dengan demikian, tidak terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pelanggaran penggunaan SFR.

DAMPAK

Pelaksanaan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban serta efisiensi pemanfaatan spektrum di tingkat kabupaten/kota. Sebagai bagian dari tugas Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, kegiatan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan spektrum dimanfaatkan secara tepat, tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat komunikasi, baik untuk kepentingan publik maupun industri. Dalam pelaksanaannya, monitoring spektrum frekuensi juga bertujuan untuk menindak penggunaan ilegal yang berpotensi menimbulkan interferensi serta merugikan pengguna yang sah. Melalui pendekatan yang sistematis, pengawasan ini mendukung terciptanya ekosistem komunikasi yang lebih stabil dan dapat diandalkan.



TINDAK LANJUT

Hasil pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio perlu ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan interferensi antar layanan. Adapun langkah tindak lanjut yang dilakukan meliputi identifikasi terhadap potensi penyimpangan penggunaan, penyampaian pemberitahuan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, pelaksanaan tindakan perbaikan atau pengurangan gangguan akibat penyimpangan penggunaan SFR, pemberian sanksi atau penegakan hukum apabila diperlukan, serta koordinasi dengan pihak maupun stakeholder terkait. Seluruh rangkaian tindak lanjut tersebut dilakukan guna menjamin agar penggunaan dan pemanfaatan SFR dapat berlangsung secara efisien, tertib, dan sesuai dengan peruntukannya.

REKOMENDASI

Pelaksanaan monitoring pengguna spektrum frekuensi radio bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan spektrum agar lebih efisien dan optimal, sehingga masyarakat serta para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini secara maksimal dan berkualitas. Agar kegiatan monitoring tersebut dapat berjalan dengan baik serta mencapai target kinerja yang ditetapkan, diperlukan peningkatan kualitas pada aspek prasarana, sarana, dan sumber daya manusia (SDM) pendukung. Ketersediaan perangkat monitoring yang andal dan selaras dengan perkembangan teknologi, serta peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, menjadi hal penting yang perlu terus diperhatikan ke depan agar Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

EFISIENSI

Dalam upaya melaksanakan serta memenuhi target kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh tetap mengedepankan prinsip efisiensi. Penerapan efisiensi tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pelaksana secara berkelanjutan, guna memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru terkait perkembangan teknologi serta perubahan regulasi. Selain itu, dari aspek pelaporan, pemanfaatan aplikasi Report On Line (ROL) Spektrum Frekuensi Nasional turut dioptimalkan,

sehingga data yang diperoleh dapat diolah secara maksimal dan dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat UPT maupun pusat.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 80%.

Tabel 6 Benchmark Capaian Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	80% Kab Kota	100%	125%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	80% Kab Kota	100%	125%

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan program sesuai perencanaan, masing-masing UPT menunjukkan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, serta memberikan peluang peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan telah menetapkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan strategis nasional.

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Penerapan nilai dasar BerAKHLAK turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja melalui sikap **Berorientasi Pelayanan**, yang diwujudkan dalam pelaksanaan monitoring SFR guna menjamin keandalan layanan komunikasi bagi masyarakat, dunia usaha, serta sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan di wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, nilai **Akuntabel** tercermin dalam pelaksanaan monitoring dan pelaporan berbasis aplikasi, Kompeten dalam pengoperasian sarana SMFR serta penegakan sanksi, serta **Kolaboratif** melalui koordinasi antara petugas dan instansi terkait. Konsistensi dalam penerapan nilai-nilai tersebut mendorong percepatan proses kerja sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi.

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

LATAR BELAKANG

Indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat pemancar, termasuk microwave link, stasiun radio FM, dan stasiun televisi digital, beroperasi sesuai dengan ketentuan teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengukuran parameter teknis, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dapat menjamin tingkat kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio terhadap izin serta standar operasional yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan ini memiliki peran yang sangat strategis mengingat spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efisien, dan berkelanjutan guna mencegah terjadinya interferensi, penyalahgunaan, serta penurunan kualitas layanan komunikasi dan penyiaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Indikator ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi dan penyiaran yang membutuhkan konektivitas yang andal dan berkualitas. Selain itu, indikator ini juga mendukung operator atau penyelenggara telekomunikasi serta lembaga penyiaran dalam menjaga tingkat keandalan dan mutu layanan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Bagi instansi pemerintah, hasil pemeriksaan stasiun radio menjadi sumber data teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam perumusan serta evaluasi kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio. Sementara itu, bagi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio memastikan bahwa pengawasan spektrum frekuensi di wilayah Aceh dapat dilaksanakan secara tertib, aman, dan efektif, serta mendukung percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.



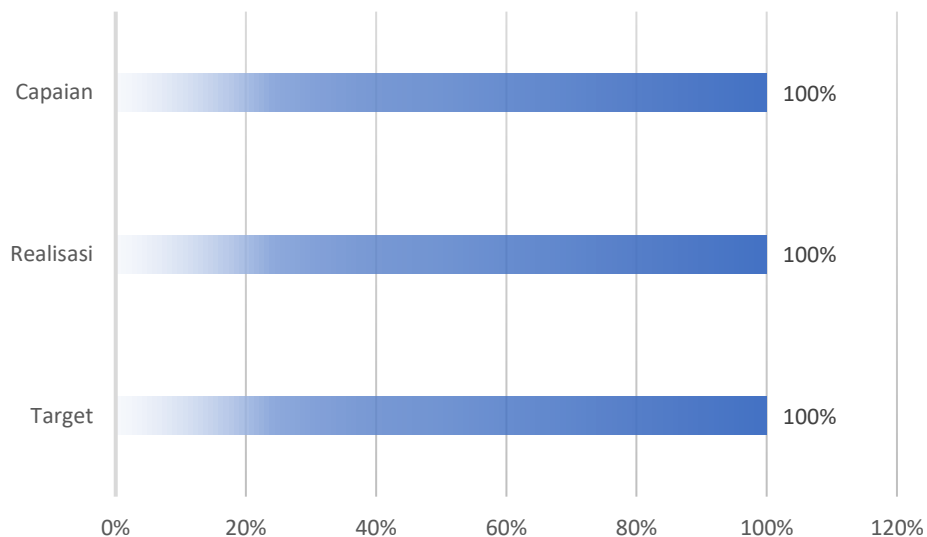
CAPAIAN

Sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, terdapat 4 (empat) kegiatan yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan stasiun radio yaitu:

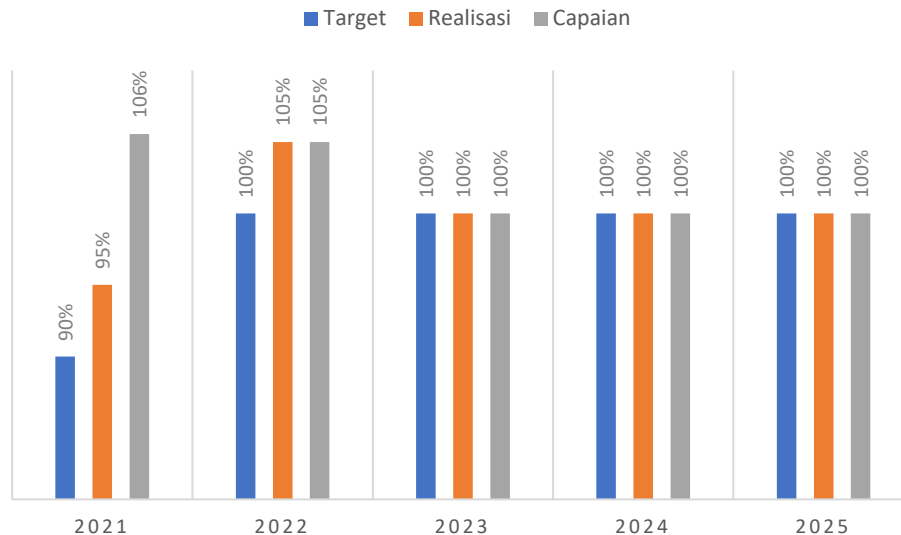
- Pemeriksaan Microwave link melalui Remote Site
- Pemeriksaan Microwave link melalui Open Shelter
- Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM
- Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio TV Digital

Untuk pemeriksaan microwave link melalui remote site, ditargetkan sekurang-kurangnya 80% dari target yang diberikan dan untuk pemeriksaan microwave link melalui open shelter ditargetkan sebesar 60% dari target yang diberikan. Adapun untuk pemancar stasiun Radio FM, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh ditargetkan sebanyak 50 (lima puluh) ISR. Selanjutnya untuk stasiun radio TV Digital ditargetkan sebanyak 20 (dua puluh) ISR.

Selama tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan stasiun radio microwave link, stasiun radio FM dan stasiun radio TV Digital. Dalam kegiatan tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil mencapai realisasi 100% dari target sebesar 100% yang ditetapkan.



Grafik 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025



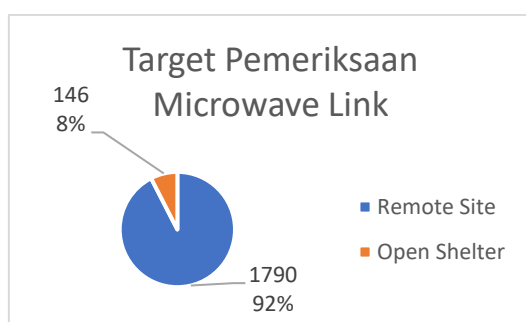
Grafik 4 Perbandingan Capaian IK-1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2021-2025

ANALISIS

Pemeriksaan Stasiun *Microwave Link*

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melaksanakan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) pengguna spektrum frekuensi radio untuk pengguna *microwave link*. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) adalah untuk :

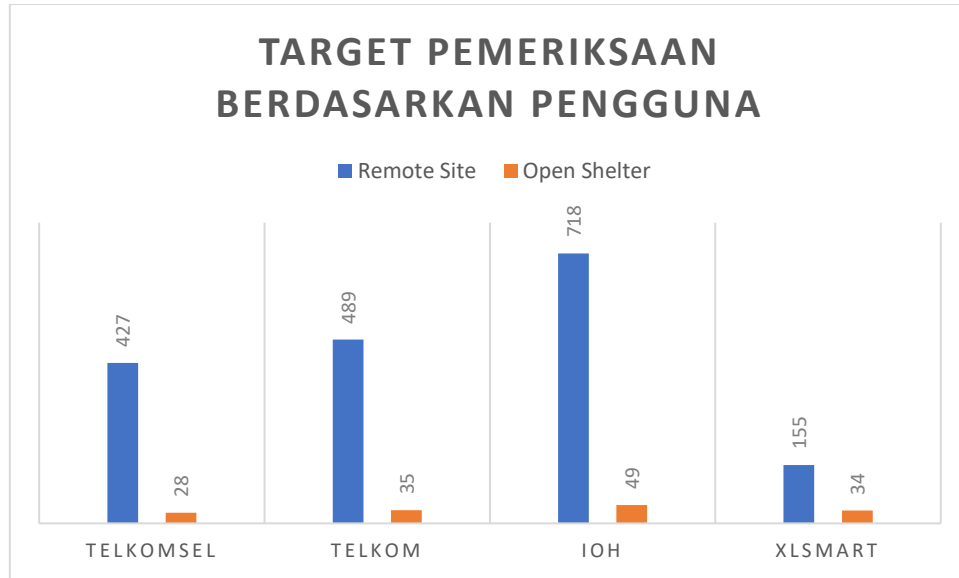
1. Memastikan validitas penggunaan spektrum frekuensi radio secara aktual sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki;
2. Mencegah terjadinya gangguan/interferensi *microwave link* akibat penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak berizin;
3. Meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio *microwave link*.



Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh mendapatkan target pemeriksaan pengguna *microwave link* sebanyak 80% remote site dan 60% open shelter. Dari total 2480 ISR, terdapat sebanyak 1790 ISR yang merupakan target pemeriksaan melalui remote site dan 146 ISR target pemeriksaan melalui open shelter. Grafik jumlah data target inspeksi *microwave link* dapat dilihat seperti pada gambar 3.8

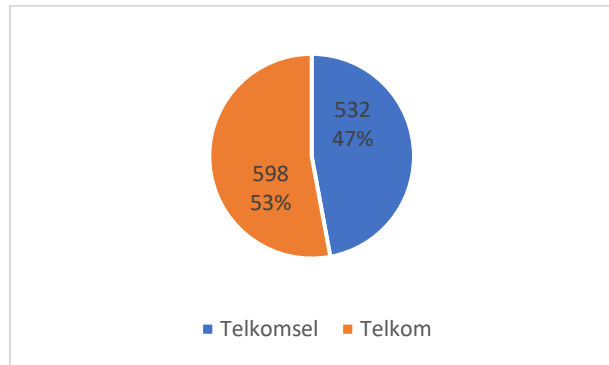
Grafik 5 Persentase Target Inspeksi

Data target yang diberikan tersebut merupakan keseluruhan data yang terdiri dari berbagai pengguna frekuensi *microwave link* dengan rincian seperti terlihat pada grafik berikut



Grafik 6 Data Target Pemeriksaan Berdasarkan Pengguna

Untuk mencapai target inspeksi dimaksud, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah memprogramkan berbagai kegiatan yang dituangkan dalam program kerja Tahun Anggaran 2025 seperti terlihat pada gambar 3.9 dan detail dari kegiatan terlihat pada tabel 3.2.



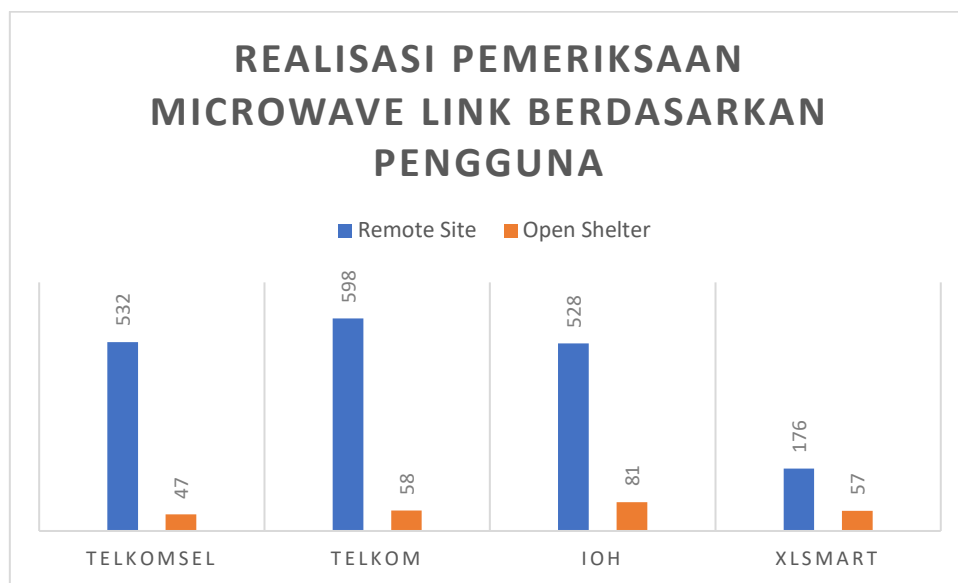
Grafik 7 Jumlah Kegiatan Inspeksi

Tabel 7 Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi

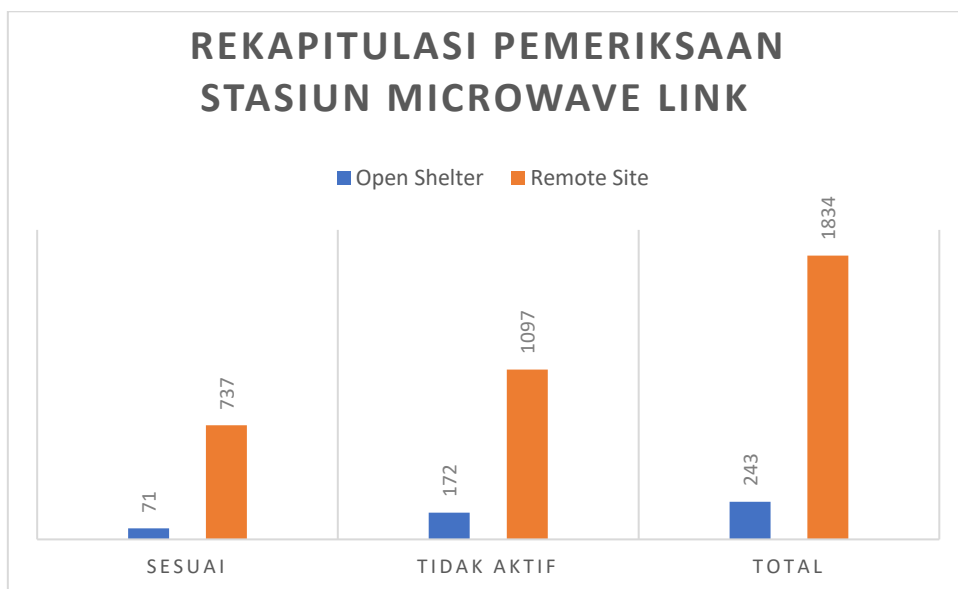
Tanggal Mulai Pelaksanaan	Tanggal Akhir Pelaksanaan	Kab/Kota	No. Surat Tugas	Jenis Pemeriksaan
21-04-2025	25-04-2025	Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar	284/Balai Monitor.11/KP.01.06/04/2025	Remote Site
28-07-2025	31-07-2025	Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar	622/Balai Monitor.11/KP.01.06/07/2025	Remote Site
09-09-2025	12-09-2025	Kab. Pidie dan Kab. Bireuen	785/Balai Monitor.11/KP.01.06/09/2025	Open Site
29-09-2025	02-10-2025	Kab. Pidie dan Kab. Bireuen	901/Balai Monitor.11/KP.01.06/09/2025	Open Site

30-09-2025	03-10-2025	Kab. Pidie dan Kab. Bireuen	902/Balai Monitor.11/KP.01.06/09/2025	Open Site
20-10-2025	25-10-2025	Kab. Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara	1006/Balai Monitor.11/KP.01.06/10/2025	Open Site
27-10-2025	01-11-2025	Kab. Aceh Tenggara	1033/Balai Monitor.11/KP.01.06/10/2025	Open Site

Dari total sebanyak 1935 data target inspeksi yang diberikan pada tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2077 ISR microwave link dengan rincian seperti pada grafik dibawah sebagai berikut:



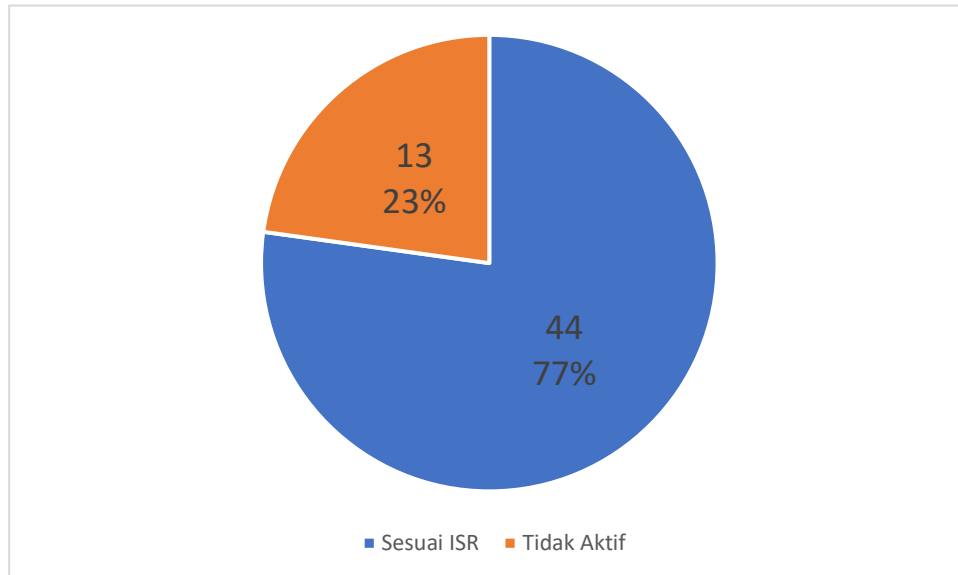
Grafik 8 Hasil Kegiatan Inspeksi (1)



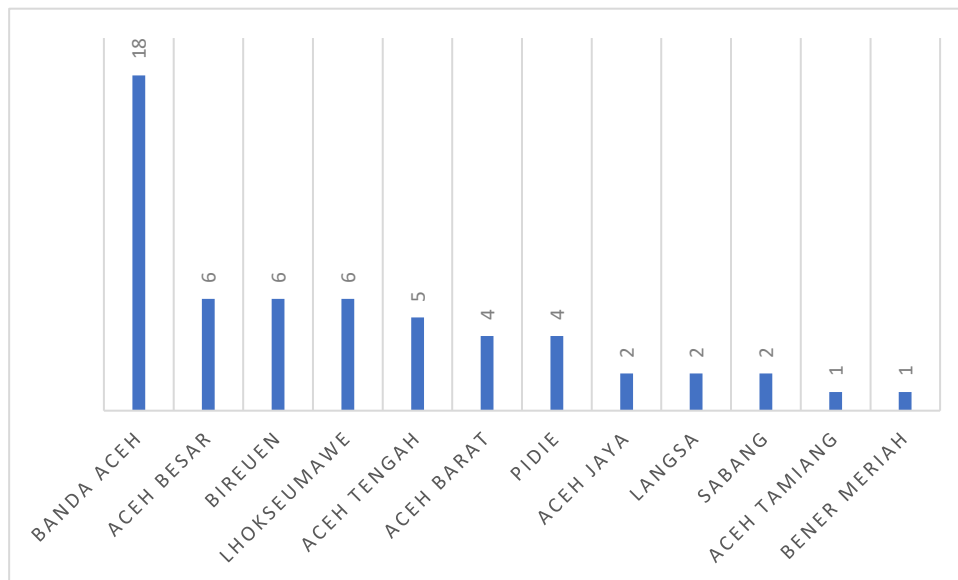
Grafik 9 Hasil Kegiatan Inspeksi (2)

Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar terhadap 57 (lima puluh tujuh) stasiun siaran radio FM. Berdasarkan hasil pengukuran, ditemukan 44 (empat puluh empat) radio siaran FM sesuai dengan ISR dan 13 (tiga belas) radio siaran FM dalam kondisi tidak aktif (off air).



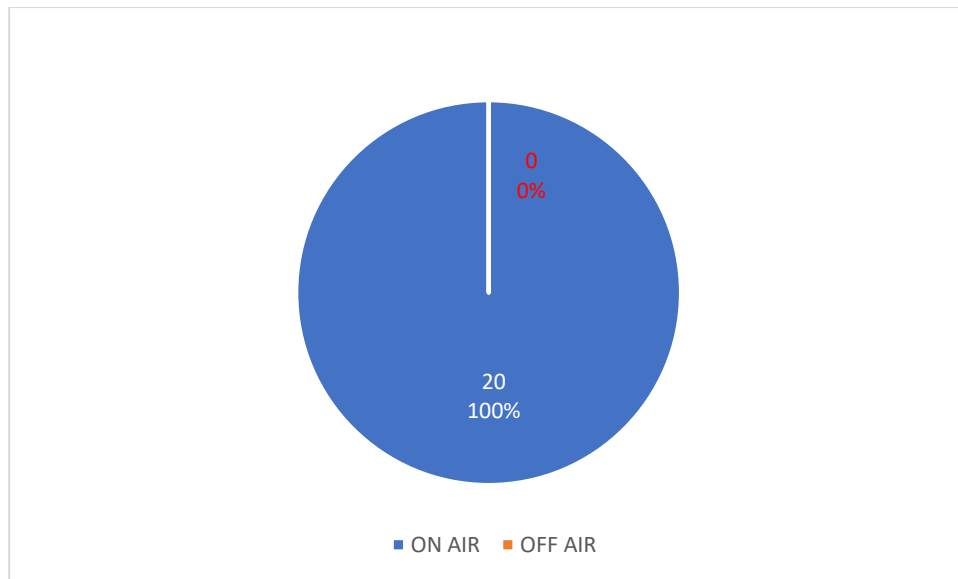
Grafik 10 Hasil pengukuran FM



Grafik 11 Sebaran Pengukuran Radio FM di Kabupaten/Kota

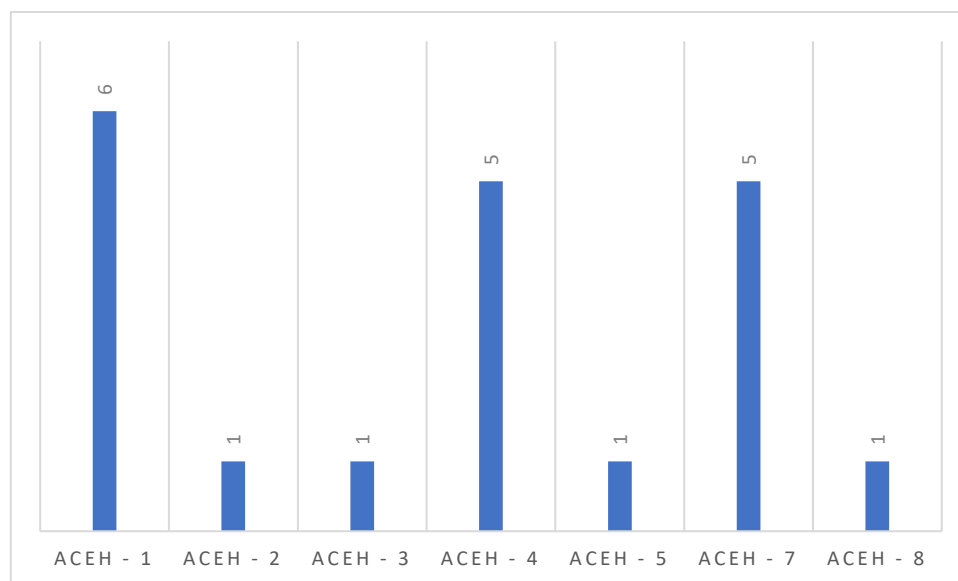
Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Televisi Digital

Pada tahun 2025, telah dilakukan pengukuran terhadap 20 (dua puluh) penyelenggara siaran TV Digital yang berada di wilayah Aceh. Gambar 3.10 menampilkan persentase stasiun siaran TV Digital yang On Air dan Off Air berdasarkan hasil pengukuran.



Grafik 12 Hasil pengukuran Multiplexer

Dari 20 (dua puluh) multiplexer (MUX) terdapat 20 (dua puluh enam) stasiun TV Digital On Air dan tidak ada stasiun TV Digital yang Off Air. Sebaran penyelenggara MUX di wilayah Layanan Aceh ditampilkan pada grafik berikut.



Grafik 13 Sebaran Penyelenggara MUX di wilayah layanan Aceh

DAMPAK

Pemeriksaan teknis terhadap stasiun radio, televisi digital, dan perangkat nirkabel merupakan instrumen vital dalam pengawasan spektrum frekuensi guna menjamin kepatuhan regulasi. Melalui inspeksi rutin, para penyelenggara siaran dan pengguna perangkat didorong untuk memenuhi standar teknis serta administratif yang berlaku. Langkah ini tidak hanya meminimalisir pelanggaran hukum, tetapi juga berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mencegah interferensi sinyal, sehingga kualitas komunikasi publik dan sektor industri tetap terjaga secara optimal.

TINDAK LANJUT

Seluruh hasil pemeriksaan dan pengukuran parameter teknis pada stasiun radio FM, microwave link, serta TV digital telah diselesaikan sepenuhnya. Langkah tindak lanjut yang diambil mencakup penerbitan surat administratif, pemberian sanksi, klarifikasi teknis, hingga penghentian operasional (off air) bagi pelanggar. Konsistensi dalam penyesuaian parameter dan modifikasi Izin Stasiun Radio (ISR) ini memastikan bahwa seluruh aktivitas penyiaran berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

REKOMENDASI

Guna mengoptimalkan performa di periode mendatang, diperlukan penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang spesifik serta pemeliharaan sarana monitoring secara berkala. Selain itu, penyempurnaan aspek perencanaan dan pengawasan menjadi hal yang esensial. Sinergi dengan pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) dan pemangku kepentingan lainnya juga harus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian temuan sekaligus memastikan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi.

Tabel 8 Benchmark capaian Pemeriksaan Stasiun Radio

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Aceh	100%	100%	100%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	100%	100%	100%

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan program sesuai perencanaan, masing-masing UPT menunjukkan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas

EFISIENSI

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio diterapkan melalui dua pendekatan utama: metode *open shelter* (kunjungan fisik ke lokasi) dan metode *remote site* (inspeksi jarak jauh). Masing-masing metode menawarkan nilai tambah yang berbeda; *remote site* menonjol dalam efisiensi waktu, tenaga, serta anggaran dengan kualitas yang tetap terjaga. Di sisi lain, metode *open shelter* memberikan keunggulan pada aspek transparansi, efektivitas operasional, dan kemampuan pengawasan secara langsung di lapangan.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

pemeriksaan stasiun radio di kabupaten/kota, serta memberikan peluang peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan telah menetapkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan strategis nasional.

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK yaitu **Berorientasi Pelayanan**, pemeriksaan stasiun radio dilaksanakan agar para pengguna frekuensi dapat menggunakan frekuensi secara nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Akuntabel**, pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya. **Harmonis**, kegiatan ini didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama. **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan. **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan. **Kolaboratif**, pada kegiatan ini dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Aceh maupun eksternal seperti koordinasi dengan instansi pusat, instansi daerah, dan stakeholder pengguna frekuensi radio.

Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

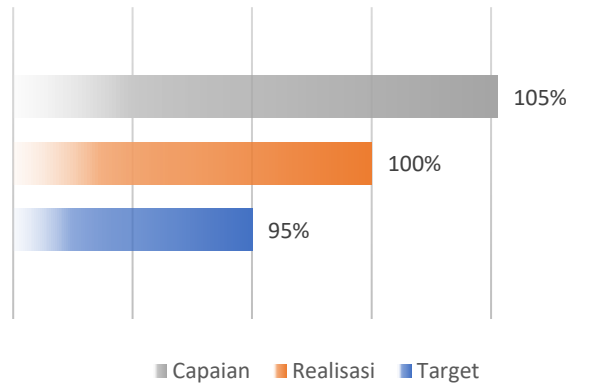
LATAR BELAKANG

Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan pertahanan keamanan, keselamatan, penerbangan, maritim, navigasi, radar cuaca, penyiaran, industri telekomunikasi, komunitas radio antar penduduk, serta komunikasi lainnya sangat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat. Dalam dunia telekomunikasi, spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya alam terbatas yang dapat merambat ke berbagai arah tanpa mengenal batas wilayah sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio harus diatur agar sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak saling mengganggu baik dalam skala nasional maupun internasional.

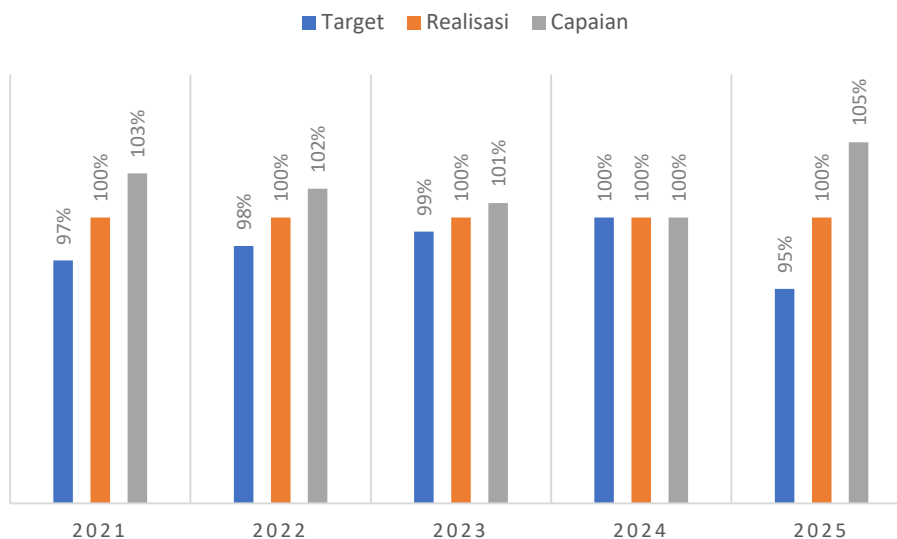


CAPAIAN

Target indikator kinerja untuk penanganan gangguan frekuensi radio pada tahun 2025 adalah sebesar 95% gangguan tertangani. Selama tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh mampu mencapai realisasi 100% laporan gangguan spektrum frekuensi radio tertangani.



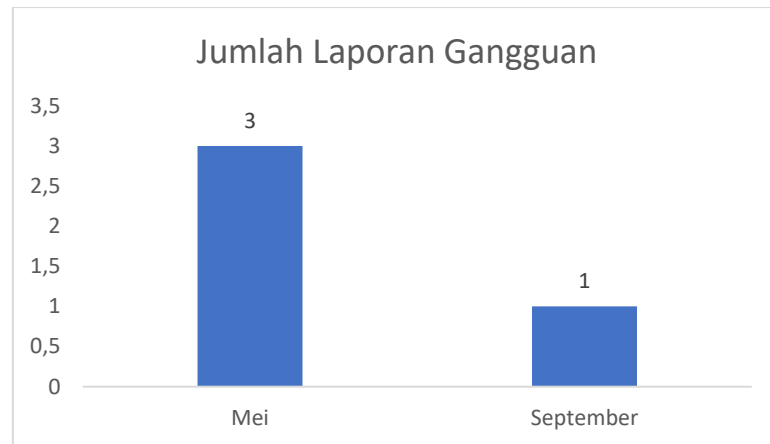
Grafik 14 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025



Grafik 15 Perbandingan Capaian IK-1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2021-2025

ANALISIS

Selama tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah menerima 4 (empat) pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio. Pengaduan gangguan spektrum frekuensi tersebut yaitu gangguan frekuensi microwave link, gangguan radar radiosonde, gangguan televisi digital, dan gangguan frekuensi seluler. Dari semua pengaduan gangguan frekuensi radio yang masuk, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dapat menyelesaikan semua pengaduan atau 100% pengaduan dapat terselesaikan sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 101,01%.



Grafik 16 Penanganan Gangguan



Gambar 4 Wilayah Penanganan Gangguan

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil menangani semua aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang masuk kedalam *e-ticket* pengaduan gangguan dimana capaian realisasi melebihi target indikator kinerja dengan persentase capaian sebesar 100%

DAMPAK

Keberlanjutan capaian kinerja ini memberikan kontribusi nyata terhadap reliabilitas dan kesinambungan layanan komunikasi di wilayah Aceh. Melalui penyelesaian seluruh aduan gangguan secara responsif, kualitas telekomunikasi bagi pemegang izin meningkat, yang pada gilirannya mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, layanan publik, serta dinamika ekonomi. Stabilitas spektrum frekuensi yang bebas gangguan menjadi pilar penting bagi sektor strategis seperti transportasi, pariwisata, dan layanan darurat.



TINDAK LANJUT

Stabilitas kinerja yang konsisten menjadi pijakan strategis bagi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dalam menetapkan langkah tindak lanjut pada tahun 2025. Melalui penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan gangguan, peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan, serta optimalisasi perangkat monitoring, efektivitas operasional meningkat signifikan.

REKOMENDASI

Untuk menjaga performa di tahun mendatang, diperlukan penguatan pada sistem pelaporan serta tata kelola aduan gangguan. Langkah ini juga perlu disertai dengan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis yang relevan serta modernisasi dan pemeliharaan alat monitoring secara berkala. Selain itu, sinergi dengan pemegang izin dan instansi terkait harus dipererat guna mempercepat penanganan kendala di lapangan. Seluruh upaya ini perlu didukung dengan evaluasi rutin terhadap SOP agar proses penanganan

gangguan frekuensi radio menjadi lebih responsif, akurat, dan efisien.

EFISIENSI

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai dengan mensinergikan teknologi monitoring, keahlian SDM, dan respons cepat terhadap gangguan frekuensi. Melalui standarisasi prosedur kerja (SOP), proses penanganan menjadi lebih akurat dan minim risiko pemborosan tenaga maupun waktu. Hal ini memastikan setiap kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas hasil sesuai ketentuan

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 9 Benchmark capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	95%	100%	105,26%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	95%	100%	105,26%

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan program sesuai perencanaan, masing-masing UPT menunjukkan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, serta memberikan peluang peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan telah menetapkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan strategis nasional.

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK yaitu **Berorientasi Pelayanan**, layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang merupakan layanan publik, wajib memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Masyarakat. **Akuntabel**, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya. **Harmonis**, kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif. **Loyal**, selalu siap 24 jam dalam menerima aduan gangguan yang terjadi dari masyarakat dan segera memberikan respon penanganan gangguan meskipun sumber gangguan berada di wilayah yang sulit dijangkau dan butuh waktu yang tidak sebentar dalam proses penanganannya hingga gangguan spektrum frekuensi tersebut dapat teratasi dengan tuntas. **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan. **Kolaboratif**, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menyelesaikan permasalahan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio khususnya pada dinas maritim dan penerbangan, tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait tentunya permasalahan penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio akan sangat sulit diselesaikan.

Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

LATAR BELAKANG

Indikator kinerja monitoring perangkat telekomunikasi bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh alat yang diproduksi, dirakit, maupun diperdagangkan di wilayah Provinsi Aceh telah memenuhi standar sertifikasi dan regulasi teknis. Saat ini potensi masuknya perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan selalu ada. Maka dari itu, diperlukan pengawasan yang sistematis dan kontinu guna memitigasi gangguan spektrum frekuensi serta menjaga keandalan kualitas layanan bagi masyarakat.

Indikator ini memberikan manfaat strategis bagi berbagai pihak. Masyarakat selaku pengguna akhir mendapatkan jaminan atas keamanan perangkat dan kualitas layanan komunikasi yang lebih andal. Di sisi lain, penyelenggara telekomunikasi memperoleh proteksi dari risiko interferensi spektrum serta penggunaan perangkat ilegal, yang menjamin stabilitas operasional jangka panjang. Bagi Pemerintah, pengawasan ini memperkuat ketertiban regulasi

perangkat di Provinsi Aceh, sehingga mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang lebih efektif dan terorganisir.



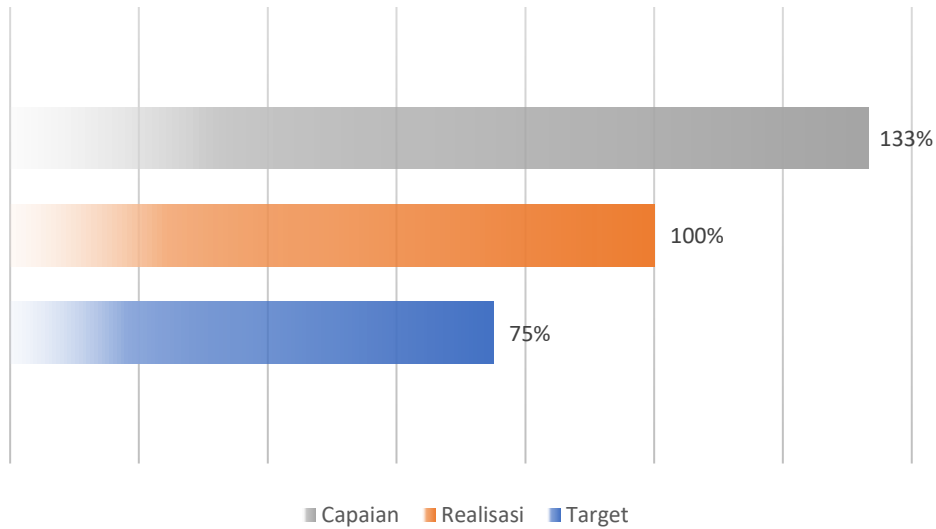
CAPAIAN

Terdapat 16 (enam belas) jenis alat/perangkat telekomunikasi prioritas yang perlu dilakukan monitoring yaitu:

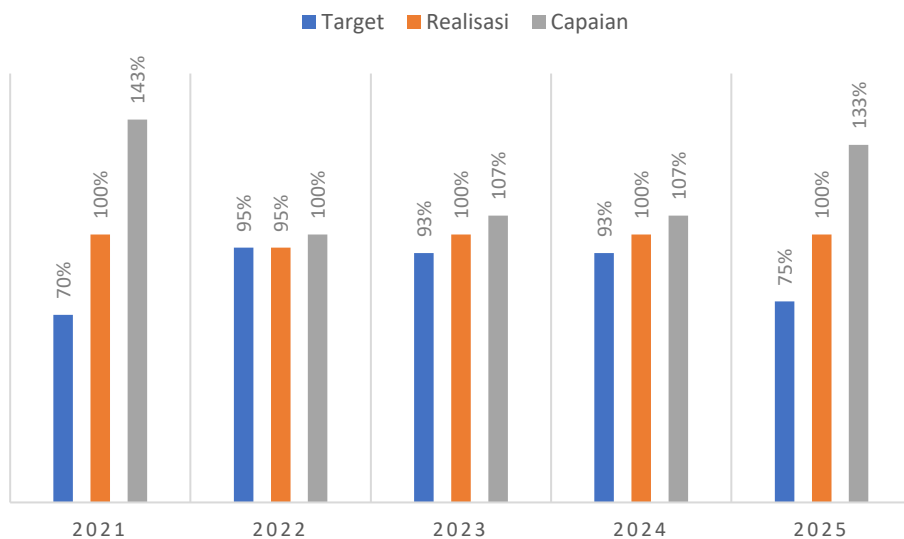
- HF All Band Transceiver
- Mobile Transceiver/Radio Rig
- Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)
- Pemancar FM
- Simbox/Modempool
- Fake BTS/IMSI Catcher
- Repeater/Penguat Sinyal Seluler Jammer
- GPS Tracker
- Microwavelink (IDU/ODU)
- Handy Talkie (HT)
- Radio POC
- Set Top Box Perangkat
- Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch)
- Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT)
- Alat Telekomunikasi Rakitan

Monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap jenis perangkat dengan prioritas yang ditetapkan pada target. Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Pedoman Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi. Jumlah kegiatan monitoring APT ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh) kali pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun dengan target jumlah perangkat yang dimonitor sebanyak 300 (tiga ratus) perangkat.

Pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh mampu mencapai realisasi sebesar 100%.



Grafik 17 Capaian IK-1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital



Grafik 18 Perbandingan Capaian IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2021-2025

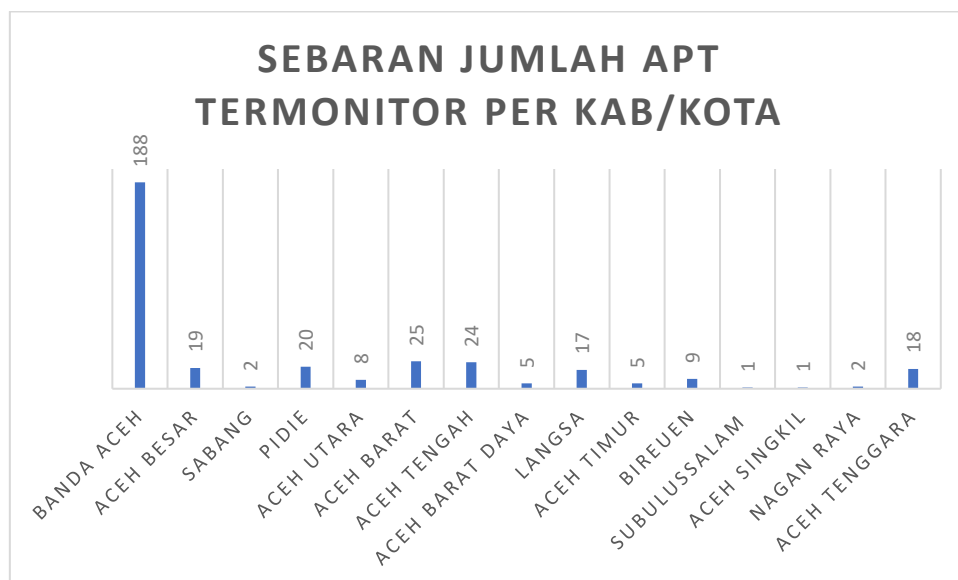
ANALISIS

Pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan monitoring APT sebanyak 15 (lima belas) di kab/kota sebagaimana terdapat pada Gambar berikut:

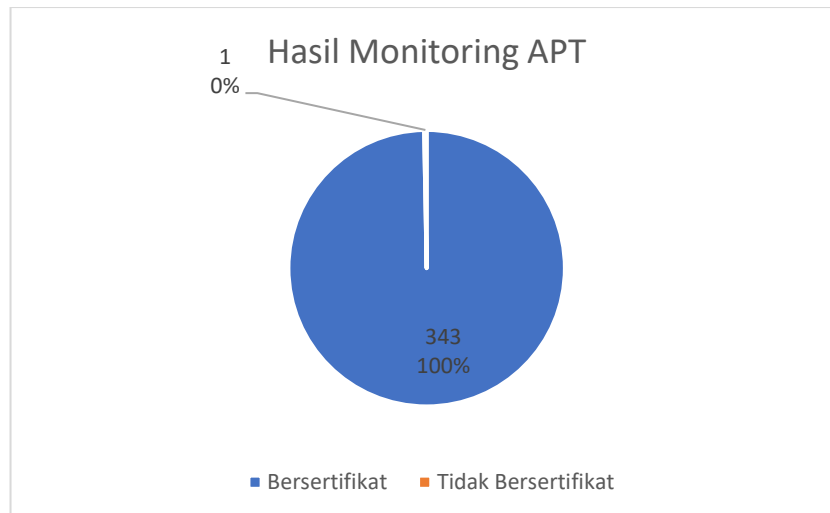


Gambar 5 Kegiatan monitoring perangkat

Selama tahun 2025, telah dilakukan monitoring terhadap 344 (tiga ratus empat puluh empat) alat/perangkat telekomunikasi (APT). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) perangkat bersertifikat dan 1 (satu) perangkat tidak bersertifikat.



Grafik 19 Sebaran jumlah APT yang dimonitor per Kab/Kota



Grafik 20 Hasil Monitoring APT

DAMPAK

Implementasi indikator ini membuahkan hasil yang signifikan dengan realisasi 100% dan capaian kinerja mencapai **133%** dari target awal. Angka tersebut mencerminkan peningkatan efektivitas monitoring perangkat telekomunikasi yang dijalankan secara konsisten dan terukur. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap standar sertifikasi, tetapi juga mengukuhkan peran Balai Monitor SFR Kelas II Aceh dalam menjamin ketertiban, keamanan, serta reliabilitas penggunaan perangkat komunikasi di seluruh wilayah Aceh.

TINDAK LANJUT

Sebelumnya, pengawasan perangkat terakomodasi dalam indikator Penertiban SFR dan APT. Namun, mulai tahun 2025, dilakukan transformasi melalui penetapan indikator baru yang lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan standar teknis dan legalitas secara spesifik. Peralihan ini dibarengi dengan penyusunan mekanisme monitoring yang lebih tajam, penentuan prioritas jenis perangkat, serta penguatan prosedur tindak lanjut pelanggaran. Langkah strategis ini diambil guna menjamin

pelaksanaan fungsi pengawasan telekomunikasi yang lebih sistematis, akuntabel, dan tepat sasaran.

REKOMENDASI

Guna memacu performa di periode mendatang, diperlukan langkah strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia serta modernisasi perangkat prioritas agar relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan data hasil monitoring dan peningkatan koordinasi lintas sektoral menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

EFISIENSI

Efisiensi dalam monitoring perangkat dicapai dengan menyelaraskan perencanaan kegiatan dan integrasi data sarana pendukung. Dengan skala prioritas dan penjadwalan yang tepat, target kinerja dapat terpenuhi secara maksimal meskipun menggunakan sumber daya, anggaran, dan waktu yang terbatas. Hal ini membuktikan bahwa manajemen operasional yang efektif mampu menjaga kualitas pengawasan tetap tinggi.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 10 Benchmark capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Aceh	75%	100%	133,33%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	75%	112,33%	149,77%

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan program sesuai perencanaan, masing-masing UPT menunjukkan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan stasiun radio di kabupaten/kota, serta memberikan peluang peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan telah menetapkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan strategis nasional.

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini: **Berorientasi Pelayanan**, pemeriksaan stasiun radio dilaksanakan agar para pengguna frekuensi dapat menggunakan frekuensi secara nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Akuntabel**, pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya. **Harmonis**, kegiatan ini didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama. **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan. **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan. **Kolaboratif**, pada kegiatan ini dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Aceh maupun eksternal seperti koordinasi dengan instansi pusat, instansi daerah, dan stakeholder pengguna frekuensi radio.

Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

LATAR BELAKANG

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh memiliki sasaran kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/pengukuran sebesar 85%. Tujuan sasaran kinerja ini untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat monitoring/pengukuran dapat berfungsi dengan baik dan terawat. Secara sistem, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh memiliki 3 jenis Perangkat SMFR dan alat monitoring yaitu perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio transportable, perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio bergerak dan perangkat monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio portable, Yang terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung.

Pengukuran indikator ini didasarkan pada pemenuhan standar layanan (Service Level Agreement/SLA) yang mencerminkan kemampuan stasiun monitor dalam menyampaikan data monitoring serta kondisi teknis perangkat pendukung operasional. Capaian indikator memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, dan pemerintah daerah melalui terjaminnya kualitas layanan komunikasi yang tertib dan bebas gangguan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja UPT dalam menjaga efektivitas pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh.



CAPAIAN

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio (SMFR) transportable melalui sejumlah kegiatan inspeksi. Sepanjang tahun berjalan, kegiatan inspeksi site transportable telah terlaksana sebanyak 16 (enam belas) kali pada seluruh site atau stasiun monitor yang tersebar

di beberapa lokasi, antara lain Site Blang Bintang, Site Sabang, Site Nagan Raya, Site Lawe Sigala-Gala (Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara), dan Site Lhokseumawe.

Kegiatan inspeksi dan pemeliharaan perangkat SMFR transportable tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat dapat berfungsi dengan baik serta menjaga keandalan sistem. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya gangguan pada perangkat SMFR serta mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio secara optimal, lancar, dan real time.

Selama tahun 2025, telah dilakukan pemeliharaan terhadap 17 perangkat utama dan 5 perangkat pendukung SMFR. Hasilnya, Service Level Agreement (SLA) seluruh perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh mencapai 100%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan data kondisi perangkat monitoring, persentase rata-rata berfungsinya perangkat mencapai 100%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh juga sebesar 100%, atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa selama tahun 2025, perangkat pendukung yang dimiliki oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dalam kondisi baik dan terus dijaga pemeliharaannya dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 6 Timeline Kegiatan pemeliharaan Infrastruktur SMFR Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh

Tabel 11 Nilai Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tahun	Target PK	Nilai
2021	90%	100%
2022	95%	95%
2023	95%	100%
2024	95%	100%
2025	85%	100%

ANALISIS

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat utama dan pendukung, baik pada Site Transportable, Stasiun Bergerak, maupun perangkat portable. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan/perbaikan perangkat utama (FMU) pada Site Transportable Kota Sabang serta Site Transportable Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, dilakukan juga kalibrasi perangkat alat ukur/monitoring spektrum frekuensi radio portable, yaitu 1 (satu) unit Spectrum Analyzer (SPA) merek Keysight tipe N9950A dan 1 (satu) unit TV Analyzer merek Rover tipe HD Tab 9 Plus. Kegiatan kalibrasi ini dilaksanakan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang beralamat di Jalan Raya Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Di samping kegiatan pemeliharaan, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh juga telah melaksanakan relokasi Site Transportable Sabang serta relokasi Site Transportable Blang Bintang (Aceh Besar) ke Kota Lhokseumawe. Relokasi Site Sabang dilakukan dari lokasi awal di Kantor Pos Sabang (Jalan Perdagangan, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang) ke Guest House Bu Ade yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 46, Lingkungan Sutedjo, Sabang Kota Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Relokasi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh letak geografis site sebelumnya yang berada di dataran rendah serta terhalang oleh bukit, sehingga mengakibatkan hasil monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah Sabang dan sekitarnya menjadi kurang maksimal. Dengan adanya relokasi ini, diharapkan kinerja perangkat monitoring dapat meningkat dan menghasilkan cakupan serta kualitas pemantauan yang lebih optimal.

DAMPAK

Keberlangsungan operasional dan efektivitas fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketertiban serta kestabilan penggunaan spektrum frekuensi radio. Sebagai bagian integral dari Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, stasiun ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan frekuensi radio berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus mencegah terjadinya gangguan maupun penyalahgunaan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap berbagai sektor.



TINDAK LANJUT

Untuk menjaga konsistensi serta meningkatkan kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur, diperlukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang dilakukan secara berkesinambungan. Tindak lanjut terhadap setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk rencana aksi pemeliharaan maupun perbaikan perangkat, serta pengambilan kebijakan yang tepat guna mendukung optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengoperasian dan pemanfaatan stasiun monitor transportable pada tahun sebelumnya, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah berhasil menerapkan strategi optimalisasi perangkat Stasiun Monitor Transportable pada tahun 2025. Upaya ini bertujuan agar seluruh perangkat dapat berfungsi secara optimal dan efektif dalam menunjang kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, direkomendasikan percepatan perbaikan atau penggantian perangkat utama stasiun monitor yang mengalami gangguan melalui koordinasi dengan kantor pusat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kegiatan pemeliharaan preventif secara berkala serta peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan dalam penyampaian data monitoring. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keandalan serta keberlanjutan fungsi monitoring spektrum frekuensi radio (SFR).

EFISIENSI

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan stasiun monitor yang tersedia, pelaksanaan pemeliharaan preventif guna meminimalkan gangguan operasional, serta pemanfaatan sistem monitoring terintegrasi tanpa penambahan sarana dan prasarana baru. Langkah-langkah tersebut memungkinkan tercapainya kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.



BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 95%.

Tabel 12 Benchmark Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	85%	100%	117,65%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	85%	94%	110,59%

Dalam melaksanakan program kerja pemeliharaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio tahun 2025, Balai Monitor SFR Kls II Banda Aceh berupaya agar perangkat monitoring selalu siap sedia baik secara fungsi maupun kualitas yang diukur pada terjaganya operasional monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT. Ini terlihat pada indikator kinerja yang melebihi target dengan capaian sebesar 105.26%. Adapun target pada indikator kinerja ini untuk semua UPT Monitor di lingkungan Ditjen Infrastruktur Digital yaitu 85%. Di sisi lain, realisasi Balai Monitor SFR Kelas I Medan melebihi target yaitu sebesar 94% dengan capaian 110,59%. Ini menunjukkan masing-masing UPT dapat menjaga operasional dari stasiun monitor yang ada di wilayah kerjanya secara optimal dan berkesinambungan.



IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target persentase Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini yaitu: **Akuntabel**, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku; **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya; **Harmonis**, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, **Loyal**, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan Instansi; **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan; **Kolaboratif**, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menjaga perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi dikenakan sanksi administratif. Ketentuan ini diatur dalam:

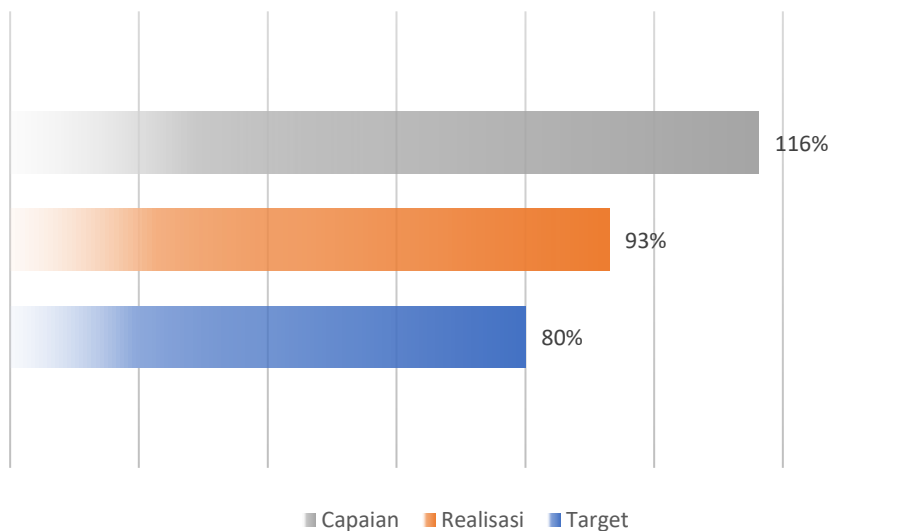
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi Dan Penyiaran
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika
- Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Juklak Penerimaan Tarif Atas Jenis PNBP Disektor Sumber Daya Dan Perangkat Telekomunikasi

Sanksi administratif yang diberikan berupa Teguran tertulis, Penghentian kegiatan, Denda administratif, Pencabutan izin dan/atau Paksaan pemerintah. Sanksi ini diberikan kepada pengguna frekuensi radio dan pengguna atau penjual APT yang melakukan pelanggaran.

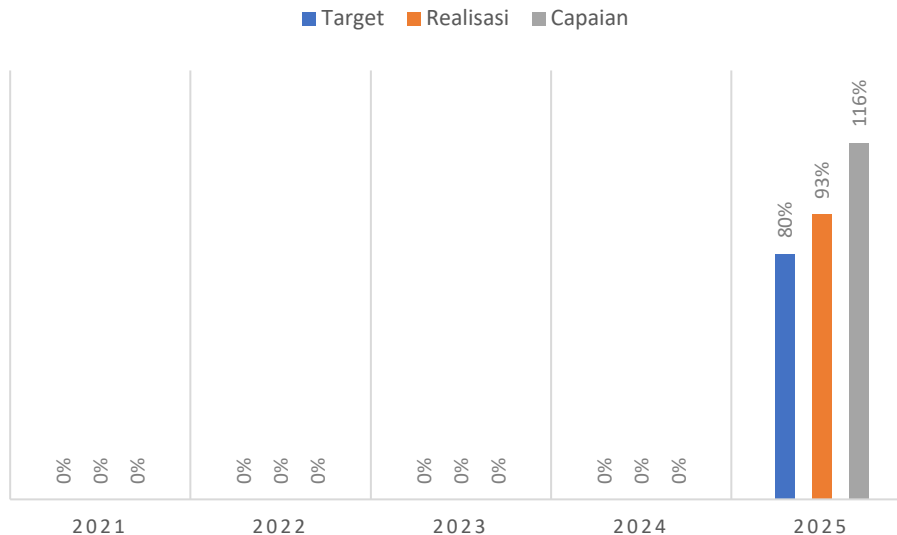


CAPAIAN

Capaian kinerja penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan kegiatan penertiban SFR dan APT yang dilakukan secara berkelanjutan. Penanganan sanksi diberikan terhadap pelanggaran Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan, dengan berpedoman pada SOP serta ketentuan Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 dan Perdirjen SDPPI Nomor 3 Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan. Untuk tahun 2025, dengan realisasi penyelesaian sebesar 93%, indikator ini melampaui target Perjanjian Kinerja sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 116%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas penegakan kepatuhan dalam pemanfaatan SFR serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh.



Grafik 21 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025

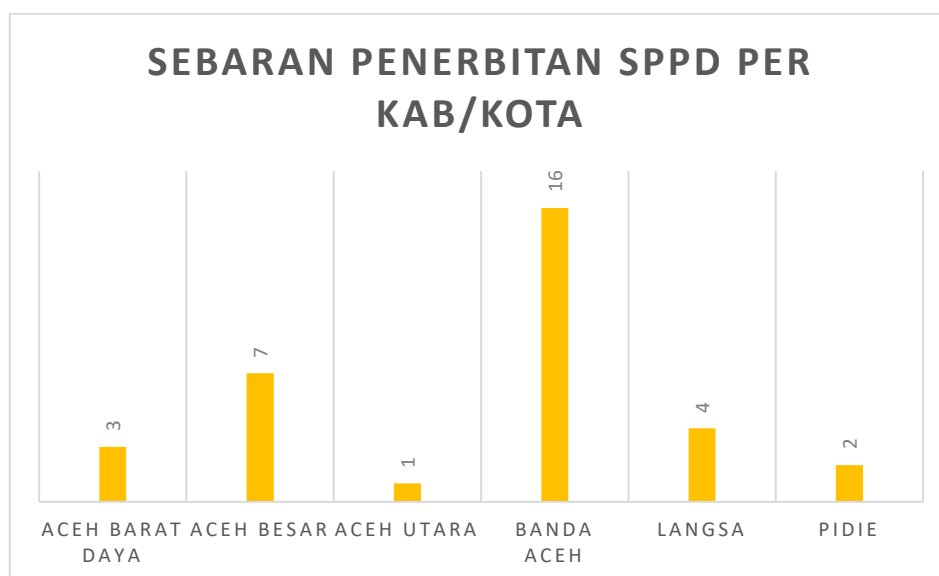


Grafik 22 Perbandingan Capaian IK-1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2021-2025

Indikator Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif merupakan indikator baru yang dimulai pada tahun 2025. Hal ini menyebabkan tidak ada data pembandingan persentase capaian pada tahun sebelum 2025.

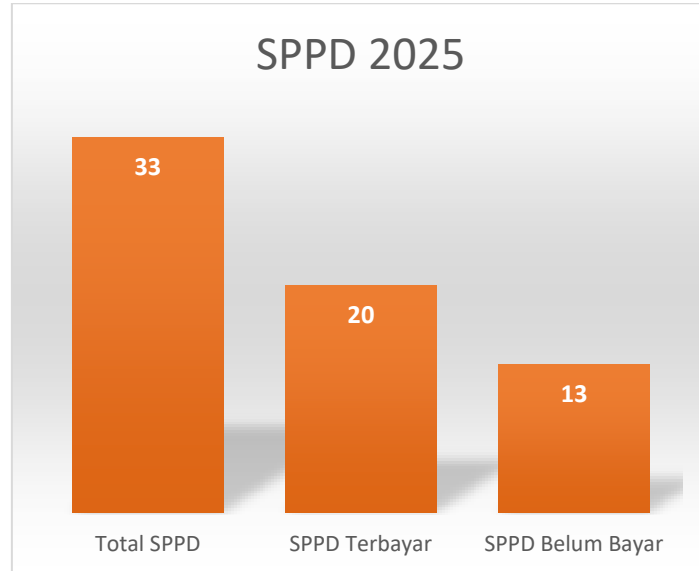
ANALISIS

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melakukan kegiatan penertiban penggunaan frekuensi radio dan APT di wilayah Aceh. Dalam kegiatan penertiban ini ditemukan adanya pelanggaran penggunaan frekuensi radio. Terhadap temuan pelanggaran tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah menerbitkan 33 (tiga puluh tiga) Surat Pemberitahuan Pengedaan Denda (SPPD). Rincian sebaran kabupaten/kota terhadap SPPD tersebut terdapat pada grafik berikut

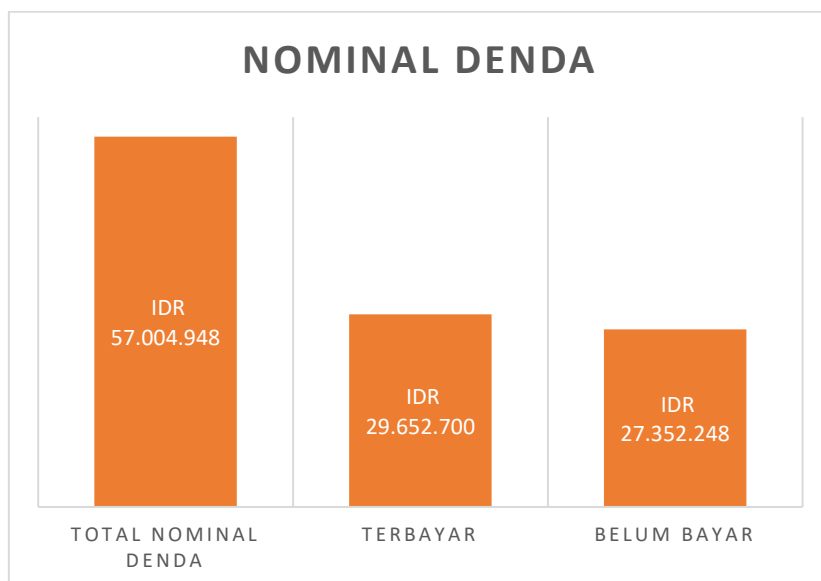


Grafik 23 Sebaran Penerbitan SPPD Kab/Kota

Total nominal denda yang diterbitkan untuk 33 (tiga puluh tiga) tersebut sebesar Rp. 57.004.948. Hingga akhir tahun 2025, telah diterima pembayaran untuk 20 (dua puluh) SPPD sebesar Rp. 29.652.700 sehingga terdapat 13 (tiga belas) SPPD yang belum terbayar dengan nominal sebesar Rp. 27.232.248.



Grafik 24 Klasifikasi SPPD pada Tahun 2025



Grafik 25 Nominal SPPD pada Tahun 2025

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa selama tahun 2025, penanganan sanksi denda administratif telah dilaksanakan dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan

DAMPAK

Mekanisme pembayaran sanksi denda administratif secara langsung di lokasi penertiban telah terbukti meningkatkan efektivitas penegakan regulasi di bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi. Dengan penyelesaian sanksi pada hari yang sama, persentase

penanganan denda mencapai 100%, baik secara kuantitas invoice maupun nilai nominalnya. Selain menjamin percepatan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), prosedur ini secara signifikan mendorong peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan para Wajib Bayar.

TINDAK LANJUT

Ke depannya, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh akan terus meningkatkan pengawalan status pembayaran sanksi denda administratif demi menjamin penegakan hukum yang akuntabel. Melalui pengawasan ketat terhadap implementasi SOP dan regulasi, UPT memastikan setiap proses administrasi denda dilakukan secara transparan. Evaluasi berkala juga menjadi prioritas untuk mengantisipasi tantangan di lapangan serta menjaga stabilitas capaian kinerja yang telah diraih.

REKOMENDASI

Rekomendasi peningkatan kinerja untuk tahun mendatang difokuskan pada penguatan pengawasan jatuh tempo invoice melalui sistem pengingat otomatis serta percepatan tindak lanjut sanksi bagi wajib bayar yang belum patuh. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas fungsi dan optimalisasi sistem informasi guna mendukung efektivitas penagihan. Evaluasi berkala terhadap mekanisme yang ada akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengguna frekuensi sekaligus meminimalisir potensi munculnya tunggakan di masa depan.

EFISIENSI

Penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan data monitoring yang tersedia sebagai landasan langsung untuk penerbitan sanksi tanpa prosedur pengulangan data. Hal ini didukung oleh integrasi sistem administrasi dan kolaborasi erat antara tim teknis pengawasan dengan bagian keuangan, yang memastikan seluruh tahapan penagihan hingga pemantauan pembayaran berjalan lebih cepat dan akurat.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai di atas target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 80%.

Tabel 13 Benchmark Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	80%	93%	116%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	80%	97,5%	121,88%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target sanksi denda administratif pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini: **Berorientasi Pelayanan**, penerapan sanksi denda administratif agar potensi gangguan frekuensi radio diminimalisis sehingga para pengguna frekuensi dapat menggunakan frekuensi secara nyaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Akuntabel**, pengenaan sanksi denda administratif dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya. **Harmonis**, kegiatan ini didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama. **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan. **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan. **Kolaboratif**, pada kegiatan ini dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Aceh maupun eksternal seperti koordinasi dengan instansi pusat, instansi daerah, dan stakeholder pengguna frekuensi radio.

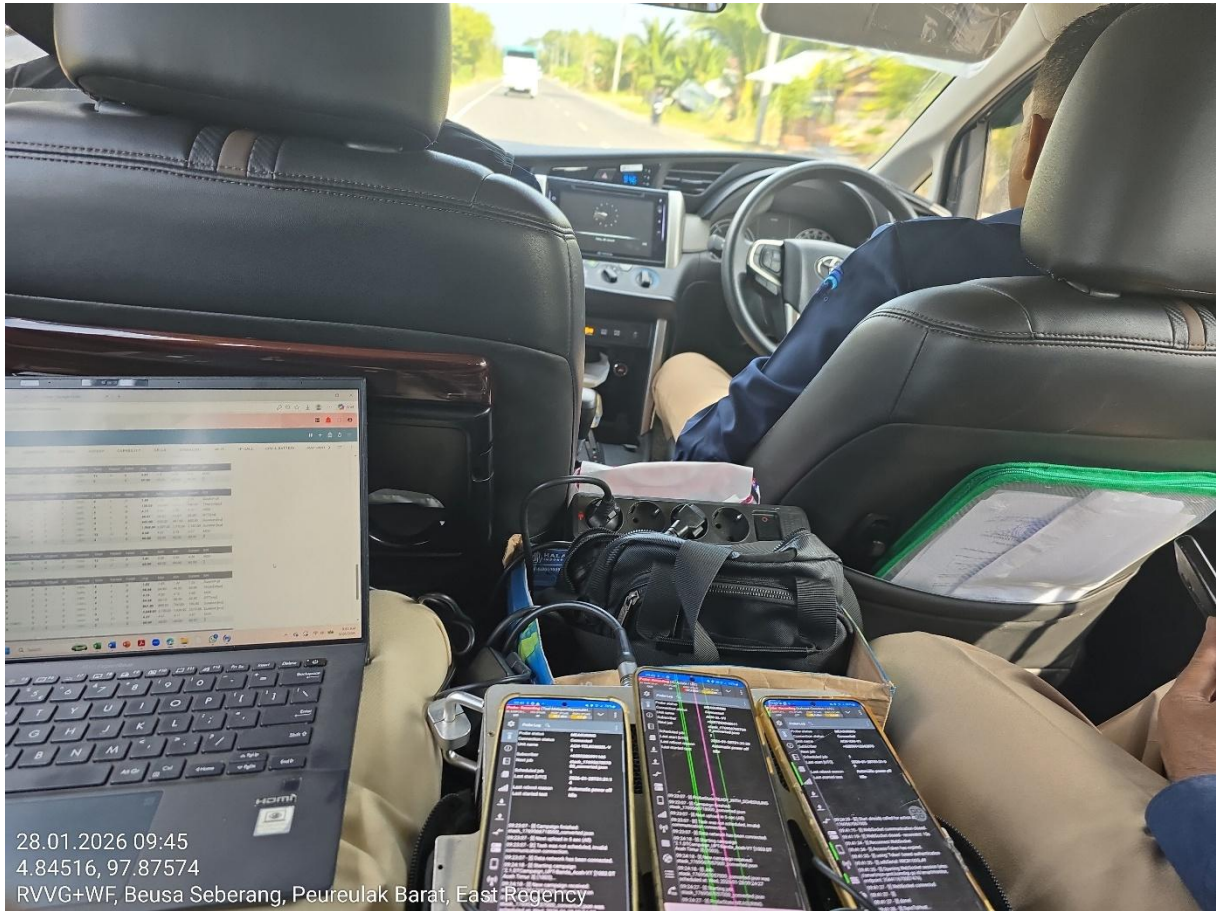
Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

LATAR BELAKANG

Indikator Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler dirancang untuk menjamin penyediaan basis data yang akurat dan terukur guna mendukung fungsi pengawasan, evaluasi, serta peningkatan standar layanan. Sebagai bagian dari penguatan pengawasan berbasis data, indikator ini resmi diimplementasikan secara terstruktur mulai tahun 2025.

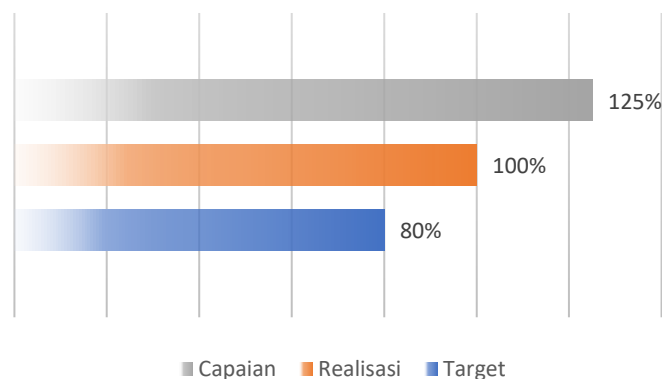
Mengingat karakteristik geografis Provinsi Aceh yang heterogen dan kebutuhan telekomunikasi yang terus tumbuh, ketersediaan data kualitas layanan yang andal menjadi sangat krusial untuk mengidentifikasi kesenjangan akses antarwilayah. Capaian indikator ini memberikan manfaat strategis: bagi pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan, bagi

operator untuk optimasi jaringan, serta bagi masyarakat dalam menikmati layanan komunikasi yang lebih berkualitas dan merata.

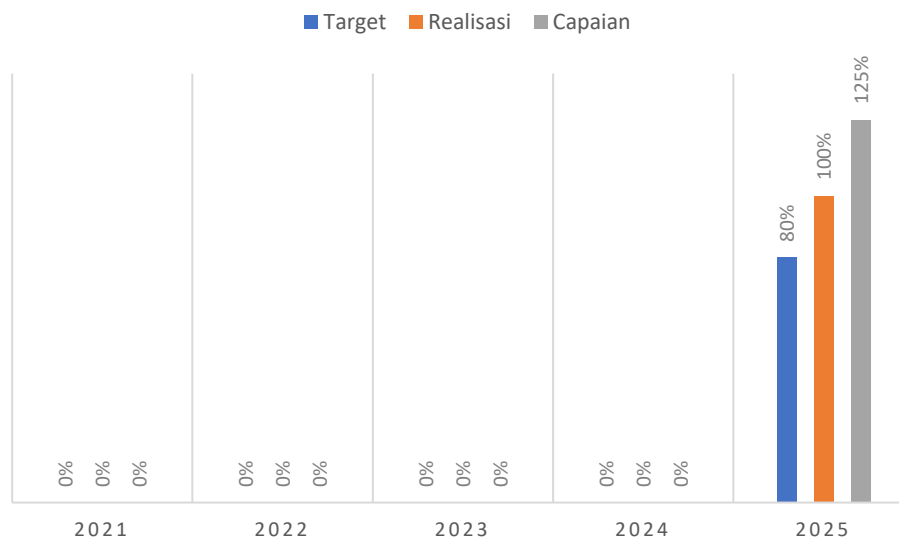


CAPAIAN

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh mendapatkan target melakukan pengukuran kualitas layanan di 80% kabupaten/kota yaitu 19 kabupaten/kota. Dalam realisasinya, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil melakukan pengukuran kualitas layanan di seluruh kabupaten/kota yaitu 23 kabupate/kota sehingga persentase capaian mencapai 125%.



Grafik 26 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler Tahun 2025



Grafik 27 Perbandingan Capaian IK-1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler Tahun 2021-2025

ANALISIS

Pengukuran kualitas layanan seluler dilakukan dengan menggunakan aplikasi R&S Smart Monitor terhadap operator seluler Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Kegiatan pengukuran ini mencakup drive test dan static test di wilayah Kota Sabang. Pengukuran drive test dilakukan pada jalan protokol dan rute lain sedangkan pengukuran static test dilakukan pada titik Point of Interest (POI) yang meliputi pusat keramaian, pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan pusat kesehatan. Dalam kegiatan drive test dan static test dilakukan pengukuran parameter teknis yang meliputi latensi (ping), speed test, web test, dan youtube test.

Selama tahun 2025, Balai Monitor SFR telah melakukan pengukuran kualitas layanan di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh (100%).



Gambar 7 Lokasi Pengukuran Kualitas Layanan Tahun 2025

DAMPAK

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan, dimulai dari penyediaan basis data hasil pengukuran (static test dan drive test) yang akurat dan akuntabel di wilayah Aceh. Data objektif ini berfungsi sebagai instrumen audit teknis yang krusial untuk mengevaluasi performa jaringan seluler serta membandingkan kondisi riil di lapangan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, kegiatan ini memperkuat fungsi pengawasan Balai Monitor SFR I Banda Aceh dalam memastikan kepatuhan penyelenggara telekomunikasi terhadap regulasi yang berlaku. Pada akhirnya, seluruh rangkaian evaluasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat dengan mendorong terciptanya konektivitas yang stabil serta meminimalisir gangguan teknis seperti drop call maupun blank spot.

TINDAK LANJUT

Hasil pengukuran kualitas layanan seluler yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan pengukuran kualitas layanan seluler yang disampaikan oleh seluruh UPT di wilayah Indonesia. Laporan ini selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan data kualitas layanan seluler secara keseluruhan di wilayah Indonesia untuk masing-masing operator seluler. Hasil analisis ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital terkait pemenuhan komitmen operator seluler dalam penyediaan layanan seluler di wilayah Indonesia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas layanan seluler yang telah dilakukan pada tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan yaitu:

- Mengingat masih terdapat beberapa titik yang masih blank spot, perlu dilakukan penambahan jumlah BTS sehingga ketersediaan layanan seluler semakin menjangkau seluruh masyarakat
- Perlu dilakukan pengukuran kualitas layanan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan kepada masyarakat.

EFISIENSI

Pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi melalui optimalisasi waktu, personel, dan anggaran. Perencanaan rute yang strategis serta pembagian tugas tim yang sistematis memastikan seluruh target wilayah terjangkau tanpa adanya pemborosan sumber daya. Selain itu, pemanfaatan perangkat teknis yang tersedia secara maksimal turut mendukung efektivitas operasional, sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat guna dan tetap menghasilkan data yang akurat.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 80%.

Tabel 14 Benchmark Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	80%	100%	125%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	80%	100%	125%

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan program sesuai perencanaan, masing-masing UPT menunjukkan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, serta memberikan peluang peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan telah menetapkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan strategis nasional.

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan pada tahun 2025 telah mengimplementasikan nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini: **Berorientasi Pelayanan**, melalui pengukuran kualitas layanan seluler dapat terlaksana pengawasan penyediaan layanan telekomunikasi seluler sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung perkembangan industri telekomunikasi. **Akuntabel**, pengukuran kualitas layanan seluler di kabupaten/kota dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. **Kompeten**, Kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya. **Harmonis**, kegiatan pengukuran kualitas layanan seluler di kabupaten/kota didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama. **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan. **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan. **Kolaboratif**, pada kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh maupun eksternal seperti koordinasi dengan instansi pusat, instansi daerah, dan stakeholder pengguna frekuensi radio.

Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS–IKRAN) dilaksanakan untuk menjamin kompetensi dan kepatuhan operator radio terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta mendukung tertib administrasi dan keselamatan komunikasi. Sertifikasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa operator radio amatir dan radio maritim memiliki kemampuan teknis yang memadai dan legalitas yang sah. Latar Belakang Provinsi Aceh sebagai wilayah yang rawan bencana membutuhkan ketersediaan operator radio yang kompeten guna mendukung komunikasi darurat dan keselamatan pelayaran. Penerima manfaat dari indikator kinerja ini meliputi pengguna radio amatir, pelaut dan awak kapal, organisasi radio, instansi pemerintah, serta masyarakat luas yang membutuhkan layanan komunikasi radio yang andal dan aman.

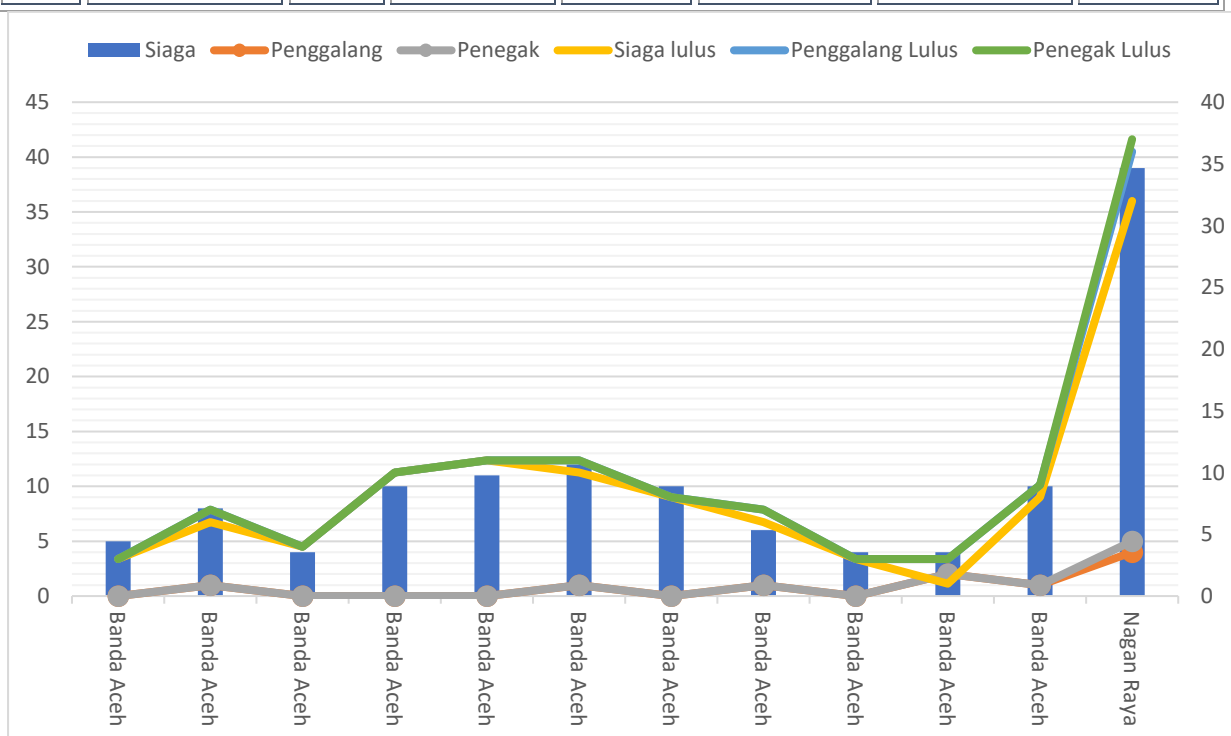
CAPAIAN

Pada tahun 2025 diprogramkan pelaksanaan UNAR Non Reguler sebanyak 1 kali yaitu pelaksanaannya pada tanggal 21 Desember 2025 di Simpang peut Kab. Nagan raya dengan jumlah peserta 44 orang, lulus 37 orang, tidak lulus 7 orang. Sedangkan untuk pelaksanaan UNAR Reguler sebanyak 11 kali di Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh sehingga pelaksanaan UNAR baik Reguler maupun Non Reguler berjumlah 12 kali pelaksanaan.

Tabel 15 Pelayanan Publik Terkait UNAR

No.	Tempat Pelaksanaan	Peserta UNAR					
		Jumlah Peserta Terverifikasi			Jumlah Kelulusan		
		Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak
1	Kota Banda Aceh	5	0	0	3	0	0
2	Kota Banda Aceh	8	1	0	6	1	0
3	Kota Banda Aceh	4	0	0	4	0	0
4	Kota Banda Aceh	10	0	0	10	0	0
5	Kota Banda Aceh	11	0	0	11	0	0
6	Kota Banda Aceh	12	1	0	10	1	0
7	Kota Banda Aceh	10	0	0	8	0	0
8	Kota Banda Aceh	6	1	0	6	1	0

9	Kota Banda Aceh	4	0	0	3	0	0
10	Kota Banda Aceh	4	2	0	1	2	0
11	Kota Banda Aceh	10	1	0	8	1	0
12	Nagan Raya	39	4	1	32	4	1
	Jumlah	124	10	1	100	10	1



Grafik 28 Pelayanan Publik Terkait UNAR

Jumlah target kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT (UNAR CAT) untuk tahun 2025 sebanyak 12 Kegiatan, sedangkan realisasi kegiatan sebanyak 11 Kegiatan untuk UNAR Reguler dan 1 kegiatan untuk UNAR Non Reguler. Target Peserta sebanyak 70 orang terealisasi sebanyak 135 orang.



Tabel 16 Nilai Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS–IKRAN) di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tahun	Target PK	Nilai
2021	100%	100%
2022	100%	1430%
2023	100%	100%
2024	100%	100%
2025	100%	100%

ANALISIS

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio antara lain didukung oleh adanya keterlibatan dan kerja sama yang baik dengan organisasi amatir radio lokal, khususnya dalam menjaring calon peserta UNAR serta memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Selain itu, inovasi dalam pelaksanaan UNAR Reguler melalui penjaringan peserta bekerja sama dengan perguruan tinggi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan capaian jumlah peserta.

Capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh yang mencapai 100% dari target peserta menunjukkan keberhasilan dalam menarik minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan UNAR.



DAMPAK

Capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh pada periode tahun 2021–2024 yang telah memenuhi bahkan melampaui target ditindaklanjuti melalui penyempurnaan perencanaan, penyesuaian target yang lebih realistis, serta penguatan kualitas pelaksanaan layanan pada

tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kinerja sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Konsistensi capaian kinerja tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan, terciptanya ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh.

TINDAK LANJUT

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan regulasi serta persyaratan perizinan stasiun radio layanan maritim. Selain itu, dilakukan pula pendekatan dan komunikasi yang intensif kepada para nelayan guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya penggunaan komunikasi radio yang baik dan benar, khususnya dalam mendukung keselamatan pelayaran.

Upaya tersebut ditindaklanjuti melalui pembukaan jenis izin baru berupa Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN), yang memungkinkan nelayan dengan perangkat all band untuk memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) dengan alokasi frekuensi khusus. Pemberian alokasi frekuensi khusus ini bertujuan untuk mencegah terjadinya interferensi dengan frekuensi lain, terutama frekuensi dinas penerbangan. Dengan kepemilikan ISR yang tertib, nelayan dapat berkomunikasi secara efektif dengan stasiun pantai, kapal lain, serta otoritas maritim, baik untuk keperluan operasional maupun dalam kondisi darurat.

Pelaksanaan kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) dan penerapan IKRAN turut mendukung pemantauan dan pengendalian spektrum frekuensi maritim yang lebih terstruktur. Pemberian izin secara langsung di lapangan juga mampu meminimalkan risiko penggunaan frekuensi ilegal maupun terjadinya interferensi, sehingga komunikasi radio dapat berlangsung secara stabil dan andal.

Melalui kemudahan proses perizinan serta ketersediaan sistem komunikasi yang memadai, nelayan dapat mengoptimalkan kegiatan operasional perikanan, mulai dari pemantauan kondisi cuaca, aktivitas ekonomi, hingga koordinasi logistik saat melaut. Program ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dengan otoritas kelautan serta komunitas nelayan dalam mewujudkan ekosistem komunikasi maritim yang tertib, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.



REKOMENDASI

Rekomendasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC mencakup beberapa hal yang relevan untuk peningkatan kegiatan di tahun berikutnya. Salah satunya adalah perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap materi pelatihan yang disampaikan, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman peserta, khususnya nelayan dan operator kapal.

Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap metode penyampaian materi agar lebih efektif dan mudah dipahami, mengingat latar belakang serta kemampuan peserta yang beragam. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan interaksi, perlu dilakukan penambahan alokasi waktu, terutama pada sesi praktik tata cara komunikasi marabahaya. Sesi praktik ini merupakan bagian inti dari pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN, dengan tujuan agar peserta memiliki pemahaman yang optimal, kompetensi yang memadai, serta mampu menerapkan komunikasi marabahaya secara baik dan benar.

EFISIENSI

Pelaksanaan indikator kinerja dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran secara efektif dan efisien, yang didukung oleh perencanaan yang matang, pemanfaatan sistem berbasis teknologi, dan pengaturan jadwal kegiatan yang terukur.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai target, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta tetap menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Terlihat pada tabel dibawah kedua UPT berhasil dari target yang diberikan yaitu 100%, yang mana Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil mencapai target sebesar 100 % dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan sebesar 100%. Perbedaan capaian ini mencerminkan keberagaman pendekatan dan kondisi operasional masing-masing unit kerja. Kedua capaian tersebut menunjukkan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas monitoring spektrum frekuensi radio dan layanan publik yang menyertainya, serta memberikan peluang untuk saling berbagi praktik baik guna meningkatkan kinerja pelayanan publik secara keseluruhan.

Tabel 17 Benchmark Capaian Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	100%	100%	100 %
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	100%	100%	100%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut: **Berorientasi Pelayanan**, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; **Akuntabel**, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku; **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya **Harmonis**, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif; **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat; **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan; **Kolaboratif**, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat sehingga dapat melakukan evaluasi dari survey yang telah dilaksanakan.

Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

LATAR BELAKANG

Pengelolaan dan penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio merupakan bagian penting dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya spektrum frekuensi radio. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Provinsi Aceh, baik untuk layanan telekomunikasi, penyiaran, maupun kebutuhan lainnya, potensi timbulnya piutang BHP frekuensi radio juga semakin besar apabila tidak dikelola secara tertib dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan indikator kinerja sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa upaya pencegahan, pengurangan, dan penyelesaian piutang dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi negara melalui pengamanan dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), capaian indikator ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

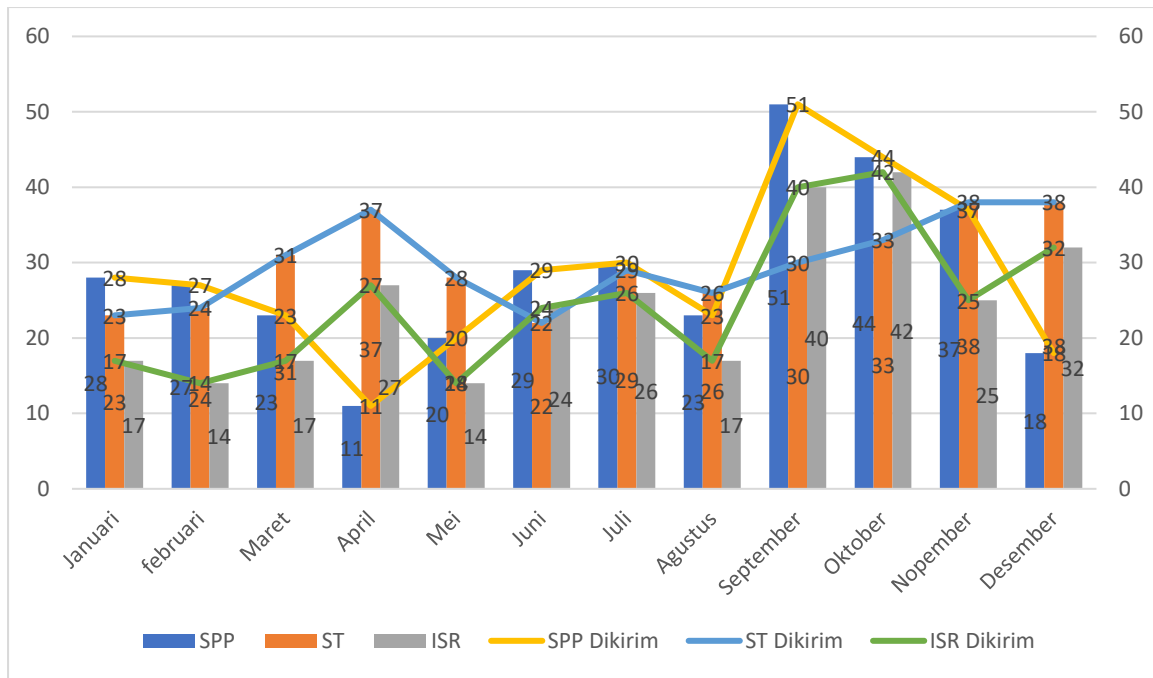
Bagi masyarakat, pengelolaan piutang yang tertib turut mendukung terselenggaranya layanan komunikasi yang stabil, teratur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Aceh.

CAPAIAN

Telah terealisasinya capaian kinerja dari Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 100% dalam kegiatan penanganan piutang dengan melaksanakan penyampaian dokumen SPP/Rincian tagihan kepada wajib bayar secara rutin dengan total Penanganan Piutang yang dilaksanakan sebanyak 341 SPP BHP Frekuensi Radio tahun 2025 yg ada di Provinsi Aceh dengan target 341 SPP BHP Frekuensi Radio. Berikut data Penyampaian dokumen SPP/Rincian Tagihan dan Surat Tagihan (ST) pada Tahun 2025:

Tabel 18 Pelayanan Publik Terkait Penanganan Piutang dan Pendampingan

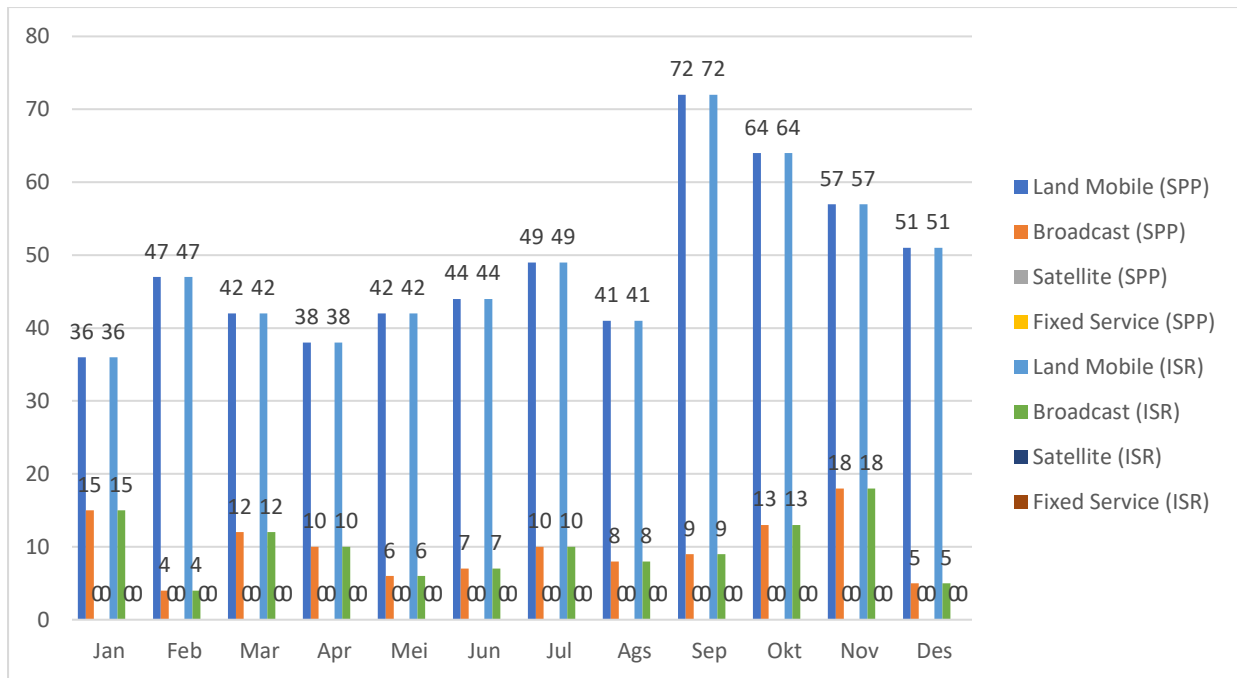
No	Bulan	Jumlah SPP, ST, ISR Yang Terbit (Billing ISR)			Jumlah SPP, ST dan ISR		
		SPP	ST	ISR	SPP	ST	ISR
1	Januari	28	23	17	28	23	17
2	Februari	27	24	14	27	24	14
3	Maret	23	31	17	23	31	17
4	April	11	37	27	11	37	27
5	Mei	20	28	14	20	28	14
6	Juni	29	22	24	29	22	24
7	Juli	30	29	26	30	29	26
8	Agustus	23	26	17	23	26	17
9	September	51	30	40	51	30	40
10	Oktober	44	33	42	44	33	42
11	November	37	38	25	37	38	25
12	Desember	18	38	32	18	38	32
TOTAL		341	359	295	341	378	295



Grafik 29 Pelayanan Publik Terkait Penanganan Piutang dan Pendampingan

Tabel 19 Tabel Wajib Bayar (WABA) berdasarkan Jenis Layanan

BULAN	SPP				ISR			
	Land Mobile	Broadcast	Satellite	Fixed Service	Land Mobile	Broadcast	Satellite	Fixed Service
Januari	36	15	0	0	36	15	0	0
Februari	47	4	0	0	47	4	0	0
Maret	42	12	0	0	42	12	0	0
April	38	10	0	0	38	10	0	0
Mei	42	6	0	0	42	6	0	0
Juni	44	7	0	0	44	7	0	0
Juli	49	10	0	0	49	10	0	0
Agustus	41	8	0	0	41	8	0	0
September	72	9	0	0	72	9	0	0
Oktober	64	13	0	0	64	13	0	0
November	57	18	0	0	57	18	0	0
Desember	51	5	0	0	51	5	0	0
TOTAL	583	359	0	0	583	359	0	0



Grafik 30 Rekapitulasi jumlah SPP dan ISR

Target Jumlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikirimkan dan ditangani tahun 2025 adalah 341 SPP dan pendampingan pelimpahan piutang ke KPKNL adalah 3 kegiatan. Realisasi jumlah WABA yang dihubungi terkait penanganan piutang di tahun 2025 sebanyak 97 WABA dan kegiatan pendampingan pelimpahan piutang ke KPKNL sebanyak 3 kegiatan.

Tabel 20 Nilai Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tahun	Target PK	Nilai
2021	100%	100%
2022	100%	100%
2023	100%	100%
2024	100%	100%
2025	100%	100%

ANALISIS

Berdasarkan tabel penyampaian/pendistribusian SPP dan ST UPT Banda Aceh, dapat dianalisis bahwa total SPP yang diterima sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 341 SPP BHP Frekuensi Radio. Persentase capaian distribusi setiap bulan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh SPP yang diterima dapat didistribusikan secara optimal tanpa adanya selisih.

Hal ini merupakan indikator positif terhadap efisiensi proses distribusi. Pola distribusi bulanan SPP dan ST juga relatif konsisten dengan variasi yang kecil, yang mengindikasikan bahwa jumlah pengguna, khususnya pada dinas bergerak darat, tidak terlalu besar. Selain itu, sebagian besar SPP dan ST masih didistribusikan secara terpusat berdasarkan alamat penagihan yang terdaftar dalam sistem.

Meskipun demikian, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh tetap menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan distribusi sepanjang tahun 2025. Selain itu, pada tahun yang sama juga telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO), yang telah dilaksanakan secara maksimal sebagai bagian dari upaya penertiban dan optimalisasi pengelolaan piutang negara.



DAMPAK

Dengan adanya sistem pemantauan yang terstruktur, penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Spektrum frekuensi radio merupakan aset negara yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab.

Penanganan piutang yang efektif akan memastikan bahwa penerimaan negara dari biaya penggunaan frekuensi tetap terjaga, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio.



TINDAK LANJUT

Bentuk pemanfaatan yang telah ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi jumlah piutang tertunda

Tindakan proaktif yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melalui pemantauan secara berkelanjutan terhadap perkembangan pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio terbukti mampu mengurangi jumlah piutang yang tertunggak.

2. Efisiensi proses pembayaran

Pemanfaatan sistem pembayaran *host to host* melalui kerja sama antara Ditjen Infrastruktur Digital dengan perbankan telah meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan dan pemantauan piutang SPP BHP. Hal ini dikarenakan laporan pembayaran dapat terintegrasi secara langsung ke dalam sistem informasi pembayaran Ditjen Infrastruktur Digital.

3. Peningkatan kepatuhan debitur

Melalui kegiatan monitoring dan penanganan piutang yang dilakukan secara konsisten, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu.

REKOMENDASI

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, khususnya pada bagian pelayanan perizinan, melakukan analisis mendalam terhadap kendala dalam proses distribusi SPP BHP Frekuensi Radio dan Surat Tagihan (ST). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur distribusi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

Selain itu, dilakukan peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan klien guna memahami berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari proses pengiriman SPP BHP Frekuensi, penggunaan aplikasi e-billing ISR, hingga permasalahan terkait perubahan PIC klien yang berdampak pada kesulitan akses akun e-billing ISR. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pengguna frekuensi radio.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, dilakukan evaluasi terhadap strategi distribusi yang ada serta penyesuaian terhadap perubahan lingkungan kerja maupun kebijakan yang berlaku, sehingga strategi distribusi SPP BHP Frekuensi tetap relevan dan optimal.

Selain itu, dilakukan pula pengumpulan data secara lebih rinci serta analisis menyeluruh terhadap seluruh proses distribusi SPP BHP Frekuensi. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan pola tertentu yang memerlukan perhatian khusus, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan terarah.



EFISIENSI

Pemanfaatan sistem pembayaran host to host (H to H) melalui kerja sama Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan perbankan telah meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan dan pemantauan piutang SPP BHP. Hal ini dikarenakan laporan pembayaran dapat terintegrasi secara langsung ke dalam sistem informasi pembayaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Selain itu, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh bersama para pengguna layanan (klien) juga dimudahkan dalam melakukan pemantauan pembayaran melalui aplikasi Billing ISR yang telah berjalan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan aplikasi MySpectra juga turut mendukung kemudahan bagi klien maupun Balai Monitor dalam memantau proses penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR).

Di sisi lain, sistem pembayaran ini memberikan kemudahan bagi klien dalam meningkatkan efisiensi sumber daya manusia, karena proses pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui perangkat (gadget) maupun sarana perbankan yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Dengan demikian, proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan akurat.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik

terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 21 Benchmark Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	100%	100%	100%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	100%	100%	100%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target persentase penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut: **Berorientasi Pelayanan**, dengan memberikan fasilitas pelaksanaan ujian amatir radio bagi peminat frekuensi radio dengan baik sehingga dapat mendukung layanan spektrum frekuensi radio kepada Masyarakat; **Akuntabel**, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku; **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya.

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

LATAR BELAKANG

Indikator persentase pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, prosedur, dan standar pelayanan publik dapat dipahami serta diakses secara luas oleh masyarakat. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi difokuskan pada tema Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Era Digital serta Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi di Era Transformasi Digital. Tema ini diangkat sebagai respons terhadap meningkatnya pemanfaatan teknologi serta kebutuhan akan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi Provinsi Aceh yang mengalami perkembangan digital yang pesat, serta memiliki karakteristik wilayah yang beragam, menuntut adanya penguatan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, penyelenggara layanan

juga memperoleh dukungan dalam mewujudkan ekosistem telekomunikasi yang tertib, terkendali, dan berkelanjutan.

CAPAIAN

Indikator kinerja pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh UPT diukur berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan minimal sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta sekurang-kurangnya 30 orang, dengan target capaian sebesar 100%.

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Bimbingan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Amatir ini diikuti oleh calon amatir radio dan pegiat radio amatir yang merupakan peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di Kabupaten Nagan Raya, yang terdiri dari tingkat Siaga, Penggalang, dan Penegak. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, yaitu Pengendali Frekuensi Radio, serta praktisi radio amatir dari ORARI Daerah Aceh.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Subbagian Umum yang mewakili Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (rundown acara terlampir) dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta (daftar hadir terlampir). Adapun narasumber yang hadir berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Muhammad Fajar Fikri, S.Kom. dan Afi Barnaidi dari Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, serta Julizar (YC6BKO) dari ORARI Daerah Aceh.

Tabel 22 Nilai Sosialisasi Pelayanan Publik di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tahun	Target PK	Nilai
2021	80%	100%
2022	-	-
2023	100%	100%
2024	100%	100%
2025	100%	100%

ANALISIS

Sepanjang tahun 2025, kegiatan sosialisasi pelayanan publik terkait penggunaan spektrum frekuensi radio telah dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain penyampaian materi secara langsung melalui forum tatap muka, sosialisasi on the spot, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih luas.

Setiap sesi sosialisasi dirancang dengan target peserta yang beragam, mencakup berbagai sektor pengguna spektrum frekuensi radio, seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga penyiaran, hingga komunitas radio. Pendekatan ini bertujuan agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelompok peserta.

Selain itu, metode pelaksanaan sosialisasi juga disesuaikan dengan dinamika perkembangan regulasi dan teknologi di bidang spektrum frekuensi radio. Melalui pelaksanaan sosialisasi yang beragam ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, serta memahami konsekuensi yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian dalam penggunaan spektrum frekuensi radio.



DAMPAK

Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses terkait prosedur administrasi, mekanisme pengaduan, serta layanan teknis yang tersedia. Hal ini membantu pengguna frekuensi dalam mengakses layanan secara lebih mudah dan efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pengelola spektrum frekuensi radio.

Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memberikan kesempatan bagi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh untuk mengevaluasi kinerja layanan berdasarkan pengalaman pengguna. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan, peningkatan efisiensi, serta pengembangan inovasi layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat juga didorong untuk lebih proaktif dalam melaporkan gangguan frekuensi maupun penggunaan ilegal yang berpotensi menghambat komunikasi. Hal ini turut memperkuat sistem pengawasan serta mendukung efektivitas penindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio.

TINDAK LANJUT

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah mengembangkan layanan perizinan spektrum frekuensi radio berbasis daring yang menyediakan informasi mengenai alur dan prosedur layanan secara rinci dan jelas, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir, kegiatan sosialisasi dan publikasi layanan dilakukan secara rutin, berkala, serta segera setelah terdapat pembaruan kebijakan atau prosedur.

Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung (offline), media elektronik, maupun secara daring melalui platform media sosial resmi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi petugas layanan, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh juga secara aktif mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), Training of Trainer (ToT), serta seminar, sosialisasi, dan lokakarya yang relevan dengan pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh juga terus memperkuat kerja sama dengan mitra kerja dan pengguna layanan, serta secara responsif menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat.



REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan melalui pemetaan potensi peserta secara lebih komprehensif. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia juga perlu dilakukan melalui pembaruan pengetahuan teknis dan regulasi yang relevan.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, hingga pelaporan layanan sertifikasi juga menjadi langkah penting guna meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Di samping itu, koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelaksanaan, serta memastikan keberlanjutan penyelenggaraan layanan sertifikasi yang efektif dan efisien.

EFISIENSI

Sosialisasi pelayanan publik dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) guna meningkatkan jangkauan serta efisiensi penyampaian informasi. Mengingat luasnya wilayah Provinsi Aceh serta adanya kendala aksesibilitas di beberapa daerah, metode ini menjadi solusi yang efektif dalam menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Selain itu, pemanfaatan media elektronik, seperti radio dan televisi, juga diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan demikian, informasi terkait regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio dapat tersampaikan secara lebih optimal kepada masyarakat.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 23 Benchmark Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	100%	100%	100%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	100%	100%	100%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut: **Berorientasi Pelayanan**, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; **Akuntabel**, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku; **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya; **Harmonis**, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif; **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat; **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan; **Kolaboratif**, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan secara objektif.

Melalui pelaksanaan survei tersebut, instansi dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek layanan, meliputi prosedur, waktu penyelesaian, biaya, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, hingga perilaku pelayanan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat juga sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan kualitas layanan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja unit pelayanan secara berkelanjutan.

CAPAIAN

Survei Kepuasan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) dan mengacu pada pedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Pelaksanaan survei dilakukan minimal satu kali dalam setahun dengan jumlah responden sekurang-kurangnya 30 orang. Namun demikian, untuk memperoleh hasil yang lebih representatif, survei dilaksanakan secara triwulanan kepada para penerima layanan.

Survei ini mengukur sembilan unsur utama pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Hasil survei selanjutnya diolah dan dilaporkan sebagai dasar evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tabel 24 Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tahun	Target PK	Nilai
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	100%	100%



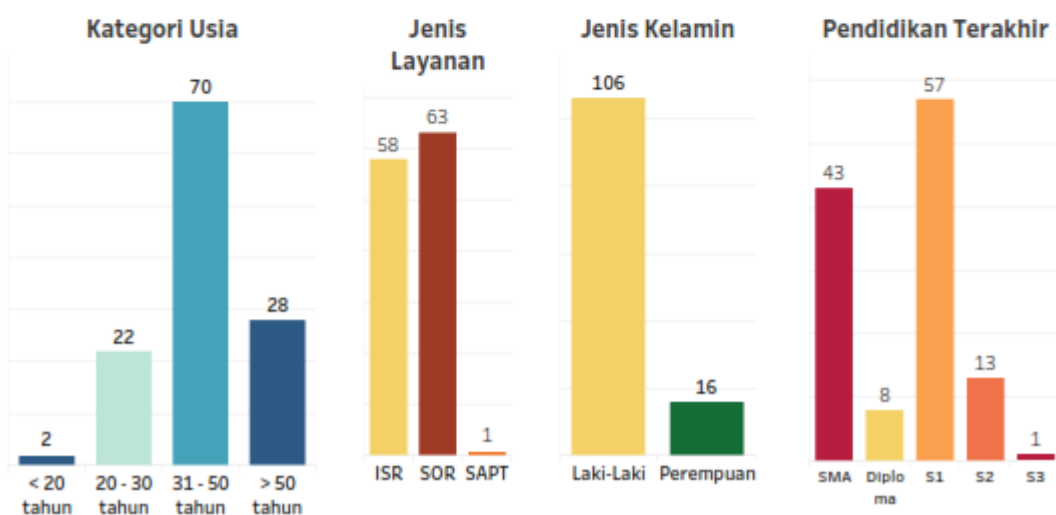
Adapun Survey terdapat 2 (dua) unsur yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan penilaian 3,2 skala 4 dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan penilaian 3,6 skala 4. Sesuai aturan hasil survey yang ditetapkan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital yaitu:

$$\text{Perhitungan capaian : Persentase (\%)} = \frac{\text{Hasil survei IKM/IPKP}}{3,2} \times 100\%$$

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan survey:

- a. Dari Triwulan I s.d Triwulan IV melalui link/website/langsung dan hasilnya sesuai Nota Dinas Direktur Operasi Sumber Daya sebagai berikut:
- Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,82 Skala 4
 - Hasil penilaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) : 3,84 Skala 4
 - Hasil penilaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IPAK) : 3,84 Skala 4
 - Hasil penilaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IPKP) : 3,82 Skala 4

HASIL SURVEY PELAYANAN PUBLIK -BALAI MONITOR SFR KELAS II ACEH		
IIPP	3.84	
IKM	3.82	
IIPK	3.84	
IPKP	3.82	
IIPP-IKM- Kategori		Indeks
IIPP	Diskriminasi Pelayanan	3.83
	Pelayanan Di Luar Prosedur	3.81
	Penerimaan Imbalan	3.85
	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.84
	Pungutan Liar (Pungli)	3.86
IKM	Biaya/tarif	3.79
	Kompetensi Pelaksana	3.88
	Penanganan Pengaduan, Saran dan M..	3.83
	Perilaku Pelaksana	3.88
	Persyaratan	3.83
	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.81
	Sarana dan Prasarana	3.82
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.81
	Waktu Penyelesaian	3.78



Gambar 8 Hasil Survey Pelayanan Publik pada Tahun 2025

ANALISIS

Berdasarkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) pada tabel, diperoleh nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh masing-masing sebesar 3,84 (Skala 4). Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah unsur Pungutan Liar (Pungli) dengan nilai indeks sebesar 3,86, sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah unsur Pelayanan di Luar Prosedur dengan nilai sebesar 3,81.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berada pada kategori Mutu Pelayanan A dengan kinerja yang tergolong SANGAT BAIK.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, khususnya pada unsur Pelayanan di Luar Prosedur, Diskriminasi Pelayanan

(3,83), dan Percaloan/Perantara Tidak Resmi (3,84) yang nilainya relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya.

Kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) yang dilaksanakan bersamaan dengan survei integritas menunjukkan nilai IKM sebesar 3,82 dan IPKP sebesar 3,82. Pelaksanaan survei dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.



DAMPAK

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) memiliki peran penting sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan, karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan yang diberikan.

Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi, serta meningkatkan profesionalisme aparatur. Bagi masyarakat, survei ini menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, bagi pemerintah, hasil survei dimanfaatkan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan serta penguatan reformasi birokrasi, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

TINDAK LANJUT

Dalam upaya peningkatan nilai IKM/IPKP, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Beberapa inovasi yang telah dikembangkan antara lain penyediaan layanan komunikasi melalui WhatsApp pelayanan (Wayan) dan media sosial Instagram, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi, konsultasi, pengaduan, maupun asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, sosialisasi dan publikasi informasi layanan, khususnya informasi terbaru, dilakukan secara rutin, berkala, dan responsif terhadap setiap pembaruan. Penyampaian

informasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai media, baik secara langsung (offline), media elektronik, maupun secara daring melalui platform media sosial resmi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kompetensi petugas layanan, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh secara konsisten mengikutsertakan petugas dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), *Training of Trainer* (ToT), serta forum ilmiah seperti seminar, sosialisasi, dan workshop yang relevan dengan bidang spektrum frekuensi radio.

Di samping itu, untuk meningkatkan integritas petugas layanan, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menerapkan sistem *reward and punishment*, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan secara berkelanjutan.



REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan tindak lanjut hasil survei, peningkatan kualitas layanan pada unsur yang masih memerlukan perbaikan, serta optimalisasi metode survei agar menjangkau lebih banyak responden. Selain itu, pemantauan berkala terhadap pelaksanaan survei perlu terus dilakukan guna menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik.

EFISIENSI

Pelaksanaan survei dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal melalui penggunaan instrumen survei yang sederhana namun tetap sesuai standar, pemanfaatan media digital untuk mempermudah pengumpulan responden, serta keterlibatan pegawai internal secara terkoordinasi tanpa menambah beban anggaran secara signifikan. Selain itu, pengolahan dan analisis data dilakukan secara mandiri oleh unit kerja sehingga lebih efisien dari sisi waktu, biaya, dan tenaga, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 25 Benchmark Capaian Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	100%	100%	100%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	100%	122%	122%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut: **Berorientasi Pelayanan**, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; **Akuntabel**, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku; **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya; **Harmonis**, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif; **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat; **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan; **Kolaboratif**, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat sehingga dapat melakukan evaluasi dari survey yang telah dilaksanakan.

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

LATAR BELAKANG

Indikator kinerja Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara objektif dan terukur, khususnya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Indikator ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan secara profesional, adil, dan bebas dari praktik diskriminasi, pungutan liar, penerimaan imbalan, serta percaloan. Selain itu, hasil survei menjadi dasar dalam evaluasi kinerja unit pelayanan sekaligus sebagai bahan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik.

Seiring dengan perkembangan pelayanan publik di Provinsi Aceh serta meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, penguatan integritas dan transparansi layanan menjadi suatu keharusan. Penerima manfaat dari capaian indikator ini adalah masyarakat dan pengguna layanan di wilayah Aceh yang memperoleh pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, bagi instansi penyelenggara layanan, hasil IIPP/IPAK memberikan umpan balik yang konstruktif dalam memperkuat tata kelola, mencegah potensi penyimpangan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

CAPAIAN

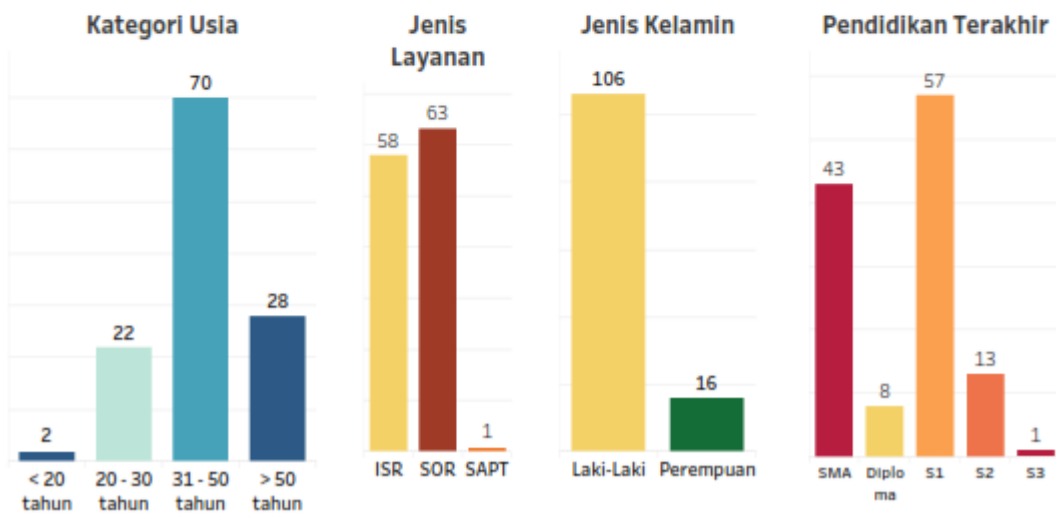
Adapun Survey terdapat 2 (dua) unsur yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan penilaian 3,2 skala 4 dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan penilaian 3,6 skala 4.

Sesuai aturan hasil survey yang ditetapkan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital yaitu:

$$\text{Perhitungan capaian : Persentase (\%)} = \frac{\text{Hasil survei IIPP/IPAK}}{3,6} \times 100\%$$

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan survey:

- a. Dari Triwulan I s.d Triwulan IV melalui link/website/langsung dan hasilnya sesuai Nota Dinas Direktur Operasi Sumber Daya sebagai berikut:
 - Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,82 Skala 4
 - Hasil penilaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) : 3,84 Skala 4
 - Hasil penilaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IPAK) : 3,84 Skala 4
 - Hasil penilaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IPKP) : 3,82 Skala 4



Gambar 9 Hasil Survey Pelayanan Publik pada Tahun 2025



Tabel 26 Nilai Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) di UPT Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tahun	Target PK	Nilai
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	100%	100%

ANALISIS

Berdasarkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) pada tabel, diperoleh nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh masing-masing sebesar 3,84 (Skala 4). Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah unsur Pungutan Liar (Pungli) dengan nilai indeks sebesar 3,86, sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah unsur Pelayanan di Luar Prosedur dengan nilai sebesar 3,81.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berada pada kategori Mutu Pelayanan A dengan kinerja yang tergolong SANGAT BAIK.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, khususnya pada unsur Pelayanan di Luar Prosedur, Diskriminasi Pelayanan (3,83), dan Percaloan/Perantara Tidak Resmi (3,84) yang nilainya relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya.

Kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) yang dilaksanakan bersamaan dengan survei integritas menunjukkan nilai IKM sebesar 3,82 dan IPKP sebesar 3,82. Pelaksanaan survei dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

DAMPAK

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) memiliki peran penting sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan, karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan yang diberikan.

Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi, serta meningkatkan profesionalisme aparatur. Bagi masyarakat, survei ini menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, bagi pemerintah, hasil survei dimanfaatkan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan serta penguatan reformasi birokrasi, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.



TINDAK LANJUT

Dalam upaya peningkatan nilai Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Beberapa inovasi yang telah dikembangkan antara lain penyediaan layanan komunikasi melalui WhatsApp pelayanan (Wayan) dan media sosial Instagram, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi, konsultasi, pengaduan, maupun asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, sosialisasi dan publikasi informasi layanan, khususnya informasi terbaru, dilaksanakan secara rutin, berkala, dan responsif terhadap setiap pembaruan. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung (offline), media elektronik, maupun secara daring melalui platform media sosial resmi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kompetensi petugas layanan, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh secara konsisten mengikutsertakan petugas dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta *Training of Trainer (ToT)*.

Di samping itu, untuk memperkuat integritas petugas layanan, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menerapkan sistem *reward and punishment*, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan secara berkelanjutan.



REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh. Data tersebut merupakan hasil persepsi responden yang mencerminkan kondisi integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tindak lanjut atas hasil survei ini diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk rencana aksi sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dijabarkan dalam bentuk rekomendasi dan aksi perbaikan pada masing-masing aspek pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Diskriminasi Pelayanan

Rekomendasi:

Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terbuka, penguatan komitmen etika aparatur, serta pelaksanaan pelatihan pelayanan prima dan anti-diskriminasi.

Rencana Aksi:

Penyusunan dan publikasi maklumat pelayanan, serta pengembangan sistem antrian digital dan layanan digital yang transparan.

2. Penerimaan Imbalan

Rekomendasi:

Peningkatan pengawasan oleh pimpinan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan serta penyediaan dan optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat.

Rencana Aksi:

Pelaksanaan monitoring rutin terhadap kegiatan pelayanan, termasuk melalui pemanfaatan CCTV, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

3. Pelayanan di Luar Prosedur

Rekomendasi:

Penguatan pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi petugas, penyajian alur dan standar pelayanan secara terbuka, serta penegasan komitmen pelayanan.

Rencana Aksi:

Pelaksanaan sosialisasi dan penyegaran (refresh) SOP secara berkala agar seluruh petugas memahami alur pelayanan dengan benar, penyampaian informasi terkait SOP, persyaratan, waktu layanan, dan biaya secara terbuka melalui ruang pelayanan dan media digital, serta penandatanganan pakta integritas oleh petugas sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan sesuai SOP.

EFISIENSI

Survei kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara mandiri oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK). Dalam pelaksanaannya, digunakan instrumen survei berupa kuesioner yang terintegrasi, sehingga responden tidak perlu melakukan pengisian lebih dari satu kali.

Selain itu, metode pengisian survei tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui kanal daring (online), guna mempermudah partisipasi responden serta meningkatkan jangkauan dan efektivitas pelaksanaan survei.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 27 Benchmark Capaian Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	100%	100%	100%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	100%	108%	108%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut:

Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; **Akuntabel**, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku; **Kompeten**, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya; **Harmonis**, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif; **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat; **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan; **Kolaboratif**, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat sehingga dapat melakukan evaluasi dari survey yang telah dilaksanakan.

Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

LATAR BELAKANG

Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link merupakan bagian dari Program Prima Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) yang diinisiasi oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil identifikasi ketidaksesuaian koordinat yang ditemukan oleh UPT ditindaklanjuti secara nyata oleh pemegang ISR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi) telah dilaksanakan sejak Tahun 2023 berbasis kabupaten/kota, baik yang dilaksanakan secara *on-site* maupun *on-desk* oleh UPT. Mengingat perizinan ISR bersifat dinamis, kegiatan verifikasi data koordinat site ISR dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja dan sumber daya di UPT serta dapat disinergikan dengan kegiatan UPT lainnya yang relevan.

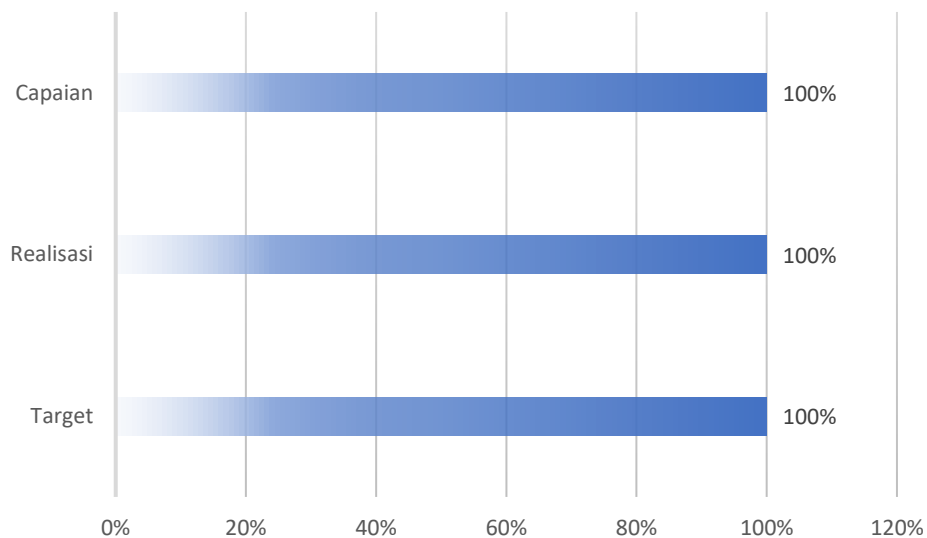
Sesuai dengan amanat Direktur Layanan Infrastruktur Digital, pelaksanaan tindak lanjut ini difokuskan pada peningkatan akurasi data perizinan dan penurunan potensi interferensi frekuensi. Selain itu, kegiatan ini berperan krusial dalam mendukung implementasi Master Data Referensi Site (MDRS) sebagai acuan koordinat nasional yang valid dalam proses perizinan dan pengawasan. Hal ini menjadi sangat penting karena ketidaksesuaian data koordinat di lapangan dapat memicu berbagai permasalahan teknis, mulai dari ketidaktepatan analisis perizinan hingga hambatan serius dalam pengendalian spektrum frekuensi radio secara nasional.



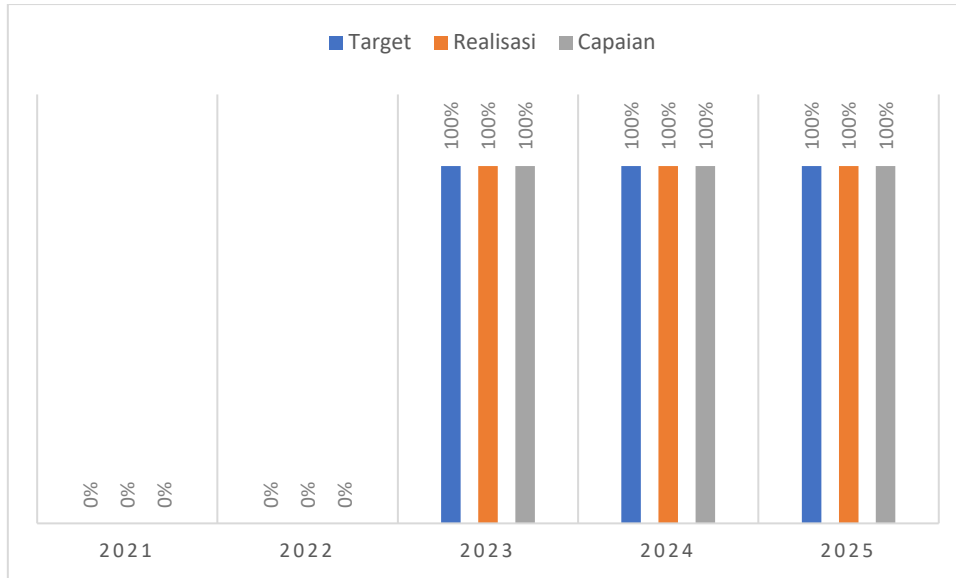
CAPAIAN

Pada tahun 2025, Program Prima Aksi dilanjutkan dengan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan koordinat pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh memiliki target melakukan verifikasi site ISR microwave link di Lhokseumawe, Sabang, Langsa dan Kab. Pidie Jaya.

Dalam pelaksanaannya Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan. Dengan demikian capaian yang didapatkan sebesar 100%.



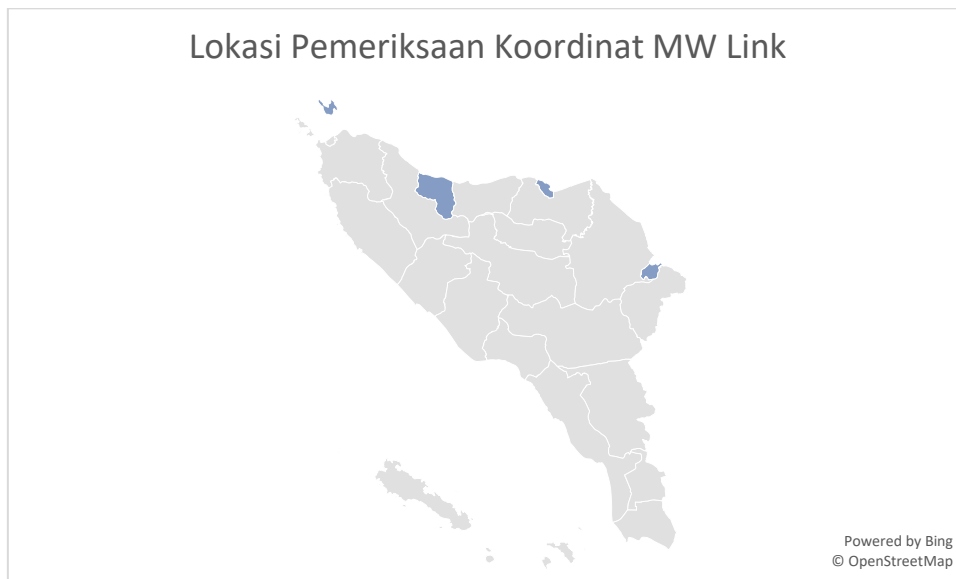
Grafik 31 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IK-1.13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) Tahun 2025



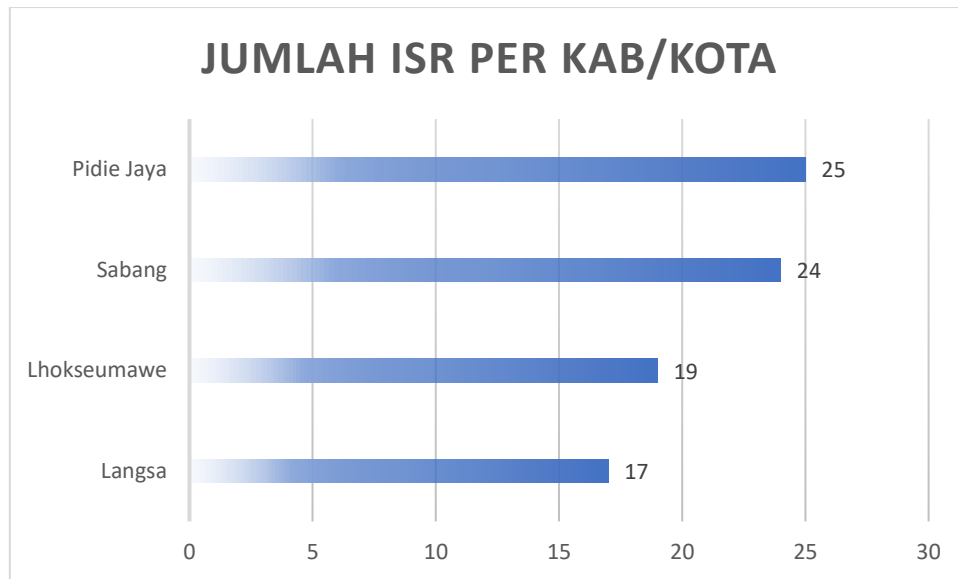
Grafik 32 Perbandingan Capaian IK-1.13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Tahun 2021-2025

ANALISIS

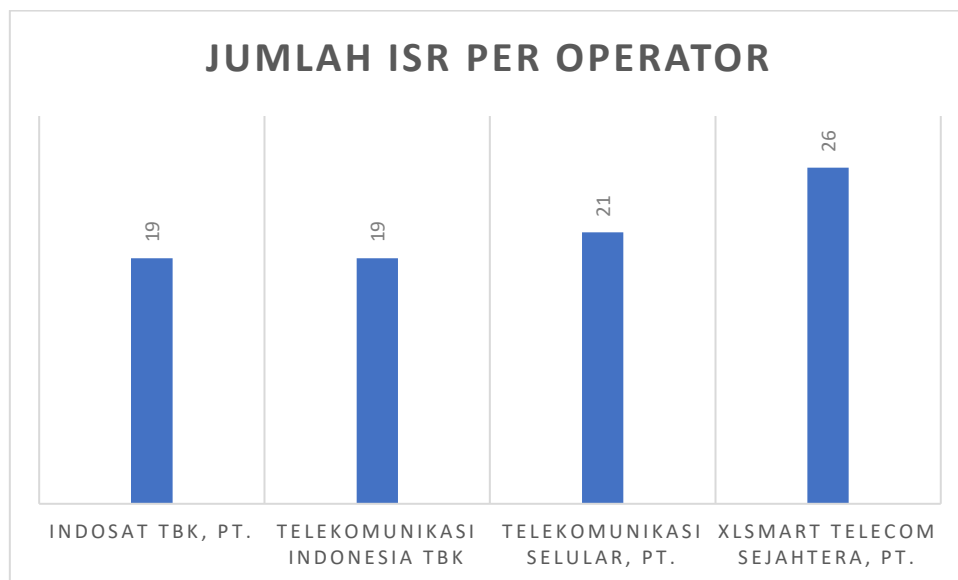
Terdapat total 85 (delapan puluh lima) ISR yang menjadi target pemeriksaan pada tahun 2025. Sebaran jumlah ISR per kab/kota dan jumlah ISR per operator sebagaimana terdapat pada grafik di bawah.



Grafik 33 Lokasi Pemeriksaan Koordinat MW Link

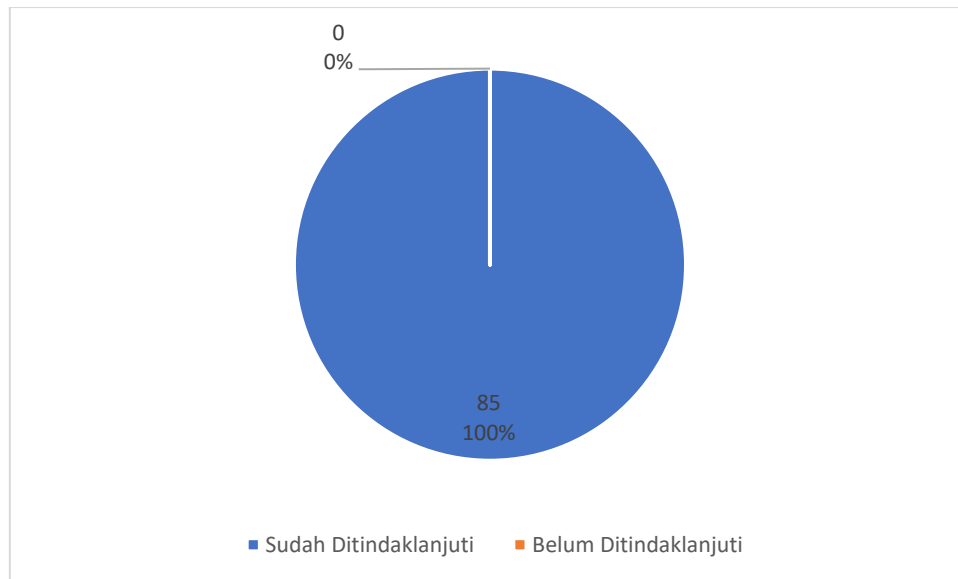


Grafik 34 Jumlah ISR Per Kab/Kota



Grafik 35 Jumlah ISR Per Operator

Dari 85 (delapan puluh lima) ISR tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti sehingga realisasi tindak lanjut verifikasi koordinat ISR microwave link mencapai 100%.



Grafik 36 Jumlah tindak lanjut verifikasi ISR MW link

DAMPAK

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link memberikan berbagai dampak strategis bagi ekosistem telekomunikasi. Pertama, kegiatan ini secara signifikan meningkatkan akurasi dan validitas data perizinan, sehingga proses analisis teknis perizinan menjadi lebih tepat sasaran. Kedua, penyesuaian lokasi stasiun radio dengan kondisi riil di lapangan berperan penting dalam menurunkan potensi interferensi frekuensi yang dapat mengganggu kualitas layanan. Selain itu, penggunaan data koordinat yang terstandarisasi melalui Master Data Referensi Site (MDRS) mendukung optimalisasi pengawasan spektrum frekuensi radio secara lebih efektif. Secara menyeluruh, upaya ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, tetapi juga meningkatkan transparansi layanan perizinan di sisi regulator.

TINDAK LANJUT

Sebagai langkah berkesinambungan atas capaian kinerja tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut verifikasi data koordinat Site ISR Microwave Link secara berkala. Seluruh hasil yang diperoleh akan dimanfaatkan sebagai dasar utama dalam pemutakhiran basis data ISR pada sistem SIMS agar tetap relevan dengan kondisi lapangan. Selain itu, data tersebut juga akan dijadikan bahan evaluasi strategis dalam merencanakan kegiatan verifikasi serta pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada tahun berikutnya, guna memastikan tata kelola frekuensi yang lebih optimal dan terintegrasi.

REKOMENDASI

Untuk memastikan kesesuaian koordinat stasiun radio microwave link antara yang terdapat di ISR dengan yang sebenarnya di lapangan, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, perlu diterapkan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan data koordinat yang terdapat pada ISR merupakan data aktual yang sesuai dengan di lapangan.

EFISIENSI

Efisiensi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut verifikasi data koordinat Site ISR Microwave Link dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan data hasil verifikasi yang sudah tersedia, sehingga tidak memerlukan pengumpulan ulang data di lapangan. Penggunaan sistem informasi seperti SIMS dan penerapan MDRS memungkinkan proses validasi serta penyesuaian data berlangsung lebih cepat dan terstandarisasi secara nasional. Selain itu, strategi koordinasi jarak jauh dengan para pemegang ISR serta pelaksanaan monitoring berkala secara signifikan mengurangi kebutuhan sumber daya dan waktu. Dengan pendekatan ini, target tindak lanjut dapat diselesaikan secara optimal dengan penggunaan anggaran dan personel yang jauh lebih efisien.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang telah mencapai target 100% sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu 100%.

Tabel 28 Benchmark Capaian Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
Indikator Kinerja	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	100%	100%	100%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	100%	100%	100%

Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan program sesuai perencanaan, masing-masing UPT menunjukkan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, serta memberikan peluang peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan telah menetapkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan strategis nasional.

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) pada tahun 2025 telah mengimplementasikan nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini: **Berorientasi Pelayanan**, melalui kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (PrimaAksi) dapat terlaksana pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan peruntukannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung

perkembangan industri telekomunikasi. **Akuntabel**, kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (PrimaAksi) dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. **Kompeten**, Kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya. **Harmonis**, kegiatan kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (PrimaAksi) didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama. **Loyal**, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan. **Adaptif**, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan. **Kolaboratif**, pada kegiatan kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (PrimaAksi) dilakukan kolaborasi baik internal Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh maupun eksternal seperti koordinasi dengan instansi pusat, instansi daerah, dan stakeholder pengguna frekuensi radio

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025

LATAR BELAKANG

Pencapaian target kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh didukung oleh integrasi kegiatan administratif yang mengedepankan prinsip ketepatan realisasi atas perencanaan. Ruang lingkup dukungan administrasi ini mencakup enam pilar utama:

- Nilai Kinerja Anggaran
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan

CAPAIAN

➤ Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 29 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Nilai Perencanaan DIPA baru	50 %Nilai Perencanaan DIPA baru	Nilai Pelaksanaan DIPA baru	Nilai Pelaksanaan DIPA lama	Total Pelaksanaan DIPA Baru +Lama	Total Pelaksanaan DIPA Baru +Lama/2	Nilai Kinerja
75	37,5	46,76	49,05	95,81	47,905	85,405

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh pada bulan Desember Tahun 2025, diperoleh nilai kinerja sebesar 85,40. Perhitungan

tersebut dilakukan dengan menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50% Nilai Perencanaan DIPA Baru ditambah dengan rata-rata Nilai Pelaksanaan DIPA Baru dan DIPA Lama. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 86,95, capaian tersebut mengalami selisih sebesar 1,55 poin. Selisih ini tergolong kecil dan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan mendekati target kinerja yang ditetapkan.

Sebagai satuan kerja vertikal UPT dari Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengalami perubahan nomenklatur dan restrukturisasi organisasi (Sebelumnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika), Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh perlu melakukan proses administrasi perubahan nomenklatur pada dokumen administrasi satker dan melakukan likuidasi satker sehingga Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh sepanjang tahun 2025 memiliki 2 (dua) DIPA masing-masing sebesar Rp 5.548.534.000,. dan Rp 10.172.224.000,. .

Tabel 30 DIPA Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA 2025

No.	Nomor DIPA	Pagu	Pagu DIPA Lama
1.	SP DIPA- 059.03.2.653945/2025	Rp 5.548.534.000	Rp 5.548.534.000
2.	SP DIPA 059.09.2.694707/2025	Rp 10.172.224.000	Rp 8.229.598.000

Dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melakukan 11 (sebelas) revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Revisi Anggaran DIPA lama

No	Kewenangan Revisi Anggaran	Tanggal Revisi	Keterangan Revisi
1	Revisi DJA	22/02/2025	Refocusing Anggaran
2	Revisi Kanwil DJPb	14/04/2025	RPD Triwulan II
3	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	27/05/2025	Pemutakhiran KPA
4	Revisi DJA	08/07/2025	Persiapan Cut-off

Tabel 32 Revisi Anggaran DIPA baru

No	Kewenangan Revisi Anggaran	Tanggal Revisi	Keterangan Revisi
1	Revisi Kanwil DJPb	16/07/2025	RPD Triwulan III
2	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	07/08/2025	Belanja Pegawai
3	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	27/08/2025	Honor SBML dan Belanja Barang
4	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	02/09/2025	Uang Makan dan Kegiatan Tindak Lanjut Penertiban
5	Revisi Kanwil DJPb	01/10/2025	RPD Triwulan IV dan Gaji PJLP

6	Revisi DJA	28/10/2025	Belanja Pegawai (Pagu Minus)
7	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	29/10/2025	Optimalisasi Pemeliharaan Gedung Dan Langganan Daya Dan Jasa (Listrik, PDAM)
8	Revisi DJA	20/11/2025	Relaksasi Anggaran
9	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	25/11/2025	Optimalisasi Perjalanan Dinas
10	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	11/12/2025	Optimalisasi BBM dan Genset
11	Revisi Kuasa Pengguna Anggaran	30/12/2025	Belanja Pegawai

➤ **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Pada tahun 2025, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh sebelum Likuidasi 93,3 dan DIPA setelah Likuidasi 93,52. Capaian dan penjelasan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 33 Capaian IKPA Tahun 2025 DIPA sebelum Likuidasi

No.	Indikator	Nilai Bobot	Bobot%	Nilai Akhir
1.	Revisi DIPA	100	10	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	84,2	15	12,63
3.	Penyerapan Anggaran	97,73	20	19,55
4.	Belanja Kontraktual	0	0	0
5.	Penyelesaian Tagihan	0	0	0
6.	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
7.	Dispensasi SPM	0	0	0
8.	Capaian Output	89,95	25	22,46
Nilai Total		74,64		
Konversi bobot		80%		
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot -Dispensasi SPM)		93,3		

Tabel 34 Capaian IKPA Tahun 2025 DIPA setelah Likuidasi

No.	Indikator	Nilai Bobot	Bobot%	Nilai Akhir
1.	Revisi DIPA	100	10	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	86,42	15	12,96
3.	Penyerapan Anggaran	88,55	20	17,71
4.	Belanja Kontraktual	0	0	0
5.	Penyelesaian Tagihan	0	0	0
6.	Pengelolaan UP dan TUP	91,45	10	9,15
7.	Dispensasi SPM	0	0	0
8.	Capaian Output	100	25	25

Nilai Total	74,82
Konversi bobot	80%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot -Dispensasi SPM)	93,52

➤ **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Dalam rangka menjaga aset BMN baik peralatan kantor maupun mesin selalu dalam keadaan baik dan siap pakai guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan secara rutin pemeliharaan dan perbaikan terhadap aset-aset BMN sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel 35 Data Pemeliharaan Aset BMN Tahun 2025

No.	Aset BMN	Tindakan Pemeliharaan	Keterangan
1.	Kendaraan operasional	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
2.	Alat Pengolah Data	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
3.	Genset	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
4.	AC	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
5.	CCTV	Pemeliharaan rutin dan perbaikan	Kondisi baik
6.	Tabung Kebakaran	Pemeliharaan rutin	Kondisi baik

➤ **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan 1 kegiatan pengadaan Belanja Modal yang dilakukan secara e-purchasing, pengadaan langsung dan tender.

Tabel 36 Daftar Pengadaan Belanja Modal Tahun 2025

No	Metoda Pengadaan	Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	E-Purchasing	Pengadaan Smart TV	EP-01KBCKAYYRFMJ2G8FR5WHYBHT5, 02 Desember 2025	Rp55.000.000	Rp55.000.000

➤ **Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh pada tahun 2025 berjumlah 65 (enam puluh lima) Pegawai dan 1 (satu) PJLP, dengan rincian 1 (satu) Pegawai ASN Mutasi Kerja ke Satuan Kerja Lain pada 01 Maret 2025, Penerimaan CPNS sejumlah 9 (sembilan) Pegawai, Penerimaan PPPK Tahap-1 dan Tahap-2 sejumlah 25 (dua puluh lima) Pegawai, Pengadaan 1 (satu) PJLP, dan 1 (satu) Pegawai ASN Pensiun pada 01 Mei 2025, sehingga pada 31 Desember 2025 komposisi pegawai pada Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh adalah 63 (enam puluh tiga) pegawai ASN dan 1 (satu) pegawai PJLP. Kegiatan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai selama tahun 2025 terdapat

kenaikan pangkat 3 (tiga) pegawai ASN melalui jalur pilihan dan reguler serta terdapat kenaikan gaji berkala 3 (tiga) pegawai ASN. Rincian pengelolaan administrasi kepegawaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 37 Mutasi Pegawai

No.	Nama	Jabatan	Satker sebelum	Satker sesudah	TMT Mutasi
1.	Zulinda Pratiwi Br. Sitepu, A.Md.	PFR Terampil Pelaksana	Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	Balai Monitor SFR Kelas I Medan	01 Maret 2025

Tabel 38 Pensiun Pegawai

No.	Nama	Jabatan	BUP	TMT Pensiun
1.	Alrizal, S.T.	Kepala Subbagian Umum	58 (lima puluh delapan) tahun	01 Mei 2025

Tabel 39 Penerimaan CPNS

No.	Nama	Jabatan	TMT CPNS
1.	Redha Rizky S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	01 April 2025
2.	Indra Wijaya S.T.	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	01 April 2025
3.	Nur Alawiyah S.I.Kom	Fasilitator Pemerintahan	01 April 2025
4.	Mufli Ramazana S.E.	Fasilitator Pemerintahan	01 April 2025
5.	Rally Aditya S.H.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	01 April 2025
6.	Teuku Harsya Ghiffari S.T.	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	01 April 2025
7.	Muhammad Khalis S.E.	Fasilitator Pemerintahan	01 April 2025
8.	Ridwan A.Md.T	Pengendali Frekuensi Radio Terampil	01 April 2025
9.	Juliandi Darmawan A.Md.T	Pengendali Frekuensi Radio Terampil	01 April 2025

Tabel 40 Penerimaan PPPK

No.	Nama	Jabatan	TMT PPPK
1.	Luky Villa Delvia, S.E.	Penata Layanan Operasional	01 April 2025
2.	Maulidan, A.Md.Pel.	Pengelola Layanan Operasional	01 April 2025
3.	Zulbahri	Pengadministrasi Perkantoran	01 April 2025
4.	Afi Barnaidi S.E.	Penata Layanan Operasional	01 Oktober 2025
5.	Safriyadi S.E.	Penata Layanan Operasional	01 Oktober 2025
6.	T. Driantama S.H.	Penata Layanan Operasional	01 Oktober 2025
7.	Lisa Wahyudi A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	01 Oktober 2025
8.	Faisal	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025

9.	Safir Kelana	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
10.	Rusmini	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
11.	Afrizal	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
12.	Rahmadi	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
13.	Rizky Saputra	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
14.	Munawar	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
15.	Rahmad Mauli	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
16.	Salman Farisi	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
17.	Riwanur Amnar	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
18.	Rahmat Hidayat	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
19.	Eka Miranda Sari	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
20.	Marfiri Darriansyah	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
21.	Hardiansyah	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
22.	M. Nabil Luthfi	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
23.	M. Ikhsan Aditya	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
24.	Muhammad Farhan Dehzi	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025
25.	Khairil Basyar	Pengadministrasi Perkantoran	01 Oktober 2025

Tabel 41 Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	TMT SK
1.	M. Ryan, S.H.	Tenaga Pendukung Layanan Maritime On The Spot	01 November 2025

Tabel 42 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2025

No.	Nama	Uraian	TMT KP	Masa Kerja
1.	Herdiansyah Putra, S.H., M.H.	III/c ke III/d	01 Oktober 2025	15 Tahun 9 Bulan
2.	Doni Nursyam, S.T., M.T.	III/c ke III/d	01 November 2025	15 Tahun 9 Bulan
3.	Rifki Wahyudiansyah, A.Md.	III/b ke III/c	01 November 2025	17 Tahun 7 Bulan

Tabel 43 Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2025

No.	Nama	Golongan	TMT KGB	Masa Kerja
1.	Salahuddin, S.E.	III/b	01 Juni 2025	16 Tahun
2.	Yasser Hidayat, S.T.	IX	01 Oktober 2025	2 Tahun
3.	Ruri Nugrahani, S.T.	III/d	01 Desember 2025	20 Tahun

ANALISIS

Nilai kinerja perencanaan anggaran belum optimal dengan perolehan 75 akibat blokir efisiensi pagu anggaran yang membatasi fleksibilitas perencanaan serta dengan struktur organisasi baru pada lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Hal ini mengakibatkan rincian output

tidak dapat dinilai, tidak terpenuhinya ketentuan dispensasi penilaian kinerja sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 jo. Nomor 27/MK/AG/2025, sehingga berdampak pada penurunan capaian nilai kinerja anggaran secara keseluruhan.

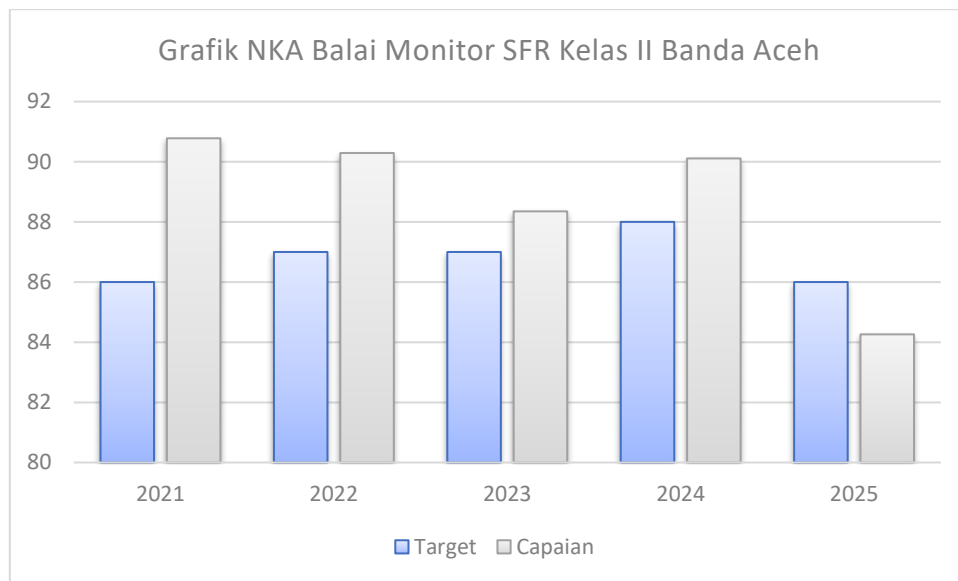
DAMPAK

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Ditjen Infradigi) mencerminkan komitmen terhadap digitalisasi layanan publik, khususnya melalui implementasi sistem perizinan berbasis elektronik seperti Izin Stasiun Radio (ISR) yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Peningkatan NKA ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat serta pelaku industri telekomunikasi, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan menghasilkan dampak nyata sesuai kebutuhan nasional.

Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran memperkuat kepercayaan publik, menjaga efisiensi belanja negara, serta mendukung investasi dalam pengembangan teknologi baru, optimalisasi layanan telekomunikasi, dan perluasan akses ke daerah terpencil. Dengan demikian, NKA yang optimal berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan spektrum frekuensi yang efisien, peningkatan layanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta pertumbuhan sektor telekomunikasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh mengalami penurunan Nilai Kinerja Anggaran daripada tahun-tahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada grafik di bawah.



Grafik 37 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tabel 44 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh 2021 s.d 2025

Tahun	Target PK	Nilai NKA
2021	86	90,78
2022	87	90,29
2023	87	88,35
2024	88	90,11
2025	86	85,40

TINDAK LANJUT

Guna memitigasi kendala pada aspek perencanaan, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh akan melakukan penajaman analisis kebutuhan anggaran melalui reviu berkala terhadap kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan. Langkah ini mencakup koordinasi intensif dengan otoritas terkait untuk melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi kodefikasi Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh alokasi belanja memiliki landasan teknis yang akurat dan relevan dengan dinamika operasional organisasi serta perubahan SOTK terbaru.

Dalam menghadapi kebijakan efisiensi dan potensi blokir anggaran di masa mendatang, satuan kerja akan menetapkan skala prioritas program secara lebih rigid sejak awal tahun anggaran. Strategi ini melibatkan identifikasi kegiatan strategis yang berdampak langsung pada Indikator Kinerja Utama (IKU) agar tetap berjalan optimal meskipun terdapat kebijakan Automatic Adjustment. Penyesuaian struktur anggaran akan dilakukan secara proaktif melalui mekanisme revisi yang tepat waktu guna menjaga fleksibilitas dan ketahanan fiskal unit kerja.

Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran akan difokuskan pada akselerasi proses pengadaan barang dan jasa serta penguatan pengendalian internal atas ketertiban administrasi keuangan. Balai Monitor SFR berkomitmen untuk meminimalisir deviasi halaman III DIPA dengan memperketat pengawasan terhadap jadwal kegiatan di setiap unit teknis. Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi hambatan penyerapan secara dini, sehingga capaian IKPA dapat dipertahankan pada level sangat baik.

Sehubungan dengan transisi SOTK, akan dilakukan pemetaan ulang tata kelola manajemen keuangan yang selaras dengan mandat organisasi yang baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap sumber daya yang dialokasikan terdistribusi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan perubahan fungsi kedinasan. Melalui integrasi seluruh langkah korektif tersebut, diharapkan target Nilai Kinerja Anggaran pada tahun anggaran berikutnya dapat tercapai sepenuhnya.

REKOMENDASI

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dihadapkan pada kondisi sedikit berbeda yang berada di luar prediksi, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berkomitmen melakukan penguatan manajemen keuangan, meningkatkan kualitas perencanaan, pada periode mendatang. Fokus utama perbaikan diarahkan pada akselerasi realisasi anggaran dan akurasi Halaman III DIPA melalui peningkatan intensitas pemantauan, dan koordinasi lintas sektoral.

EFISIENSI

Efisiensi diwujudkan melalui pengendalian belanja, optimalisasi penyerapan anggaran sesuai kebutuhan riil, serta penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi yang berlaku tanpa mengurangi kualitas capaian output kegiatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengutamakan prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap kinerja layanan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai manfaat yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang memiliki kemiripan struktur sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Kedua UPT memiliki target yang sama, yaitu Nilai 86,95 dengan Realisasi yang kurang lebih sama.

Tabel 45 Benchmark Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien		
Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	86,95	85,40	98,22%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	86,95	86,78	99,80%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Pelaksanaan Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025 mencerminkan penerapan nilai **Akuntabel** melalui keterbukaan dalam mengevaluasi penyebab belum tercapainya target kinerja anggaran. Nilai **Kolaboratif** tercermin dari koordinasi dengan unit teknis dan DJA dalam penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran, dan nilai **Loyal** terlihat dari komitmen seluruh pegawai dalam menjaga pelaksanaan dan administrasi anggaran tetap tertib dan optimal sesuai ketentuan.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

LATAR BELAKANG

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) disusun sebagai alat ukur strategis dalam menilai tingkat akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan UAKPA merupakan representasi formal atas seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu periode anggaran. Pelaporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang memberikan gambaran nyata mengenai kinerja keuangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Melalui indikator ini, kualitas penyajian laporan keuangan dapat diukur secara objektif, terstruktur, dan berkesinambungan, sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

CAPAIAN

Nilai Kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran adalah nilai yang harus dicapai Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh untuk menjaga kualitas laporan keuangan satker dan penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN Komdigi. Dari target yang diberikan sebesar 97% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya diatas 100%.

Tabel 46 Indikator-indikator Penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2025

No	Indikator	Metode Penilaian				
		Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang		Nilai Kualitas LK
				4=3x2	5=4x100	
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%			-50	
	Jumlah transaksi koreksi audit 0 s.d 5		0%	0%	0	0
	Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d 10		-5%	-3%	-2,5	
	Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d 15		-15%	-8%	-7,5	
	Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d 20		-30%	-15%	-15	
	Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20		-50%	-25%	-25	
2	Kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK	20%			-20	
	Kesalahan akun Rp0 - Rp150jt		0%	0%	0	0
	Kesalahan akun di atas Rp150jt - Rp300jt		-5%	-1%	-1	

	Kesalahan akun di atas Rp300jt - Rp600jt		-15%	-3%	-3	
	Kesalahan akun di atas Rp600jt - 1,2Miliar		-30%	-6%	-6	
	Kesalahan akun di atas 1,2Miliar		-50%	-10%	-10	
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	10%			-10	
	Tidak terdapat saldo kas		0%	0%	0	0
	Terdapat saldo kas		-100%	-10%	-10	
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%			-5	
	Sesuai/belum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0
	Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5	
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%			-10	
	Efektif		0%	0%	0	0
	Efektif dengan pengecualian		-30%	-3%	-3	
	Mengandung Kelemahan Material		-70%	-7%	-7	
6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian PIPK ke Entitas Pelaporan	5%			-5	
	Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0
	Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5	
II	Nilai Akhir	100				100

Total pagu anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh pada tahun 2025 (sebelum dan setelah likuidasi) sebesar Rp.15.720.758.000,- terealisasi sebesar Rp.13.449.203.277,- dengan realisasi persentase 85,55% berdasarkan data pada OM-SPAN.

Sehubungan dengan adanya program Efisiensi Anggaran Pemerintah, maka pagu anggaran (nilai tanpa pagu blokir) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh pada tahun 2025 sebesar Rp.13.778.132.000,- realisasi juga sebesar Rp. 13.449.203.277,- dengan realisasi persentase 97,61% berdasarkan data pada OM-SPAN. Untuk rincian realisasi per jenis belanja (dengan dan tanpa pagu blokir) serta perbandingan realiasi dari tahun 2021 s.d 2025 diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 47 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025 (Include Pagu Blokir)

	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
51	Belanja Pegawai	5.749.336.000	5.664.651.270	98,53%
52	Belanja Barang	9.908.704.000	7.729.052.007	78,00%
53	Belanja Modal	62.718.000	55.500.000	88,49%
	TOTAL	15.720.758.000	13.449.203.277	85,55%

Tabel 48 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025 (Exclude Pagu Blokir)

	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
51	Belanja Pegawai	5.749.336.000	5.664.651.270	98,53%
52	Belanja Barang	7.966.078.000	7.729.052.007	97,02%
53	Belanja Modal	62.718.000	55.500.000	88,49%
	TOTAL	13.778.132.000	13.449.203.277	97,61%

ANALISIS

Pada tahun anggaran 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil merealisasikan capaian nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA sebesar 100%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 97. Keberhasilan pencapaian target ini didorong oleh beberapa faktor krusial, di antaranya adalah konsistensi dalam penyusunan serta penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN dilakukan secara intensif untuk memitigasi potensi selisih data, didukung dengan penguatan pengendalian internal guna meminimalisir kesalahan administratif maupun substansi dalam pelaporan.

Optimalisasi kinerja indikator tersebut dicapai melalui implementasi strategi dan inovasi sistemik, utamanya melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara komprehensif. Integrasi sistem berbasis teknologi informasi ini menjamin proses digitalisasi data keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh juga berkomitmen pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pembelajaran berkelanjutan dan pendampingan teknis guna memastikan pemahaman personel terhadap dinamika regulasi keuangan tetap relevan dan aplikatif.

Salah satu instrumen pengendalian utama dalam mempertahankan kualitas laporan adalah sinergi rekonsiliasi data secara periodik dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) demi menjamin validitas pencatatan. Nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA ini merupakan representasi dari proses akuntansi yang akuntabel dalam menyajikan informasi fiskal yang kredibel bagi pemangku kepentingan.

DAMPAK

Kualitas pelaporan keuangan yang akuntabel memberikan dampak signifikan bagi penguatan tata kelola internal Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh. Dengan dokumentasi transaksi yang presisi, pimpinan instansi dapat menjalankan proses pengambilan keputusan berbasis data

keuangan yang riil dan akurat. Selain itu, validitas laporan ini memperkuat fungsi pengawasan dan sistem deteksi dini terhadap potensi diskrepansi penggunaan anggaran, sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil secara cepat. Hal ini tidak hanya mempermudah proses audit yang sistematis, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dalam merumuskan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan efisien pada periode mendatang.

Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, kualitas pelaporan keuangan yang tinggi merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak publik atas transparansi birokrasi. Laporan yang valid memungkinkan masyarakat untuk meninjau efektivitas pemanfaatan APBN serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dialokasikan untuk mendukung fungsi pelayanan masyarakat, khususnya dalam pengawasan spektrum frekuensi radio. Kepastian bahwa anggaran dikelola sesuai dengan standar hukum dan akuntansi yang berlaku secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara secara profesional.

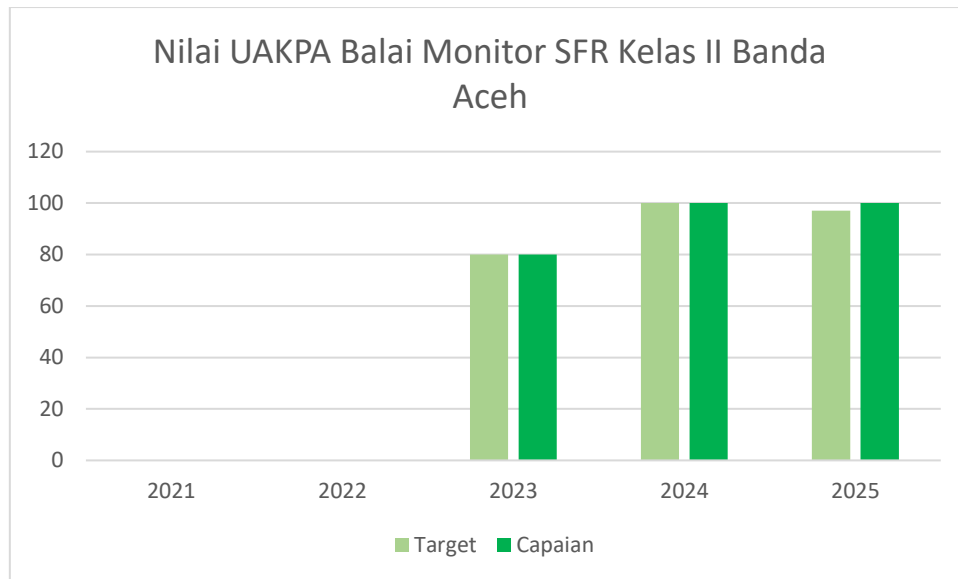
Melalui pencapaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA yang optimal, tercipta sinergi positif antara efektivitas manajerial instansi dengan peningkatan akuntabilitas publik. Keberhasilan ini memastikan bahwa siklus pengelolaan keuangan tidak hanya berhenti pada kepatuhan administratif semata, namun memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan organisasi serta penguatan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA dari periode sebelumnya, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh secara berkesinambungan mengoptimalkan implementasi PIPK serta memperketat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Instansi (SAI).

Upaya perbaikan berkelanjutan juga difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut atas temuan serta rekomendasi hasil audit. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kualitas rekonsiliasi data, penataan tata kelola BMN, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan.

Selain itu, pengawasan internal diintensifkan untuk menjamin ketepatan waktu serta validitas laporan yang dihasilkan. Komitmen ini membuahkan hasil nyata berupa konsistensi performa kinerja tahun 2023–2025 yang melampaui target, sekaligus meminimalisir risiko kekeliruan audit serta memperkuat pilar akuntabilitas instansi.



Grafik 38 Nilai UAKPA Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA. 2021 s.d 2025

Tabel 49 Nilai UAKPA Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA. 2021 s.d 2025

Tahun	Target	Capaian
2021	-	-
2022	-	-
2023	80	80
2024	100	100
2025	97	100

Tabel 50 Persentase Realisasi Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh TA. 2021 s.d 2025

Jenis Belanja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
51 Belanja Pegawai	94,53%	99,43%	99,63%	99,94%	98,53%
52 Belanja Barang	91,31%	99,46%	99,50%	98,01%	97,02%
53 Belanja Modal	99,66%	99,92%	99,88%	98,86%	88,49%
RATA-RATA	92,90%	99,48%	99,58%	98,86%	97,61%

REKOMENDASI

Untuk periode mendatang, fokus utama akan diarahkan pada penguatan implementasi PIPK serta pengetatan mekanisme kontrol dalam siklus pencatatan dan pelaporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan akan diintensifkan melalui bimbingan teknis berkala guna menjamin adaptabilitas personel terhadap dinamika regulasi dan sistem pelaporan yang ada. Selain itu, optimalisasi integrasi sistem informasi keuangan menjadi prioritas untuk menjamin validitas data, ketepatan waktu penyampaian, serta akurasi laporan secara menyeluruh.

EFISIENSI

Optimalisasi teknologi informasi melalui aplikasi SAKTI termasuk di dalamnya modul persediaan dan BMN—menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan UAKPA pada Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh. Upaya tersebut diperkuat dengan standarisasi alur kerja, peningkatan kapabilitas personel, serta sistem koordinasi yang efektif dengan pihak terkait. Rangkaian inisiatif ini dirancang untuk memacu kecepatan proses administrasi tanpa mengesampingkan aspek ketelitian, sehingga laporan keuangan yang disusun senantiasa memenuhi standar akuntabilitas publik dan transparansi yang dipersyaratkan.

BENCHMARK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan benchmark dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang memiliki kemiripan struktur sebagai acuan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktik terbaik guna mendorong inovasi dan efisiensi, yang berkontribusi pada pencapaian. Untuk Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) target dari UPT yaitu 97, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh mendapatkan Nilai 100 (di atas target 97). Kondisi ini serupa dengan Balai Monitor SFR Kelas I Medan yang juga melampaui target dengan mendapatkan Nilai 100.

Tabel 51 Benchmark Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien		
Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)		
UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Realisasi	%
Balai Monitor SFR Kelas II B. Aceh	97	100	103,09%
Balai Monitor SFR Kelas I Medan	97	100	103,09%

IMPLEMENTASI BerAKHLAK

Pelaksanaan Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA mencerminkan penerapan nilai **Akuntabel** melalui kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan, serta efektivitas pengendalian intern pelaporan keuangan. Nilai **Kompeten** tercermin dari kemampuan pengelola keuangan dan BMN dalam mengelola serta menyajikan laporan keuangan secara andal, didukung oleh pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Selain itu, nilai **Kolaboratif** terlihat dari koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan, pengelola BMN, dan pimpinan unit kerja dalam menjaga kualitas pelaporan, serta nilai **Loyal** melalui komitmen bersama untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

BENCHMARK KINERJA

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan memiliki peran strategis dalam pengawasan, pengendalian, serta pelayanan publik terkait spektrum frekuensi radio. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Infrastruktur Digital, kedua UPT ini bertanggung jawab dalam memastikan tertib penggunaan frekuensi, penanganan gangguan, serta optimalisasi layanan komunikasi. Laporan ini menyajikan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan Balai Monitor SFR Kelas I Medan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

Tabel 52 Benchmark UPT Banda Aceh - Medan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target	Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh		Balai Monitor SFR Kelas I Medan	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota	100%	125%	100%	125%
	2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%	100%	100%
	3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%	100%	105,26%
	4.	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133,33%	112,33%	149,77%
	5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117,65%	94%	110,59%
	6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	93%	116,25%	97,5%	121,88%
	7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%	100%	100%
	8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%	100%	100%	100%	100%
	9.	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	100%
	10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%
	11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%	122%	122%
	12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%	108%	108%
	13.	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%	100%	100%

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	14.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2025	86,95 (Nilai)	85,40	98,22%	86,78	99,80%
	15.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)	100	103,09%	100	103,09%

KINERJA LAINNYA

Selain kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh juga telah melaksanakan sebagai kegiatan lainnya selama tahun 2025, yang mencerminkan dedikasi dan pencapaian signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsi, di antaranya:

Penghargaan Predikat “Pelayanan Prima” dalam Pelaksanaan PEKPPP

PEKPPP merupakan program evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan dilaksanakan evaluasinya setiap tahun secara mandiri oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Kementerian Komunikasi dan Digital. Program PEKPPP ini bertujuan untuk mengukur dan memastikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang prima, berintegritas dan mendorong peningkatan fasilitas pelayanan khususnya bagi masyarakat kelompok rentan, sehingga seluruh masyarakat penerima layanan merasa puas dan terlayani dengan baik.



Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh menerima piagam penghargaan dari Menteri Komunikasi dan Digital atas raihan predikat "Pelayanan Prima" dalam pelaksanaan program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri untuk tahun 2025. Penghargaan ini telah diraih oleh Balai Monitor SFR II Banda Aceh selama 2 tahun berturut-turut sejak pertama kali terpilih menjadi unit lokus PEKPPP Mandiri pada tahun 2024.

Penghargaan Penyelenggara Program Maritime On The Spot (MOTS) Terbanyak Tahun 2025

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh menerima penghargaan DJID Choice Award sebagai Juara 1 Penyelenggara Program MOTS (Maritime On The Spot) Terbanyak di tahun 2025. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Balai Monitor SFR II Banda Aceh, Luthfi, ST. MT., pada malam acara Digi Wave 2025 : Infradigi Satukan Negeri.



Program MOTS (Maritime On The Spot) merupakan program dari DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) melalui UPT di daerah, untuk melayani dan mengasistensi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan dalam mendapatkan legalitas maupun edukasi penggunaan frekuensi radio di laut dengan tanpa pengenaan biaya apapun.

Penghargaan Satker IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025

Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2025 untuk kategori Satker Capaian IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025 dengan nilai 96,47 (Sangat Baik). Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2025.



Pemusnahan Alat/Perangkat Telekomunikasi Hasil Penertiban

Perangkat telekomunikasi hasil kegiatan penertiban frekuensi radio dan APT yang terlalu lama disimpan dapat menimbulkan dampak/resiko terhadap kerusakan perangkat itu sendiri, mengganggu kesehatan dan memerlukan ketersediaan ruang penyimpanan yang melebihi kapasitas, serta terindikasi ketidakpastian terhadap status perangkat yang diamankan. Tujuan dari kegiatan pemusnahan perangkat adalah untuk mencegah terjadinya penggunaan kembali perangkat secara ilegal dan demi terwujudnya tertib administrasi serta tertib hukum.



Pada tahun 2024, telah dilakukan pengamanan terhadap 109 alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki ISR atau tidak memiliki sertifikasi perangkat dari 32 pengguna

dan penjual. Setelah kegiatan pengamanan ini, sebanyak 59 perangkat yang dimiliki oleh 15 pengguna telah diurus izinnya dan perangkat tersebut telah dikembalikan. Terdapat 50 perangkat dari 17 pengguna yang hingga batas waktu yang ditentukan tidak diurus izinnya dan harus dimusnahkan.



Tabel 53 Daftar Perangkat Yang Dimusnahkan Tahun 2025

No	Jenis Perangkat	Jumlah (unit)
1	HT	44
2	Power Over Ethernet	1
3	STB	1
4	Wireless Mouse	3
5	Wireless microphone	1
Total		50

Dalam mempersiapkan kegiatan pemusnahan ini, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh telah melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Aceh untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemusnahan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Monitoring Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025

Dalam rangka mendukung kelancaran perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan kegiatan monitoring frekuensi radio dan pengukuran kualitas layanan seluler pada tanggal 26 Maret -7 April 2025 di beberapa titik lokasi yang penting dan ramai. Terdapat 8 (delapan) lokasi yang dilakukan monitoring di wilayah Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar. Selama kegiatan monitoring ini, penggunaan frekuensi radio khususnya pada dinas penerbangan, maritim, dan seluler terpantau lancar dan tidak ada laporan gangguan frekuensi radio yang terjadi.



Tabel
Kegiatan Monitoring Hari Raya Idul Fitri 1446 H

No.	Tanggal Monitoring	Lokasi Monitoring	Hasil Monitoring
1	26 Maret 2025	Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh	Clear

2	27 Maret 2025	Bandara Sultan Iskandar Muda, Kab. Aceh Besar	Clear
3	28 Maret 2025	Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh	Clear
4	29 Maret 2025	Terminal Batoh, Banda Aceh	Clear
5	30 Maret 2025	Mesjid Raya Baiturahman, Banda Aceh	Clear
6	31 Maret 2025	Lamjame, Banda Aceh	Clear
7	1 April 2025	Blang Bintang, Kab. Aceh Besar	Clear
8	2 April 2025	Neuheun, Kab. Aceh Besar	Clear
9	3 April 2025	Lamjame, Banda Aceh	Clear
10	4 April 2025	Blang Bintang, Kab. Aceh Besar	Clear
11	5 April 2025	Neuheun, Kab. Aceh Besar	Clear
12	6 April 2025	Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh	Clear
13	7 April 2025	Bandara Sultan Iskandar Muda, Kab. Aceh Besar	Clear

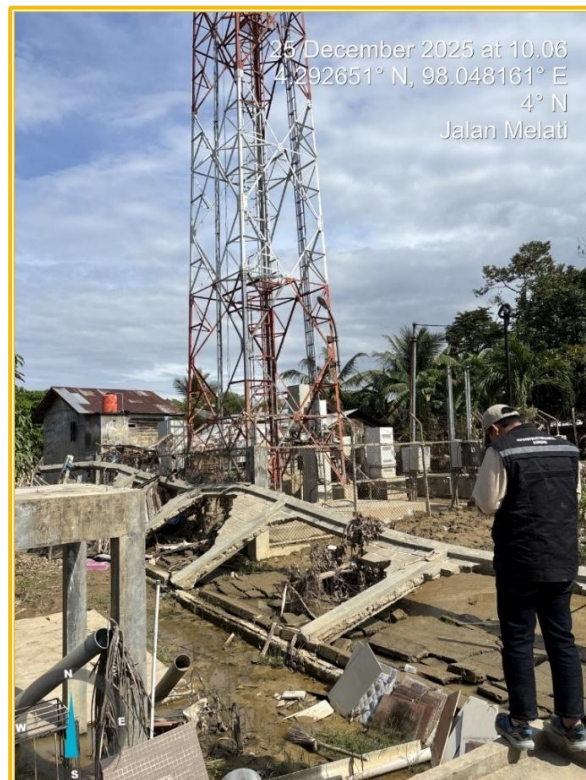
Selain kegiatan monitoring frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh juga melakukan pengukuran kualitas layanan seluler di wilayah Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, layanan seluler terpantau lancar dan tidak terdapat laporan gangguan.

Monitoring Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Terdampak Bencana Hidrometeorologi

Bencana Hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh pada akhir November 2025 berdampak terhadap terganggunya jaringan telekomunikasi di Aceh. Hal ini disebabkan oleh putusnya aliran listrik PLN di wilayah Aceh, putusnya transmisi, dan atau terdampaknya lokasi BTS akibat bencana. Dalam rangka mendukung upaya pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak bencana, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan monitoring recovery jaringan telekomunikasi khususnya pada site-site yang tidak pernah On setelah bencana terjadi.







Dalam melakukan kegiatan ini, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh melakukan pemeriksaan secara langsung pada site di kabupaten/kota yang terdampak bencana. Melalui kunjungan ini, didapatkan data langsung kondisi site yang terdampak bencana.

BAB IV

PENUTUP

PENUTUP

Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2025 yang telah dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa:

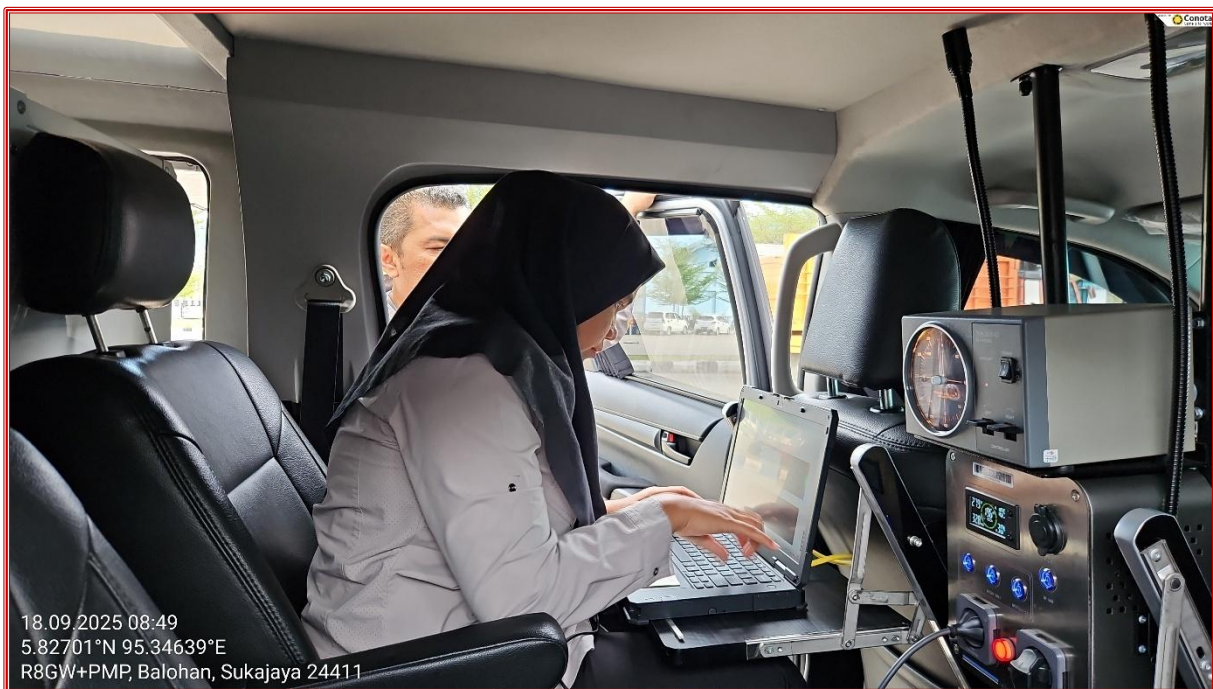
1. Pelaksanaan program kerja selama tahun anggaran 2025 berjalan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya meskipun harus dilalui dengan dinamika yang ada.
2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk sasaran kegiatan semuanya tercapai dan memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan terdapat yang melampaui target.
3. Pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dapat berjalan dengan baik. Perjanjian Kinerja telah memiliki output yang terhimpun dalam big data pada kanal-kanal pelaporan yang tersedia. Outcome dari kegiatan yang dilakukan adalah tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio.
4. Tata kelola birokrasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien merupakan proses reformasi birokrasi secara internal baik dalam pengelolaan anggaran maupun kepegawaian. Secara eksternal Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh menyelenggarakan pelayanan yang humanis dan hangat kepada masyarakat tercermin dalam laporan yang disampaikan.

Demikian Laporan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh tahun 2025 ini dibuat sebagai evaluasi kinerja dan juga sebagai indikator dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi ditahun yang akan datang.

KALEIDOSKOP TAHUN 2025

MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO





PEMERIKSAAN STASIUN RADIO





PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

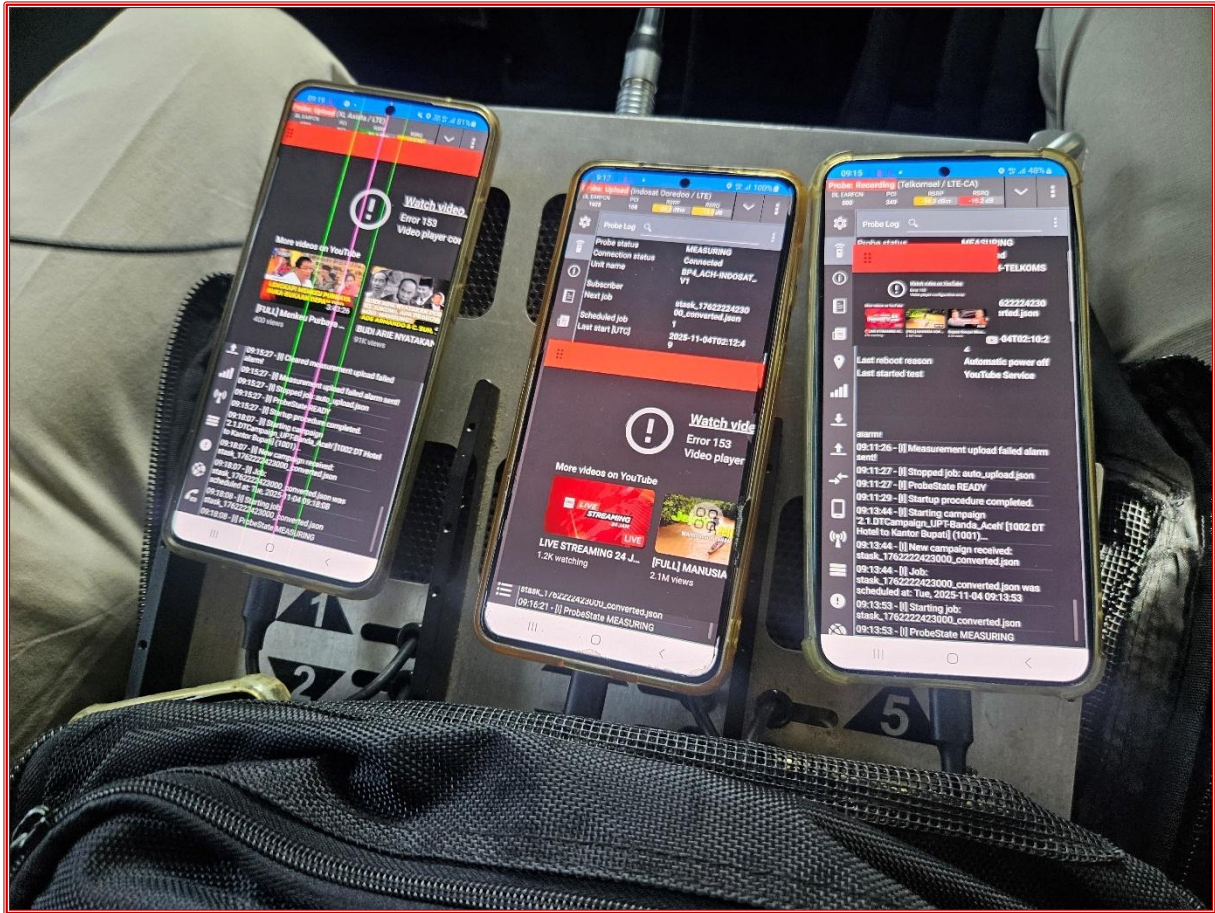




29-04-2025 14:27
2 28 453°N 97.79061°E
7QMP+V63, Pasar Singkil, Singkil Singkil Regency 24472

PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN SELULER





23.07.2025 09:39
4.14794°N 96.19903°E
45XX+4JQ, Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec.
Meureubo, Kabupaten Barat 23681



PENYELENGGARAAN UNAR, BIMTEK, DAN SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK

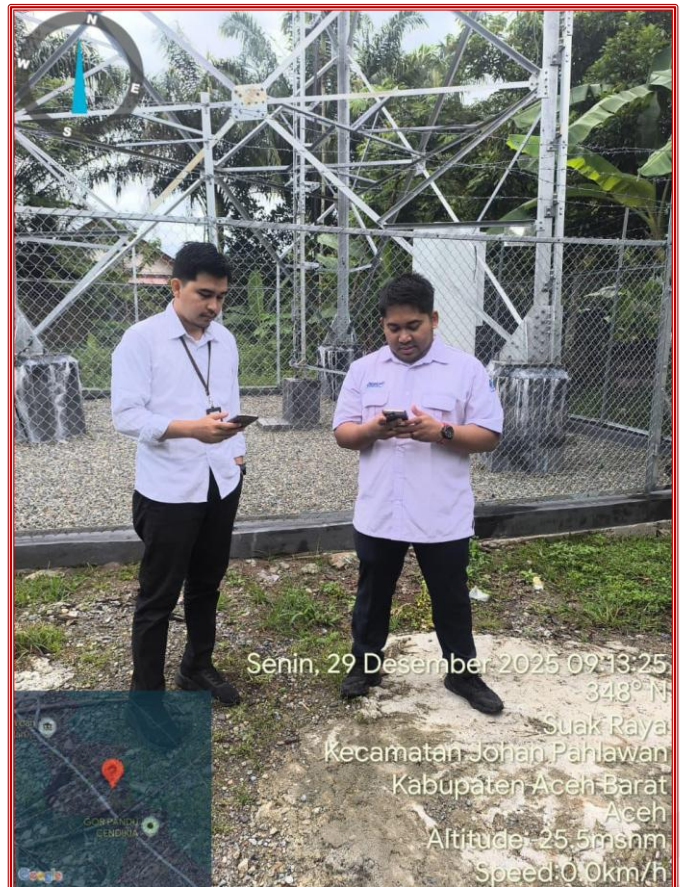


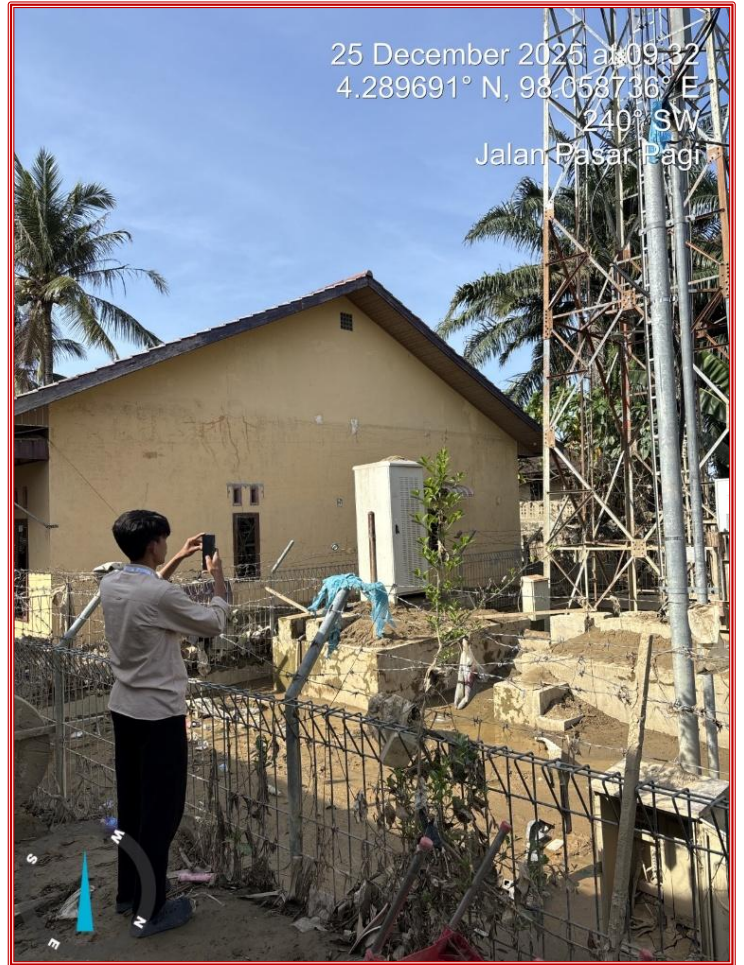




RECOVERY JARINGAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI













KEGIATAN DONOR DARAH





PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI





PENGHARGAAN





